KABUPATEN NGANJUK
JAWA TIMUR



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Jalan Jendral Basuki Rachmad Nomor 1
Telp. (0358) 321746 Fax (0358) 321111
Email : www.nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga telah dapat disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis dan akurat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 mencakup kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2021 berdasarkan 4 (empat) kelompok utama capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada tataran :

1. Capaian kinerja makro;
2. Capaian kinerja keluaran *(output)*;
3. Capaian kinerja hasil *(outcome)*; dan
4. Capaian kinerja penunjang pemerintahan.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)* maka laporan ini disusun dalam rangka mengetahui capaian kinerja pemerintahan daerah dan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Nganjuk, 30 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.1.1 Penjelasan Umum ..... I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah ..... I - 1
b. Data Geografis Wilayah ..... I - 2
c. Jumlah Penduduk ..... I - 9
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan ..... I - 10
e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Daerah ..... I - 17
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ..... I - 19
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah ..... I - 44
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah ..... I - 44
b. Visi Misi Kepala Daerah ..... I - 49
c. Program Pembangunaan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah ..... I - 50
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan ..... I - 51
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ..... I - 51
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... II - 1
2.1 Capaian Kinerja Makro ..... II - 1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... II - 2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran ..... II - 2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil ..... II - 62
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... II - 79

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ..... II - 82
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ..... II - 82
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja ..... II - 85
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya ..... II - 89
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD ..... II - 93
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai ..... II - 95
f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja ..... II - 98
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ... III - 1
A. Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ..... III - 1
B. Tugas Pembantuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk ..... III - 8
C. Tugas Pembantuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk ..... III - 11
D. Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ..... III - 23
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ..... IV - 1
4.1 Urusan Pendidikan ..... IV - 3
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 3
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 4
4.1.3 Realisasi ..... IV - 5
4.1.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 11
4.1.5 Dukungan Personil ..... IV - 15
4.1.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 16
4.2 Urusan Kesehatan ..... IV - 17
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 17
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 19
4.2.3 Realisasi ..... IV - 20
4.2.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 29
4.2.5 Dukungan Personil ..... IV - 38

4.2.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 39
4.3 Urusan Pekerjaan Umum ..... IV - 43
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 43
4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 43
4.3.3 Realisasi ..... IV - 44
4.3.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 45
4.3.5 Dukungan Personil ..... IV - 49
4.3.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 51
4.4 Urusan Perumahan Rakyat ..... IV - 51
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 51
4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 52
4.4.3 Realisasi ..... IV - 53
4.4.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 55
4.4.5 Dukungan Personil ..... IV - 59
4.4.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 60
4.5 Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ..... IV - 61
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 61
4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 62
4.5.3 Realisasi ..... IV - 63
4.5.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 68
4.5.5 Dukungan Personil ..... IV - 70
4.5.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 71
4.6 Sub Urusan Kebakaran Daerah ..... IV - 72
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 72
4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 72
4.6.3 Realisasi ..... IV - 73
4.6.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 75
4.6.5 Dukungan Personil ..... IV - 78
4.6.6 Permasalahan dan Solusi ..... IV - 79
4.7 Sub Urusan Kebencanaan ..... IV - 79
4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar ..... IV - 79
4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah ..... IV - 81
4.7.3 Realisasi ..... IV - 82
4.7.4 Alokasi Anggaran ..... IV - 85

4.7.5 Dukungan Personil.....IV - 87
4.7.6 Permasalahan dan Solusi .....IV - 88
4.8 Urusan Sosial .....IV - 89
4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar.....IV - 89
4.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....IV - 90
4.8.3 Realisasi .....IV - 91
4.8.4 Alokasi Anggaran .....IV - 96
4.8.5 Dukungan Personil.....IV - 99
4.8.6 Permasalahan dan Solusi .....IV - 100
4.9 Program dan Kegiatan .....IV - 100
4.9.1 SPM Bidang Pendidikan.....IV - 100
4.9.2 SPM Bidang Kesehatan .....IV - 103
4.9.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat .IV - 106
4.9.4 SPM Sub Bidang Trantibum dan Sub Bidang Kebakaran.....IV - 109
4.9.5 SPM Sub Bidang Bencana Daerah .....IV - 110
4.9.6 SPM Bidang Sosial .....IV - 111
BAB V PENUTUP.....V - 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai suatu wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Nganjuk dibentuk dan ditetapkan sebagai daerah otonom di lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepubIik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 ini disusun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup laporan ini meliputi : (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan

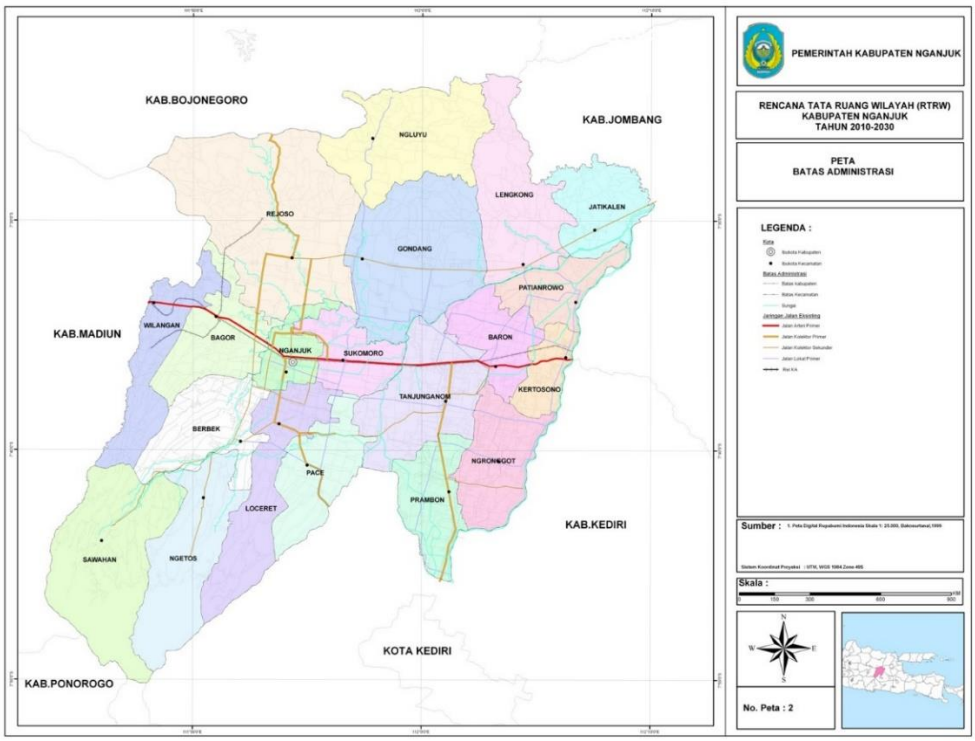
pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Data Geografis Wilayah

a) Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Nganjuk terletak antara 7°20'-7°50' LS dan 111°5'-222°13' BT, dengan ketinggian 60-2.300 m di atas permukaan laut. Secara administratif wilayah Kabupaten Nganjuk berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bojonegoro;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri; dan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun.



Topografi Kabupaten Nganjuk meliputi: sebelah Barat Daya merupakan Daerah Pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000-2.300 m di atas permukaan laut, potensial untuk tanaman perkebunan dan hortikultura. Bagian Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60-140 m di atas permukaan laut, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Bagian Utara merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60- 300 m di atas permukaan

laut, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah 122.433,1 Ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 264 desa, dan 20 kelurahan.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
Sawahan	11.588,60	9,47
Ngetos	6.021,20	4,92
Berbek	4.829,70	3,94
Loceret	6.869,50	5,61
Pace	4.845,70	3,96
Tanjunganom	7.084,20	5,79
Prambon	4.115,80	3,36
Ngronggot	5.298,50	4,33
Kertosono	2.267,50	1,85
Patianrowo	3.559,30	2,91
Baron	3.680,20	3,01
Gondang	9.594,30	7,84
Sukomoro	3.538,80	2,89
Nganjuk	2.258,60	1,84
Bagor	5.115,30	4,18
Wilangan	5.063,90	4,14
Rejoso	15.166,30	12,39
Ngluyu	8.614,90	7,04
Lengkong	8.717,30	7,12
Jatikalen	4.203,50	3,43
Kabupaten Nganjuk	**122.433,10**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

b) Klimatologi dan Hidrologi

Secara umum, curah hujan di Kabupaten Nganjuk dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur tidak terlalu jauh berbeda. Kabupaten Nganjuk pada bulan Juni sampai dengan September/Oktober terjadi musim kemarau dan pada bulan Nopember/Desember sampai bulan Mei mengalami musim penghujan. Pada bulan-bulan tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli–September berhembus angin kencang dari Gunung Wilis menuju Kota Nganjuk, karena itu pula Kota Nganjuk dikenal dengan

sebutan Kota Angin.

Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang dilewati aliran Sungai Brantas sehingga sungai atau anak sungai di daerah Kabupaten Nganjuk bermuara ke Sungai Brantas. Kali Widas yang berasal dari Kabupaten Madiun mengalir dari bagian barat, sedangkan Kali Kuncir yang berasal dari Gunung Wilis melewati Kota Nganjuk di bagian utara dan selatan lalu bertemu di Kali Widas, yang selanjutnya mengalir ke timur dan bermuara di Sungai Brantas. Sungai Brantas juga merupakan batas antara Kabupaten Nganjuk di sebelah timur dengan Kabupaten Jombang dan Kediri.

Kali Widas beserta anak-anak sungainya antara lain Kali Kedungsoko dan Kali Kedung Pedet mengalir melewati tengah Kabupaten Nganjuk yang merupakan dataran rendah. Pada musim penghujan daerah ini menerima beban debit air yang cukup besar dari lereng Gunung Wilis, sehingga daerah-daerah ini yang meliputi beberapa kecamatan sering mengalami bencana banjir.

Keadaan air tanah di Kabupaten Nganjuk pada wilayah dataran rendah merupakan air tanah dangkal, sedangkan pada wilayah Nganjuk bagian utara yang meliputi Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Ngluyu merupakan air tanah dalam.

Tabel 1.2
Suhu dan Kelembapan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	19.8	23.2	28.3	74.0	89.0	99.0
Februari	19.8	22.9	29.2	73.0	90.0	100.0
Maret	19.8	23.6	29.4	69.0	86.0	98.0
April	18.4	24.0	30.0	57.0	82.0	100.0
Mei	19.0	24.2	30.0	60.0	82.0	98.0
Juni	19.2	23.7	29.7	69.0	84.0	98.0
Juli	17.2	23.4	31.4	42.0	73.0	91.0
Agustus	18.8	24.2	31.4	50.0	73.0	95.0
September	19.0	24.8	32.2	52.0	73.0	96.0
Oktober	19.2	25.8	32.6	46.0	73.0	96.0
November	20.0	23.8	30.7	63.0	86.0	98.0
Desember	20.0	24.0	30.7	69.0	86.0	98.0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Tabel 1.3
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	-	2	7	1010.4	1012.4	1015.8
Februari	1	3	10	1009.9	1013.0	1015.3
Maret	1	2	8	1009.6	1012.7	1015.3
April	1	2	7	1009.2	1014.4	1016.8
Mei	1	2	6	1011.8	1014.0	1016.1
Juni	1	2	8	1013.7	1015.2	1016.8
Juli	2	2	10	1013.1	1015.0	1017.9
Agustus	1	2	7	1013.3	1015.3	1017.3
September	1	2	10	1013.3	1014.9	1016.4
Oktober	1	2	9	1012.2	1014.7	1017.6
November	1	1	9	1011.6	1013.0	1016.1
Desember	-	2	6	1012.0	1013.9	1016.5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Tabel 1.4
Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
Januari	650,4	29	19,1
Februari	675,5	26	23,3
Maret	523,3	24	34,2
April	312,0	12	51,8
Mei	155,0	8	51,6
Juni	113,0	9	49,3
Juli	0,3	1	64,1
Agustus	4,2	3	70,7
September	39,5	7	55,9
Oktober	44,8	7	60,4
November	596,3	25	27,8
Desember	236,6	25	28,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

c) Topografi

Topografi Kabupaten Nganjuk meliputi, sebelah barat daya merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000-2.300 m di atas permukaan laut, potensial untuk tanaman perkebunan dan holtikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60-140 m di atas permukaan laut, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Bagian utara merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m di atas permukaan laut, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur.

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46-95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian 150-750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan.

Pada bagian dataran rendah, keadaan air tanah merupakan air tanah dangkal. Kabupaten Nganjuk dilewati oleh Kali Widas yang berasal dari Kabupaten Madiun dan Kali Kuncir yang melewati Kota Nganjuk di bagian utara dan selatan. Kedua sungai tersebut bertemu di Kali Kedungsoko yang mengalir ke utara bertemu dengan Kali Widas. Kali Widas tersebut kemudian mengalir ke timur melalui Kecamatan Lengkong dan bermuara di Kali Brantas yang merupakan batas wilayah Kabupaten Nganjuk bagian timur.

d) Tata Guna Lahan

Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk adalah 122.433,1 ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 264 desa dan 20 kelurahan. Tata guna lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi lahan sawah seluas 42.754 ha (34,92%), pertanian bukan sawah seluas 48.024 ha (39,22%), dan bukan pertanian seluas 31.655 ha (25,85%).

Mayoritas penduduk Kabupaten Nganjuk bekerja di sektor pertanian sehingga sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk. Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang

cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian.

Tabel 1.5
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Lahan (ha)			Jumlah (ha)
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
Sawahan	1364	9714	760	11838
Ngetos	1571	1819	2631	6021
Berbek	1889	2106	736	4731
Loceret	2687	2885	1302	6874
Pace	2743	1090	982	4815
Tanjunganom	3999	285	2800	7084
Prambon	2443	721	950	4114
Ngronggot	2147	1962	1189	5298
Kertosono	1115	281	852	2248
Patianrowo	1832	710	1018	3560
Baron	2063	620	899	3582
Gondang	3547	2663	3385	9595
Sukomoro	2751	144	643	3538
Nganjuk	1151	154	953	2258
Bagor	2288	2005	821	5114
Wilangan	1160	3442	462	5064
Rejoso	4168	9927	1071	15166
Ngluyu	1044	2389	5181	8614
Lengkong	1787	3887	3043	8717
Jatikalen	1005	1220	1977	4202
Jumlah	**42754**	**48024**	**31655**	**122433**

*Data Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Kondisi geologi daerah dapat menggambarkan potensi sumber daya alam, serta beberapa kemungkinan bencana yang mungkin timbul. Wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Zona Solo dengan Sub Zona Ngawi. Zona ini ditempati oleh gunung api yang berumur kwarter dengan puncak seperti Gunung Wilis, Gunung Lawu, dan lain-lain. Diantaranya terdapat dataran seperti dataran Madiun, Kediri, Jember, yang umumnya tersusun oleh endapan lahar dan batuan gunung api. Dataran tersebut merupakan cekungan air tanah produktif yang didominasi oleh endapan alluvium

vulkanik. Batuan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk umumnya terdiri dari endapan alluvium, sedangkan sebagian lainnya terdiri dari batuan berumur piosen sampai plistosen.

Wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan ciri-ciri fisik dan batuan penyusunnya secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) Perbukitan Kendeng

   Di daerah ini tersusun oleh batuan sedimen pasir sampai lempung liat setebal 40 – 80 meter dengan sisipan tipis pasir.

2) Gunung Api Wilis

   Pada daerah ini terdapat batu pasir tufa yang mengandung sisipan pasir atau breksi. Batuan didaerah ini berupa lapisan batuan yang berasal dari rombakan material letusan gunung api, breksi,lahar dan batu pasir bersifat andesit. Pada daerah ini tanahnya terdiri dari bahan-bahan asal pegunungan dengan ketebalan 80 – 110 meter berupa pasir tufa berbutir halus sisipan kasar atau kerikil dengan sisipan lempung tufaan atau pasir lempung di dalamnya.

3) Dataran Rendah

   Di daerah ini bagian atas setebal 30 – 70 meter terdiri dari lempung abu-abu hitam dengan pasiran coklat yang dipisahkan oleh lapisan tipis pasiran sebagai pengandung air. Bagian bawah berupa lapisan batu pasir tufaan atau lempung tufaan dengan sisipan pasir atau kerikil.

   Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering (27%) dan tanah hutan (38%). Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan. Bila di lihat dari tipe sebaran tanah yang ada, maka wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi ke dalam 3 asal jenis tanah berdasarkan pembentukannya, yaitu berasal dari Jenis tanah yang pembentukannya berasal dari material gunung berapi seperti tanah andosol, latosol, grumosol dan regosol tersebar hampir di seluruh kecamatan-

kecamatan, jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai yang sering disebut dengan tanah alluvial di dataran rendah dan tanah yang berasal dari pelapukan bebatuan besar dengan jenis tanah litosol. Wilayah yang memiliki jenis tanah tersebut adalah Rejoso dan Ngluyu. Sebaran jenis tanah ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jenis Tanah di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Jenis Tanah
Sawahan	Andosol, Latosol
Ngetos	Andosol, Latosol
Berbek	Latosol, Gromosol
Loceret	Andosol, Latosol, Gromosol, Aluvial
Pace	Latosol, Gromosol, Aluvial
Tanjunganom	Gromosol, Aluvial
Prambon	Aluvial
Ngronggot	Aluvial
Kertosono	Aluvial
Patianrowo	Aluvial, Regosol
Baron	Aluvial
Gondang	Aluvial, Regosol
Sukomoro	Aluvial, Regosol
Nganjuk	Gromosol, Aluvial, Regosol
Bagor	Gromosol, Regosol
Wilangan	Latosol, Gromosol, Regosol
Rejoso	Latosol, Regosol, Litosol
Ngluyu	Latosol, Regosol, Litosol
Lengkong	Regosol
Jatikalen	Aluvial, Regosol

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.109.683 jiwa. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk terus mengalami pertumbuhan, dari 1.048.799 jiwa pada tahun 2017 menjadi 1.109.683 jiwa pada tahun 2021 dengan rincian 558.087 jiwa penduduk laki-laki dan 551.596 jiwa penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 0.452 persen. Pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah setiap

tahun ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar bonus demografi di masa yang akan datang dapat menjadi modal pembangunan daerah.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nganjuk

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
2021	1.109.683	0,50	906
2020	1.103.902	0,82	901
2019	1.054.611	0,26	861
2018	1.051.900	0,30	859
2017	1.048.799	0,33	857
2016	1.045.375	0,35	854
2015	1.041.716	0,38	851
2014	1.037.723	0,40	848
2013	1.033.597	0,45	844
2012	1.028.914	0,47	840

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021 tercatat sebesar 0,50 persen atau menurun sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 0,47 persen dan terus mengalami kenaikan dan penurunan laju pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Tabel 1.8
Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.18.14	Bagor	2	19	Desa	Bagor
					Balongrejo
					Banaran Kulon
					Banaran Wetan
					Buduran
					Gandu
					Gemenggeng

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Girirejo
					Karang Tengah
					Kendalrejo
					Kerep Kidul
					Kutorejo
					Ngumpul
					Paron
					Pesudukuh
					Petak
					Sekarputih
					Selorejo
					Sugihwaras
				Kelurahan	Guyangan
					Kedondong
35.18.10	Baron	-	11	Desa	Baron
					Garu
					Gebangkerep
					Jambi
					Jekek
					Katerban
					Kemaduh
					Kemlokolegi
					Mabung
					Sambiroto
					Waung
35.18.03	Berbek	-	19	Desa	Balongrejo
					Bendungrejo
					Berbek
					Bulu
					Cepoko
					Grojogan
					Kacangan
					Maguan
					Mlilir
					Ngrawan
					Patranrejo
					Salamrojo
					Semare
					Sendangbumen
					Sengkut
					Sonopatik
					Sumberurip
					Sumberwindu
					Tiripan
35.18.17	Gondang	-	17	Desa	Balonggebang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Campur
					Gondangkulon
					Ja"an
					Karangsemi
					Kedungglugu
					Ketawang
					Losari
					Mojoseto
					Nglinggo
					Ngunjung
					Pandean
					Sanggrahan
					Senggowar
					Senjayan
					Sumberagung
					Sumberjo
35.18.20	Jatikalen	-	11	Desa	Begendeng
					Dawuhan
					Dlururejo
					Gondang Wetan
					Jatikalen
					Lumpangkuwik
					Munung
					Ngasem
					Perning
					Pule
					Pulowetan
35.18.08	Kertosono	1	13	Desa	Bangsri
					Drenges
					Kalianyar
					Kepuh
					Kudu
					Kutorejo
					Lambangkuning
					Nglawak
					Pandantoyo
					Pelem
					Tanjung
					Tembarak
					Yuwono
				Kelurahan	Banaran
35.18.19	Lengkong	-	16	Desa	Balongasem
					Bangle
					Banjardowo
					Jatipunggur

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Jegreg
					Kedungmlaten
					Ketandan
					Lengkong
					Ngepung
					Ngringin
					Pinggir
					Prayungan
					Sawahan
					Sumberkepuh
					Sumbermiri
					Sumbersono
35.18.04	Loceret	-	22	Desa	Bajulan
					Candirejo
					Gejagan
					Genjeng
					Godean
					Jatirejo
					Karangsono
					Kenep
					Kwagean
					Loceret
					Macanan
					Mungkung
					Ngepeh
					Nglaban
					Patihan
					Putukrejo
					Sekaran
					Sombron
					Sukorejo
					Tanjungrejo
					Teken Glagahan
					Tempel Wetan
35.18.13	Nganjuk	13	2	Desa	Balongpacul
					Kedungdowo
				Kelurahan	Begadung
					Bogo
					Cangkringan
					Ganungkidul
					Jatirejo
					Kartoharjo
					Kauman
					Kramat
					Mangundikaran

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Payaman
					Ploso
					Ringinanom
					Werungotok
35.18.02	Ngetos	-	9	Desa	Blongko
					Kepel
					Klodan
					Kuncir
					Kweden
					Mojoduwur
					Ngetos
					Oro-oro Ombo
					Suru
35.18.18	Ngluyu	-	6	Desa	Bajang
					Gampeng
					Lengkong Lor
					Ngluyu
					Sugihwaras
					Tempuran
35.18.07	Ngronggot	-	13	Desa	Banjarsari
					Betet
					Cengkok
					Dadapan
					Juwet
					Kalianyar
					Kaloran
					Kelutan
					Klurahan
					Mojokendil
					Ngronggot
					Tanjungkalang
					Trayang
35.18.05	Pace	-	18	Desa	Babadan
					Banaran
					Batembat
					Bodor
					Cerme
					Gemenggeng
					Gondang
					Jampes
					Jatigreges
					Jetis
					Joho
					Kecubung
					Kepanjen

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Mlandangan
					Pace Wetan
					Pacekulon
					Plosoharjo
					Sanan
35.18.09	Patianrowo	-	11	Desa	Babadan
					Bukur
					Lestari
					Ngepung
					Ngrombot
					Pakuncen
					Patianrowo
					Pecuk
					Pisang
					Rowomarto
					Tirtobinangun
35.18.06	Prambon	-	14	Desa	Baleturi
					Bandung
					Gondanglegi
					Kurungrejo
					Mojoagung
					Nglawak
					Rowoharjo
					Sanggrahan
					Singkalanyar
					Sono Ageng
					Sugihwaras
					Tanjungtani
					Tegaron
					Watudandang
35.18.16	Rejoso	-	24	Desa	Banjarejo
					Bendoasri
					Gempol
					Jatirejo
					Jintel
					Kedungpadang
					Klagen
					Mlorah
					Mojorembun
					Mungkung
					Musir Kidul
					Musir Lor
					Ngadiboyo
					Ngangkatan
					Puhkerep

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Rejoso
					Sambikerep
					Setren
					Sidokare
					Sukorejo
					Talang
					Talun
					Tritik
					Wengkal
35.18.01	Sawahan	-	9	Desa	Bareng
					Bendolo
					Duren
					Kebonagung
					Margopatut
					Ngliman
					Sawahan
					Sidorejo
					Siwalan
35.18.12	Sukomoro	2	10	Desa	Bagor Wetan
					Blitaran
					Bungur
					Kedungsoko
					Nglundo
					Ngrami
					Ngrengket
					Pehserut
					Putren
					Sumengko
				Kelurahan	Kapas
					Sukomoro
35.18.11	Tanjunganom	2	14	Desa	Kedungombo
					Sumberkepuh
					Kampungbaru
					Wates
					Malangsari
					Getas
					Sonobekel
					Ngadirejo
					Banjaranyar
					Sidoharjo
					Jogomerto
					Kedungrejo
					Sambirejo
					Demangan
				Kelurahan	Tanjunganom

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Warujayeng
35.18.15	Wilangan	-	6	Desa	Mancon
					Ngadipiro
					Ngudikan
					Sudimoroharjo
					Sukoharjo
					Wilangan
TOTAL		**20**	**264**		

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Tabel 1.9
Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah di Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai			
		Struktural	Pelaksana	Fungsional	Total
1.	Sekretariat Daerah	39	88	10	137
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	17	0	27
3.	Inspektorat Daerah	8	7	22	37
4.	Dinas Pendidikan	16	200	4946	5162
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	13	26	0	39
6.	Dinas Kesehatan	55	187	777	1019
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	6	0	24
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	12	0	24
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11	17	0	28
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	9	0	22
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17	63	0	80
12.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	18	10	0	28
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	10	0	18
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	176	1	212
15.	Dinas Perhubungan	14	53	2	69
16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12	43	1	56

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai			
		Struktural	Pelaksana	Fungsional	Total
17.	Dinas Lingkungan Hidup	15	78	0	93
18.	Dinas Pertanian	28	47	108	183
19.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6	12	1	19
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	8	1	17
21.	Satuan Polisi Pamong Praja	12	57	0	69
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	22	0	34
23.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	34	0	48
24.	Badan Pendapatan Daerah	15	30	0	45
25.	Badan Kepegawaian Daerah	11	22	1	34
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	5	0	15
27.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	3	9	0	12
28.	RSUD Nganjuk	18	77	337	432
29.	RSUD Kertosono	12	59	232	303
30.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	20	0	30
31.	Kecamatan Nganjuk	7	8	0	15
	Kelurahan Payaman	3	0	0	3
	Kelurahan Kartoharjo	5	0	0	5
	Kelurahan Kauman	4	1	0	5
	Kelurahan Ringinanom	4	3	0	7
	Kelurahan Begadung	2	2	0	4
	Kelurahan Cangkringan	4	1	0	5
	Kelurahan Bogo	4	0	0	4
	Kelurahan Ploso	3	0	0	3
	Kelurahan Ganung Kidul	4	1	0	5
	Kelurahan Mangundikaran	3	1	0	4
	Kelurahan Werungotok	3	2	0	5
	Kelurahan Kramat	3	2	0	5
	Kelurahan Jatirejo	3	2	0	5
32.	Kecamatan Bagor	8	8	0	16
	Kelurahan Kedondong	2	2	0	4
	Kelurahan Guyangan	2	0	0	2
33.	Kecamatan Rejoso	5	14	0	19
34.	Kecamatan Sukomoro	3	3	0	6
	Kelurahan Kapas	2	3	0	5
	Kelurahan Sukomoro	2	2	0	4
35.	Kecamatan Pace	7	12	0	19
36.	Kecamatan Tanjunganom	6	10	0	16
	Kelurahan Warujayeng	2	6	0	8

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai			
		Struktural	Pelaksana	Fungsional	Total
	Kelurahan Tanjunganom	1	1	0	2
37.	Kecamatan Kertosono	3	12	0	15
	Kelurahan Banaran	4	6	0	10
38.	Kecamatan Prambon	7	9	0	16
39.	Kecamatan Berbek	7	14	0	21
40.	Kecamatan Loceret	7	12	0	19
41.	Kecamatan Ngronggot	8	14	0	22
42.	Kecamatan Lengkong	6	8	0	14
44.	Kecamatan Patianrowo	6	10	0	16
45.	Kecamatan Gondang	6	9	0	15
46.	Kecamatan Baron	8	12	0	20
47.	Kecamatan Wilangan	5	10	0	15
48.	Kecamatan Ngluyu	2	4	0	6
49.	Kecamatan Ngetos	3	6	0	9
50.	Kecamatan Sawahan	4	14	0	18
51	Kecamatan Jatikalen	5	7	0	12
Total		**646**	**1.635**	**6.439**	**8.720**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a) Pendapatan Daerah

Target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Pendapatan Asli Daerah	359,762,424,055.00	478,462,298,146.24	132.99
B.	Pendapatan Transfer	1,975,606,394,507.00	2,020,931,609,297.00	102.29
C.	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	109,043,853,612.00	109,043,853,000.00	100,00
	Total Pendapatan	2,444,412,672,174.00	2,608,437,760,443.24	106.71

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

Pada tahun 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.478,462,298,146.24 atau 132,99% dari target ditetapkan yang nilainya adalah Rp.359,762,424,055.00. Adapun rincian target dan realisasi PAD pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	88,489,600,000.00	122,126,175,036.00	138.01
2	Pendapatan Retribusi Daerah	27,803,503,287.00	25,138,334,329.55	90.41
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,741,455,500.00	4,040,422,262.90	107.99
4	Lain-lain PAD yang Sah	239,727,865,268.00	327,157,366,517.79	136.47
	Jumlah PAD	359,762,424,055.00	478,462,298,146.24	132.99

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

Pada tahun 2021, realisasi Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp.2,020,931,609,297.00 atau 102.29 % dari pagu APBD ditetapkan yang nilainya adalah sebesar Rp 1,975,606,394,507.00 terdiri dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,820,178,567,900.00 atau 99.29% dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.200,753,041,397.00 atau 140.90%

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Dana Transfer

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,833,122,370,577.00	1,820,178,567,900.00	99.29
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,499,937,831,577.00	1,486,994,028,900.00	99.14
a.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	92,629,701,577.00	124,278,775,421.00	134.17
b.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	982,963,245,000.00	982,963,245,000.00	100.00
c.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	158,273,086,000.00	134,328,897,622.00	84.87
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	266,071,799,000.00	245,423,110,857.00	92.24
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	333,184,539,000.00	333,184,539,000.00	100.00
a.	Dana Insentif Daerah (DID)	47,069,631,000.00	47,069,631,000.00	100.00
b.	Dana Desa	286,114,908,000.00	286,114,908,000.00	100.00
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	142,484,023,930.00	200,753,041,397.00	140.90

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil	115,601,628,430.00	174,278,517,797.00	150.76
2	Bantuan Keuangan	26,882,395,500.00	26,474,523,600.00	98.48
C	PENDAPATAN TRANSFER	1,975,606,394,507.00	2,020,931,609,297.00	102.29

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

Realisasi penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 109,043,853,612,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 109,043,853,612,00.

Tabel 1.13
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109,043,853,612.00	109,043,853,612.00	100.00
Pendapatan Hibah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103,043,853,612.00	103,043,853,612.00	100.00
Lain-lain Pendapatan	103,043,853,612.00	103,043,853,612.00	100.00
Pendapatan Hibah Dana BOS	103,043,853,612.00	103,043,853,612.00	100.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

b) Belanja Daerah

Pagu belanja daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,779,867,012,895.76 yang meliputi Belanja Operasi terealisasi sebesar 84.41%, Belanja Modal terealisasi sebesar 80.44%, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 55.03%, dan Belanja Transfer terealisasi sebesar 99.93%.

Secara prinsip pemanfaatan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, adalah dengan mengingat bahwa Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya

dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya memperhatikan output atas input yang telah dialokasikan sesuai dengan target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah. Deskripsi singkat realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**1,784,231,630,541.20**	**1,554,081,900,326.39**	**87.10**
	1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**864,581,781,720.00**	**789,445,288,311.00**	**91.31**
	Dinas Pendidikan	**864,581,781,720.00**	**789,445,288,311.00**	**91.31**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	688,266,164,605.00	619,487,946,327.00	90.01
	Program Pengelolaan Pendidikan	148,012,308,165.00	143,117,154,385.00	96.69
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28,303,308,950.00	26,840,187,599.00	94.83
	2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**625,133,573,874.2**	**501,031,084,011.1**	**80.15**
	Dinas Kesehatan	**322,783,669,171.0**	**197,929,899,527.0**	**61.32**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109,999,821,915.00	85,809,033,352.00	78.01
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	193,495,062,015.00	103,517,326,353.00	53.50
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	17,086,936,091.00	7,438,334,497.00	43.53
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	395,313,000.00	181,812,325.00	45.99
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,806,536,150.00	983,393,000.00	54.44
	RSUD Nganjuk	**229,849,904,703.2**	**203,315,998,792.0**	**88.46**
	Program Penunjang Urusan	172,270,635,881.2	153,799,266,419.0	89.28

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57,579,268,822.00	49,516,732,373.00	86.00
	RSUD Kertosono	**72,500,000,000.00**	**99,785,185,692.08**	**137.63**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72,500,000,000.00	99,785,185,692.08	137.63
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**242,883,209,781.00**	**221,203,610,332.09**	**91.07**
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**204,422,144,601.00**	**185,017,854,412.43**	**90.51**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30,206,856,500.00	26,644,077,857.00	88.21
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	24,084,147,000.00	21,488,988,465.52	89.22
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6,587,050,000.00	6,398,919,905.69	97.14
	Program Penataan Bangunan Gedung	9,076,150,000.00	8,336,296,889.02	91.85
	Program Penyelenggaraan Jalan	132,875,641,101.00	120,927,948,245.20	91.01
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100,000,000.00	63,956,900.00	63.96
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,492,300,000.00	1,157,666,150.00	77.58
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	**38,461,065,180.00**	**36,185,755,919.66**	**94.08**
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,426,497,230.00	3,555,171,048.02	80.32
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,663,997,550.00	3,551,252,100.00	96.92
	Program Penyelenggaraan Jalan	26,602,920,000.00	25,748,617,350.00	96.79
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3,767,650,400.00	3,330,715,421.64	88.40
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**28,875,701,460.00**	**22,539,056,595.71**	**78.06**
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	**28,875,701,460.00**	**22,539,056,595.71**	**78.06**
	Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,724,856,960.00	6,284,071,181.00	93.45
	Program Pengembangan	17,390,944,200.00	12,358,962,296.06	71.07

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Perumahan			
	Program Kawasan Permukiman	3,553,568,200.00	3,136,642,240.00	88.27
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	530,050,000.00	314,687,240.00	59.37
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	676,282,100.00	444,693,638.65	65.76
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17,575,099,206.00**	**14,842,551,397.51**	**84.45**
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**6,275,035,900.00**	**4,919,116,309.00**	**78.39**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,117,846,160.00	3,030,940,659.00	73.60
	Program Penanggulangan Bencana	2,157,189,740.00	1,888,175,650.00	295.05
	Satuan Polisi Pamong Praja	**11,300,063,306.00**	**9,923,435,088.51**	**87.82**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,646,170,906.00	7,442,623,767.51	86.08
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,742,851,450.00	1,612,705,900.00	92.53
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	911,040,950.00	868,105,421.00	95.29
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**5,182,264,500.00**	**5,020,309,679.00**	**96.87**
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**5,182,264,500.00**	**5,020,309,679.00**	**96.87**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,050,267,150.00	3,974,039,629.00	98.12
	Program Pemberdayaan Sosial	273,780,950.00	270,215,450.00	98.70
	Program Rehabilitasi Sosial	488,720,150.00	457,444,200.00	93.60
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,494,850.00	50,923,350.00	50.67
	Program Penanganan Bencana	240,999,800.00	239,685,450.00	99.45
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	28,001,600.00	28,001,600.00	100.00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**3,493,813,850.00**	**3,290,519,113.00**	**94.18**
7	**URUSAN PEMERINTAHAN**	**3,493,813,850.00**	**3,290,519,113.00**	**94.18**

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	BIDANG TENAGA KERJA			
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro	**3,493,813,850.00**	**3,290,519,113.00**	**94.18**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,026,791,050.00	1,877,187,213.00	92.62
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,319,002,800.00	1,268,108,400.00	96.14
	Program Hubungan Industrial	148,020,000.00	145,223,500.00	98.11
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**328,334,400.00**	**321,727,250.00**	**97.99**
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**328,334,400.00**	**321,727,250.00**	**97.99**
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	136,781,500.00	131,159,500.00	95.89
	Program Perlindungan Perempuan	16,974,100.00	16,800,000.00	98.97
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	36,968,000.00	36,351,500.00	98.33
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	59,490,800.00	59,296,250.00	99.67
	Program Perlindungan Khusus Anak	78,120,000.00	78,120,000.00	100.00
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4,383,104,700.00**	**3,930,824,672.00**	**89.68**
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	**4,383,104,700.00**	**3,930,824,672.00**	**89.68**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,740,452,700.00	3,297,489,812.00	88.16
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	51,081,350.00	50,842,410.00	99.53
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kemandirian Pangan	548,035,650.00	546,062,400.00	99.64
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	43,535,000.00	36,430,050.00	83.68
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**21,601,700,450.00**	**19,733,190,574.47**	**91.35**
	Dinas Lingkungan Hidup	**21,476,893,450.00**	**19,621,308,874.47**	**91.36**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,363,480,350.00	9,822,839,527.00	86.44

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Kabupaten/Kota			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	104,100,000.00	104,090,700.00	99.99
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,997,367,700.00	1,938,785,723.40	97.07
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,632,284,300.00	3,551,424,996.57	97.77
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	57,413,000.00	54,230,800.00	94.46
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14,719,950.00	14,596,400.00	99.16
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	61,772,000.00	54,532,700.00	88.28
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15,973,250.00	15,555,240.00	97.38
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	73,125,300.00	64,599,500.00	88.34
	Program Pengelolaan Persampahan	4,156,657,600.00	4,000,653,287.50	96.25
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**124,807,000.00**	**111,881,700.00**	**89.64**
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	124,807,000.00	111,881,700.00	89.64
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**7,423,905,670.00**	**5,386,045,019.00**	**72.55**
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**7,423,905,670.00**	**5,386,045,019.00**	**72.55**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,013,856,870.00	4,977,227,519.00	70.96
	Program Pendaftaran Penduduk	402,371,100.00	402,230,000.00	99.96
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	7,677,700.00	6,587,500.00	85.80
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**9,853,103,346.00**	**7,669,996,968.53**	**77.84**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	**9,665,735,846.00**	**7,552,444,628.53**	**78.14**
	Program Penunjang Urusan	4,855,924,700.00	4,122,993,931.66	84.91

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Program Peningkatan Kerjasama Desa	56,220,000.00	51,636,679.97	91.85
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,531,046,046.00	2,566,459,367.85	72.68
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,222,545,100.00	811,354,649.05	66.37
Sekretariat Daerah	**187,367,500.00**	**117,552,340.00**	**62.74**
Program Administrasi Pemerintahan Desa	187,367,500.00	117,552,340.00	62.74
13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**13,930,436,300.00**	**10,625,780,766.40**	**76.28**
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**13,930,436,300.00**	**10,625,780,766.40**	**76.28**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,061,834,550.00	993,935,108.07	93.61
Program Pengendalian Penduduk	101,432,000.00	90,674,900.00	89.39
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11,550,888,200.00	8,954,710,158.33	77.52
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1,216,281,550.00	586,460,600.00	48.22
14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**30,002,048,768.00**	**28,030,401,884.03**	**93.43**
Dinas Perhubungan	**30,002,048,768.00**	**28,030,401,884.03**	**93.43**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,272,218,050.00	20,598,467,562.00	92.49
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7,729,830,718.00	7,431,934,322.03	96.15
15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**7,091,451,265.00**	**5,621,394,689.95**	**79.27**
Dinas Komunikasi dan Informatika	**7,091,451,265.00**	**5,621,394,689.95**	**79.27**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,559,900,665.00	2,367,829,445.95	66.51
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1,057,662,600.00	901,456,844.00	85.23
Program Aplikasi Informatika	2,473,888,000.00	2,352,108,400.00	95.08

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**884,935,200.00**	**848,969,500.00**	**95.94**
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	**884,935,200.00**	**848,969,500.00**	**95.94**
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	261,770,000.00	259,101,300.00	98.98
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	76,460,000.00	75,664,200.00	98.96
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	135,486,800.00	130,963,300.00	96.66
	Program Pengembangan UMKM	411,218,400.00	383,240,700.00	93.20
	17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**6,475,563,200.00**	**5,195,614,235.00**	**80.23**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**6,475,563,200.00**	**5,195,614,235.00**	**80.23**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,731,029,200.00	4,870,272,403.00	84.98
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	144,567,500.00	138,059,853.00	95.50
	Program Promosi Penanaman Modal	67,557,000.00	67,232,429.00	99.52
	Program Pelayanan Penanaman Modal	111,360,000.00	69,826,000.00	62.70
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394,062,000.00	26,353,550.00	6.69
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	26,987,500.00	23,870,000.00	88.45
	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**385,642,700.00**	**363,739,850.00**	**94.32**
	Satuan Polisi Pamong Praja	**87,642,550.00**	**74,136,300.00**	**84.59**
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	87,642,550.00	74,136,300.00	84.59
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	**298,000,150.00**	**289,603,550.00**	**97.18**
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	298,000,150.00	289,603,550.00	97.18
	19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**258,400,000.00**	**7,480,000.00**	**2.89**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	**258,400,000.00**	**7,480,000.00**	**2.89**

URAIAN					ANGGARAN	REALISASI	(%)
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	258,400,000.00	7,480,000.00	2.89
	20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**132,726,461.00**	**104,918,800.00**	**79.05**
			Dinas Komunikasi Dan Informatika		**132,726,461.00**	**104,918,800.00**	**79.05**
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	35,000,000.00	9,680,000.00	27.66
				Program Aplikasi Informatika	97,726,461.00	95,238,800.00	97.45
	21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**2,130,468,500.00**	**2,100,146,240.00**	**98.58**
			Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga Dan Kebudayaan		**2,130,468,500.00**	**2,100,146,240.00**	**98.58**
				Program Pengembangan Kebudayaan	1,088,268,500.00	1,065,113,390.00	97.87
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	15,200,000.00	15,136,000.00	99.58
				Rogram Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1,027,000,000.00	1,019,896,850.00	99.31
	22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**377,822,450.00**	**369,321,975.00**	**97.75**
			Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		**377,822,450.00**	**369,321,975.00**	**97.75**
				Program Pembinaan Perpustakaan	357,472,450.00	348,971,975.00	97.62
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	20,350,000.00	20,350,000.00	100.00
	23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**3,518,055,117.00**	**3,048,033,255.00**	**86.64**
			Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		**3,518,055,117.00**	**3,048,033,255.00**	**86.64**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,250,416,117.00	2,829,644,955.00	87.05
				Program Pengelolaan Arsip	251,254,100.00	203,016,900.00	80.80
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	16,384,900.00	15,371,400.00	93.81
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**57,609,163,590.00**	**52,949,388,520.98**	**91.91**
	24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**1,507,010,000.00**	**1,498,113,900.00**	**99.41**
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		**1,507,010,000.00**	**1,498,113,900.00**	**99.41**
				Program Pengelolaan Perikanan	1,283,000,000.00	1,280,435,000.00	99.80

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Budidaya			
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	44,230,000.00	38,397,500.00	86.81
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	179,780,000.00	179,281,400.00	99.72
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**7,000,777,050.00**	**6,666,419,853.00**	**95.22**
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	**7,000,777,050.00**	**6,666,419,853.00**	**95.22**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,624,591,200.00	5,327,202,403.00	94.71
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,138,101,850.00	1,108,546,850.00	97.40
	Program Pemasaran Pariwisata	213,620,700.00	206,215,200.00	96.53
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	24,463,300.00	24,455,400.00	99.97
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**33,796,206,000.00**	**31,886,720,804.00**	**94.35**
	Dinas Pertanian	**33,796,206,000.00**	**31,886,720,804.00**	**94.35**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,493,449,200.00	25,250,234,054.00	95.31
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	632,136,850.00	559,402,700.00	88.49
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,936,345,050.00	4,805,100,000.00	97.34
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	125,771,100.00	105,140,790.00	83.60
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	125,032,450.00	118,421,550.00	94.71
	Program Penyuluhan Pertanian	1,483,471,350.00	1,048,421,710.00	70.67
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**3,796,884,710.00**	**3,569,489,931.98**	**94.01**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**3,796,884,710.00**	**3,569,489,931.98**	**94.01**
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	45,722,000.00	23,804,500.00	52.06
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,391,058,060.00	3,222,711,559.98	95.04
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	56,399,900.00	38,445,350.00	68.17

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	203,710,000.00	188,482,090.00	92.52
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99,994,750.00	96,046,432.00	96.05
28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**11,385,385,830.00**	**9,207,447,032.00**	**80.87**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**11,385,385,830.00**	**9,207,447,032.00**	**80.87**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,801,075,580.00	8,803,805,776.00	81.51
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	463,510,950.00	301,162,256.00	64.97
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	51,544,300.00	39,273,000.00	76.19
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69,255,000.00	63,206,000.00	91.27
28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**122,900,000.00**	**121,197,000.00**	**98.61**
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	**122,900,000.00**	**121,197,000.00**	**98.61**
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	122,900,000.00	121,197,000.00	98.61
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**126,912,091,966.00**	**101,041,224,028.41**	**79.62**
1 SEKRETARIAT DAERAH	**20,156,269,480.00**	**13,971,853,860.61**	**69.32**
Sekretariat Daerah	**20,156,269,480.00**	**13,971,853,860.61**	**69.32**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,897,282,550.00	10,124,507,143.61	78.50
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3,800,599,930.00	1,977,880,967.00	52.04
Program Perekonomian dan Pembangunan	3,458,387,000.00	1,869,465,750.00	54.06
2 SEKRETARIAT DPRD	**65,882,847,581.00**	**54,230,663,991.00**	**82.31**
Sekretariat DPRD	**65,882,847,581.00**	**54,230,663,991.00**	**82.31**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,421,712,311.00	34,802,719,901.00	93.00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28,461,135,270.00	19,427,944,090.00	68.26
3 PERENCANAAN	**8,192,289,400.00**	**6,236,706,554.80**	**76.13**

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**8,192,289,400.00**	**6,236,706,554.80**	**76.13**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,395,868,750.00	4,714,490,484.80	73.71
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	426,370,700.00	340,032,528.00	79.75
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,370,049,950.00	1,182,183,542.00	86.29
4	**KEUANGAN**	**21,373,432,505.00**	**18,087,557,150.00**	**84.63**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**329,034,800.00**	**246,174,500.00**	**74.82**
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	329,034,800.00	246,174,500.00	74.82
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	**9,922,099,405.00**	**8,285,099,568.00**	**83.50**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,428,356,155.00	6,293,713,501.00	84.73
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,737,843,850.00	1,428,256,636.00	82.19
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	755,899,400.00	563,129,431.00	74.50
	Badan Pendapatan Daerah	**11,122,298,300.00**	**9,556,283,082.00**	**85.92**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,995,336,800.00	8,041,838,646.00	89.40
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,126,961,500.00	1,514,444,436.00	71.20
5	**KEPEGAWAIAN**	**7,810,836,000.00**	**6,153,106,140.00**	**78.78**
	Badan Kepegawaian Daerah	**7,810,836,000.00**	**6,153,106,140.00**	**78.78**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,421,178,000.00	4,678,566,787.00	86.30
	Program Kepegawaian Daerah	2,389,658,000.00	1,474,539,353.00	61.71
6	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**768,800,000.00**	**709,751,500.00**	**92.32**
	Badan Kepegawaian Daerah	**768,800,000.00**	**709,751,500.00**	**92.32**
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	768,800,000.00	709,751,500.00	92.32
7	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**2,727,617,000.00**	**1,651,584,832.00**	**60.55**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**2,727,617,000.00**	**1,651,584,832.00**	**60.55**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2,727,617,000.00	1,651,584,832.00	60.55
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**9,392,495,750.00**	**6,201,693,907.00**	**66.03**
1 INSPEKTORAT DAERAH	**9,392,495,750.00**	**6,201,693,907.00**	**66.03**
Inspektorat	**9,392,495,750.00**	**6,201,693,907.00**	**66.03**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,636,535,250.00	5,698,243,207.00	65.98
Program Penyelenggaraan Pengawasan	479,902,500.00	323,191,700.00	67.35
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	276,058,000.00	180,259,000.00	65.30
UNSUR KEWILAYAHAN	**72,152,827,690.00**	**58,121,660,003.00**	**80.55**
1 KECAMATAN	**72,152,827,690.00**	**58,121,660,003.00**	**80.55**
1 Kecamatan Bagor	**4,363,979,904.00**	**3,248,474,772.00**	**74.44**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,288,727,854.00	2,880,530,400.00	87.59
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116,078,450.00	114,127,872.00	98.32
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	808,760,400.00	104,492,300.00	12.92
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	141,611,250.00	140,863,900.00	99.47
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,925,100.00	1,809,900.00	94.02
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,876,850.00	6,650,400.00	96.71
2 Kecamatan Baron	**2,623,988,152.00**	**2,425,946,191.00**	**92.45**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,454,839,402.00	2,307,514,941.00	94.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49,619,050.00	48,366,000.00	97.47
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	109,809,700.00	64,882,750.00	59.09
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,750,000.00	2,250,000.00	33.33
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,970,000.00	2,932,500.00	98.74

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	3 Kecamatan Berbek	**2,729,768,750.00**	**2,453,466,238.00**	**89.88**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,588,341,800.00	2,322,662,490.00	89.74
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10,800,000.00	10,788,200.00	99.89
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	109,809,250.00	108,239,148.00	98.57
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,150,000.00	150,000.00	1.64
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	964,200.00	960,000.00	99.56
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,703,500.00	10,666,400.00	99.65
	4 Kecamatan Gondang	**2,220,852,402.00**	**2,001,250,801.00**	**90.11**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,026,622,402.00	1,876,663,751.00	92.60
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	44,188,100.00	41,806,800.00	94.61
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	122,327,250.00	64,067,500.00	52.37
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13,028,500.00	4,028,300.00	30.92
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,195,000.00	3,195,000.00	100.00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,491,150.00	11,489,450.00	99.99
	5 Kecamatan Jatikalen	**1,966,875,618.00**	**1,610,184,232.00**	**81.87**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,836,611,368.00	1,496,829,982.00	81.50
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	497,250.00	390,000.00	78.43
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	112,173,900.00	104,135,150.00	92.83
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7,548,900.00	1,474,500.00	19.53
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,562,500.00	860,000.00	33.56
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7,481,700.00	6,494,600.00	86.81
	6 Kecamatan Kertosono	**3,823,611,402.00**	**3,282,316,478.00**	**85.84**
	Program Penunjang Urusan	3,123,180,402.00	2,852,591,978.00	91.34

URAIAN					ANGGARAN	REALISASI	(%)
				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13,781,000.00	13,618,500.00	98.82
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	469,450,000.00	207,906,000.00	44.29
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,000,000.00	0.00	0.00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0.00	0.00	0.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	208,200,000.00	208,200,000.00	100.00
		7	**Kecamatan Lengkong**		**326,431,700.00**	**264,011,031.00**	**80.88**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160,154,600.00	135,598,605.00	84.67
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12,813,500.00	11,695,000.00	91.2709
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	126,606,100.00	103,812,626.00	82.00
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14,842,000.00	1,237,500.00	8.34
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,692,000.00	2,542,500.00	94.45
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,323,500.00	9,124,800.00	97.87
		8	**Kecamatan Loceret**		**2,879,060,400.00**	**2,482,452,600.00**	**86.2244**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,673,455,050.00	2,306,253,750.00	86.2649
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	47,427,500.00	46,363,150.00	97.76
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	108,132,850.00	80,810,200.00	74.73
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50,045,000.00	49,025,500.00	97.96
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0.00	0.00	0.00
		9	**Kecamatan Nganjuk**		**20,676,238,349.00**	**15,529,348,344.00**	**75.11**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,077,924,899.00	11,816,263,875.00	83.93
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	3,019,100.00	2,216,000.00	73.40

URAIAN					ANGGARAN	REALISASI	(%)
				Publik			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,640,832,500.00	1,894,786,744.00	40.83
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9,000,000.00	0.00	0.00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,950,000.00	1,650,000.00	55.93
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,942,511,850.00	1,814,431,725.00	93.41
		10	**Kecamatan Ngetos**		**1,770,488,150.00**	**1,295,686,746.00**	**73.18**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,607,336,150.00	1,196,490,246.00	74.44
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4,500,000.00	2,574,000.00	57.20
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	107,732,000.00	69,957,000.00	64.94
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,575,000.00	0.00	0.00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7,420,000.00	2,900,000.00	39.08
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32,925,000.00	23,765,500.00	72.18
		11	**Kecamatan Ngluyu**		**1,564,961,884.00**	**917,424,957.00**	**58.62**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,443,071,684.00	868,539,357.00	60.19
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,300,000.00	8,800,000.00	94.62
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110,340,200.00	38,325,600.00	34.73
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.00	0.00	0.00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,250,000.00	1,760,000.00	78.22
		12	**Kecamatan Ngronggot**		**3,070,953,560.00**	**2,810,531,752.00**	**91.52**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,896,533,860.00	2,705,136,402.00	93.39
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41,925,200.00	41,013,850.00	97.83
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	111,182,000.00	51,962,150.00	46.74

URAIAN					ANGGARAN	REALISASI	(%)
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,487,500.00	9,000,000.00	85.82
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4,662,500.00	0.00	0.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,162,500.00	3,419,350.00	55.49
		13	**Kecamatan Pace**		**2,814,703,508.00**	**2,328,879,099.00**	**82.74**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,649,849,808.00	2,203,983,899.00	83.17
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17,402,050.00	16,861,250.00	96.89
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	115,415,100.00	90,471,450.00	78.39
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14,585,050.00	900,000.00	6.17
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,550,000.00	2,100,000.00	82.35
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,901,500.00	14,562,500.00	97.73
		14	**Kecamatan Patianrowo**		**2,318,410,444.00**	**2,104,709,922.00**	**90.78**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,194,500,244.00	2,036,671,422.00	92.81
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5,254,550.00	3,709,000.00	70.59
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	111,395,150.00	62,349,500.00	55.97
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,625,000.00	1,100,000.00	19.56
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	660,500.00	0.00	0.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	975,000.00	880,000.00	90.26
		15	**Kecamatan Prambon**		**2,278,137,551.00**	**2,160,054,181.00**	**94.82**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,115,852,351.00	2,040,780,181.00	96.45
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	53,418,700.00	52,961,500.00	99.14
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	94,800,000.00	63,812,500.00	67.31
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	10,350,000.00	500,000.00	4.83

	URAIAN				ANGGARAN	REALISASI	(%)
				Umum			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,716,500.00	2,000,000.00	53.81
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00
		16	**Kecamatan Rejoso**		**2,801,056,990.00**	**2,216,797,275.00**	**79.14**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,641,885,990.00	2,086,616,245.00	78.98
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28,756,000.00	28,649,100.00	99.63
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	107,775,000.00	85,431,930.00	79.27
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,615,000.00	6,350,000.00	50.34
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,025,000.00	9,750,000.00	97.26
		17	**Kecamatan Sawahan**		**2,354,818,800.00**	**2,203,887,490.00**	**93.59**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,147,234,300.00	2,037,500,990.00	94.89
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72,403,000.00	71,438,000.00	98.67
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	114,464,000.00	74,231,000.00	64.85
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14,490,000.00	14,490,000.00	100.00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,227,500.00	6,227,500.00	100.00
		18	**Kecamatan Sukomoro**		**3,947,971,690.00**	**3,133,485,758.00**	**79.37**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,864,311,150.00	2,278,032,378.00	79.53
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	821,923,600.00	617,056,050.00	75.07
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16,580,150.00	5,900,150.00	35.59
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	245,156,790.00	232,497,180.00	94.84
		19	**Kecamatan Tanjunganom**		**5,635,148,565.00**	**3,893,874,173.00**	**69.10**
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,245,341,465.00	3,269,833,243.00	77.02
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	92,538,400.00	88,627,500.00	95.77

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Publ3ik			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,261,088,650.00	510,957,430.00	40.52
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15,338,400.00	6,130,500.00	39.97
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,527,600.00	7,768,500.00	91.10
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12,314,050.00	10,557,000.00	85.73
20	**Kecamatan Wilangan**	**1,985,369,871.00**	**1,758,877,963.00**	**88.59**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,842,487,271.00	1,633,777,013.00	88.67
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22,050,000.00	22,033,350.00	99.92
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	106,457,600.00	97,705,100.00	91.78
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9,825,000.00	825,000.00	8.40
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,850,000.00	3,850,000.00	100.00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	700,000.00	687,500.00	98.21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

Tabel 1.15
Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA		
		Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Daerah	822,156,519,955	745,978,989,273	84,174,592,030	80,873,127,038					906,331,111,985	826,852,116,311	91.23
2	Dinas Kesehatan Daerah	252,268,127,948	164,387,909,234	71,017,757,223	32,008,764,107					323,285,885,171	196,396,673,341	60.75
3	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	172,619,338,453	151,363,248,531	57,230,566,250	51,952,750,261					229,849,904,703	203,315,998,792	88.46
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	109,707,652,207	90,033,241,950	19,397,600,000	11,960,256,605					129,105,252,207	101,993,498,555	79.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	69,554,507,988	63,628,732,826	134,867,636,613	121,249,889,847					204,422,144,601	184,878,622,674	90.44
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah	19,983,213,560	18,254,236,076	51,463,553,080	41,724,487,077					71,446,766,640	59,978,723,153	83.95
7	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	11,200,581,360	9,817,596,389	187,124,496	179,975,000					11,387,705,856	9,997,571,389	87.79
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah	5,013,932,930	4,163,103,522	38,958,334	38,958,334					5,052,891,264	4,202,061,856	83.16
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	12,917,754,900	12,704,416,929	944,000	720,000					12,918,698,900	12,705,136,929	98.35
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Daerah	8,207,857,050	7,884,079,901	0	0					8,207,857,050	7,884,079,901	96.06
`	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Daerah	6,015,114,700	5,553,349,321	0	0					6,015,114,700	5,553,349,321	92.32
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	19,023,641,750	17,198,220,257	2,453,251,700	2,422,715,418					21,476,893,450	19,620,935,674	91.36
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	7,157,151,470	5,131,195,019	266,754,200	254,850,000					7,423,905,670	5,386,045,019	72.55

No.	SKPD	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA		
		Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	9,589,735,846	7,489,725,879	76,000,000	62,718,750					9,665,735,846	7,552,444,629	78.14
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	16,404,288,700	13,084,903,763	761,225,600	629,829,892					17,165,514,300	13,714,733,655	79.90
16	Dinas Perhubungan Daerah	27,938,015,434	26,052,533,373	2,064,033,334	1,977,868,511					30,002,048,768	28,030,401,884	93.43
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	8,361,190,886	6,961,202,500	1,569,477,606	889,484,292					9,930,668,492	7,850,686,792	79.05
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4,870,886,950	4,079,824,728	15,572,650	15,543,630					4,886,459,600	4,095,368,358	83.81
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3,882,927,567	3,404,406,455	12,950,000	12,948,775					3,895,877,567	3,417,355,230	87.72
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Daerah	11,043,945,350	9,181,158,882	135,300,350	127,269,700	398,476,800	92,384,600			11,577,722,500	9,400,813,182	81.20
21	Dinas Pertanian Daerah	31,701,450,050	29,587,790,404	2,378,064,850	2,298,930,400					34,079,514,900	31,886,720,804	93.57
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah	15,098,617,350	12,711,901,704	0	0					15,098,617,350	12,711,901,704	84.19
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	0					0	0	-
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0					0	0	-
25	Sekretariat Daerah	48,953,003,152	39,801,423,195	1,963,873,600	1,474,802,240					50,916,876,752	41,276,225,435	81.07
26	Sekretariat DPRD	65,713,875,446	54,088,523,291	168,972,135	142,140,700					65,882,847,581	54,230,663,991	82.31
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,245,636,900	4,890,161,309	29,399,000	28,955,000					6,275,035,900	4,919,116,309	78.39
28	Kecamatan Bagor	4,229,157,204	3,249,554,772	134,822,700	16,142,000					4,363,979,904	3,265,696,772	74.83
29	Kecamatan Baron	2,623,988,152	2,425,946,191	0	0					2,623,988,152	2,425,946,191	92.45

No.	SKPD	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA		
		Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	%
30	Kecamatan Berbek	2,720,709,750	2,444,413,238	9,059,000	9,053,000					2,729,768,750	2,453,466,238	89.88
31	Kecamatan Gondang	2,196,978,702	1,984,627,101	23,873,700	16,623,700					2,220,852,402	2,001,250,801	90.11
32	Kecamatan Jatikalen	1,966,075,618	1,609,384,232	800,000	800,000					1,966,875,618	1,610,184,232	81.87
33	Kecamatan Kertosono	3,693,212,402	3,181,517,478	130,399,000	100,799,000					3,823,611,402	3,282,316,478	85.84
34	Kecamatan Lengkong	2,278,581,700	1,986,057,414	0	0					2,278,581,700	1,986,057,414	87.16
35	Kecamatan Loceret	2,818,156,600	2,421,995,100	60,903,800	60,457,500					2,879,060,400	2,482,452,600	86.22
36	Kecamatan Nganjuk	19,950,023,399	14,885,212,724	726,214,950	653,910,620					20,676,238,349	15,539,123,344	75.15
37	Kecamatan Ngetos	1,762,738,150	1,290,686,746	7,750,000	5,000,000					1,770,488,150	1,295,686,746	73.18
38	Kecamatan Ngluyu	1,560,832,134	917,424,957	4,129,750	0					1,564,961,884	917,424,957	58.62
39	Kecamatan Ngronggot	3,063,699,160	2,807,811,752	7,254,400	2,720,000					3,070,953,560	2,810,531,752	91.52
40	Kecamatan Pace	2,803,697,908	2,326,604,099	11,005,600	2,275,000					2,814,703,508	2,328,879,099	82.74
41	Kecamatan Patianrowo	2,317,210,444	2,103,509,922	1,200,000	1,200,000					2,318,410,444	2,104,709,922	90.78
42	Kecamatan Prambon	2,278,711,451	2,153,729,181	15,611,100	5,825,000					2,294,322,551	2,159,554,181	94.13
43	Kecamatan Rejoso	2,768,342,690	2,188,883,475	32,714,300	27,913,800					2,801,056,990	2,216,797,275	79.14
44	Kecamatan Sawahan	2,323,995,800	2,203,887,490	30,823,000	0					2,354,818,800	2,203,887,490	93.59
45	Kecamatan Sukomoro	3,825,554,090	3,037,189,708	122,417,600	96,296,050					3,947,971,690	3,133,485,758	79.37
46	Kecamatan Tanjunganom	5,506,839,251	3,887,594,173	128,309,314	6,280,000					5,635,148,565	3,893,874,173	69.10
47	Kecamatan Wilangan	1,973,019,871	1,753,667,963	12,350,000	5,210,000					1,985,369,871	1,758,877,963	88.59
48	Inspektorat Daerah	9,185,003,850	6,189,274,057	207,491,900	199,528,500					9,392,495,750	6,388,802,557	68.02
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,368,016,250	8,246,347,587	5,731,950	0					11,373,748,200	8,246,347,587	72.50

No.	SKPD	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA TAK TERDUGA		JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA		
		Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan Perbup 5	Realisasi	%
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9,777,699,905	8,145,509,646	144,399,500	139,589,922					9,922,099,405	8,285,099,568	83.50
51	Badan Pendapatan Daerah	11,122,298,300	9,556,283,082	0	0					11,122,298,300	9,556,283,082	85.92
52	PPKD	0	0	0	0	412,863,003,769	412,863,003,769	46,191,517,029	25,420,769,197	459,054,520,798	438,283,772,966	95.48
53	Badan Kepegawaian Daerah	8,579,636,000	6,861,600,218	0	0					8,579,636,000	6,861,600,218	79.98

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan strategis di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Rakyat

a) Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan kondisi yang mencerminkan belum terwujudnya kesejahteraan rakyat pada aspek ekonomi. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 13,14% menjadi 11,98% pada tahun 2017, namun kondisi eksisting Kabupaten Nganjuk pada angka 11,85% di tahun 2021 menunjukkan kesenjangan yang harus dituntaskan.

b) Belum optimalnya intensifikasi dan extensifikasi lahan dan diversifikasi produksi pertanian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang diukur dari pertumbuhan/perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang cenderung stagnan pada angka 5%, dengan sektor unggulan pertanian yang meskipun produksinya meningkat namun pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2021 adalah sebesar 2,35%. Sebagai daerah yang mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian, maka sektor pertanian membutuhkan prioritas penyelesaian masalah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

c) Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif

Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro dan koperasi yang dapat diatasi dengan cara meningkatkan keterpaduan program pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

d) Belum optimalnya penanganan ketahanan pangan

Ketahanan pangan masih menjadi tantangan di Kabupaten Nganjuk. Ketahanan pangan suatu daerah diindikasikan antara lain dalam bentuk ketersediaan pangan dan akses pangan. Dalam hal ketersediaan pangan, salah satu penyebab penurunannya adalah karena makin berkurangnya lahan produktif dan kondisi pandemi Covid-19.

e) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni budaya dan kepariwisataan daerah dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah

Kabupaten Nganjuk memiliki kekayaan seni, budaya, dan potensi pariwisata, namun pengembangannya belum optimal. Penyebab utama permasalahan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata adalah :

- Kurangnya momentum kegiatan yang dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan kreativitas seni, budaya, dan pariwisata;
- Seniman Nganjuk yang banyak jumlahnya dan berkemampuan tinggi namun belum dioptimalkan perannya; serta
- Belum adanya keterpaduan antara desa, daerah, lembaga swasta dalam pengembangan seni, budaya, dan pariwisata.

f) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi serta penerapan literasi di Kabupaten Nganjuk

Pendidikan merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nganjuk, terutama berkaitan dengan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PAUD yang kurang dari 100% karena masih adanya angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan tingkat kualifikasi guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Penyebab utama permasalahan pendidikan adalah belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang, serta manajemen pelayanan pendidikan yang belum optimal.

g) Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Nilai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk yang di dalamnya memuat indikator kesehatan, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar 69,98 dan pada tahun 2021 sebesar 71,92. Hal ini mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Meskipun demikian, untuk mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, masih terdapat permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan antara lain: angka kematian bayi, angka kematian ibu, balita gizi buruk, penyakit HIV dan TBC.

h) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak

Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada aspek kesejahteraan sosial. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nganjuk tahun 2011 sebesar 91,69 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 93,26 yang artinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. Namun demikian, permasalahan utama yang terjadi adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam jabatan publik (DPRD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa) masih kurang. Ini menjadi masalah krusial, sebab dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki serta meningkatnya kesadaran mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial, akan menimbulkan permasalahan perempuan yang perlu mendapatkan penyelesaian.

Kondisi ini, menimbulkan tuntutan kebutuhan pemenuhan hak anak antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak-hak anak lainnya.

i) Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, baik olah raga prestasi, olah raga rekreasi (tradisional) masyarakat dan olah raga sekolah

Sebagai bagian dari wujud kesejahteraan rakyat, perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk masih perlu ditingkatkan. Penyebab permasalahan ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga, kurangnya sarana prasarana penunjang olah raga, dan terbatasnya sumber daya manusia tenaga

pelatih yang berkualitas.

2. Permasalahan Daya Saing Daerah

a) Belum optimalnya penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, konektivitas antar wilayah dan fasilitas umum lainnya.

Fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai salah satu aspek daya saing daerah merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang lengkap dan berkualitas akan mampu mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Nganjuk serta mendukung pelayanan publik. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian pembangunan infrastruktur menunjukkan perkembangan yang cenderung stagnan. Pada tahun 2021 jaringan jalan dalam kondisi mantap fungsional 87,07%. Banyaknya kegiatan proyek nasional dengan aktivitas pengangkutan material berat mengakibatkan kondisi jalan banyak yang rusak. Di sisi lain, kemampuan anggaran untuk pendanaan infrastruktur masih terbatas.

b) Belum optimalnya pemenuhan air bersih masyarakat di daerah rawan kekeringan dan sanitasi lingkungan.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu aspek daya saing daerah. Namun yang menjadi masalah adalah penyediaan air bersih belum merata di semua wilayah. Selain itu, akses air minum penduduk sebagian besar menggunakan sumur gali sebagai sumber air baku, sedangkan kemampuan PDAM Kabupaten untuk mensuplai air bersih masih terbatas.

c) Belum optimalnya strategi pemanfaatan ruang dan penciptaan kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan strategis selingkar wilis (tunggal rogo mandiri) serta pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non hayati termasuk pengembangan potensi MIGAS) yang berwawasan lingkungan

d) Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industri serta pengembangan kawasan industri

Iklim investasi merupakan bagian dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi tingkat investasi. Investasi merupakan salah satu

indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Lama proses perijinan di Kabupaten Nganjuk yakni 1-2 hari untuk izin mendirikan bangunan, 1-4 hari untuk surat ijin usaha perdagangan dan ijin reklame, dan 5-7 hari untuk tanda daftar perusahaan, ijin usaha industri, tanda daftar industri, ijin usaha kawasan industri.

e) Kurangnya akselerasi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan elektronik *government* menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*)

Masih terdapat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk yang bisa dilihat dari adanya kesenjangan kinerja urusan penunjang pemerintahan daerah antara lain perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, fungsi pengawasan, dan fungsi penyusunan kebijakan daerah.

Pada aspek perencanaan, masih kurang konsisten perencanaan program antara RPJMD dan RKPD, belum optimal capaian target sasaran RPJMD, dan efektivitas tindak lanjut hasil musrenbang. Penyebab utama dari belum optimalnya perencanaan daerah adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya ASN perencana pada perangkat daerah, manajemen data pembangunan yang belum optimal, serta regulasi dan standar operasional prosedur mengenai perencanaan yang perlu diperbarui.

Pada aspek pengelolaan keuangan, masih terdapat permasalahan terutama ketergantungan pendapatan daerah pada dana perimbangan meskipun kontribusi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Padahal pajak daerah berpotensi naik seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk. Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya kualitas data potensi pendapatan daerah, kurangnya sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Pada aspek kepegawaian, permasalahan utama adalah kurangnya kompetensi dan kapasitas pegawai yang tercermin dari persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural baru mencapai 43,93% pada tahun 2021. Penyebab utama permasalahan adalah menurunnya jumlah aparatur sipil negara dan belum optimalnya penerapan penempatan jabatan sesuai kompetensi.

f) Belum optimalnya koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penciptaan stabilisasi ketentraman, ketertiban, kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat.

Penanganan kebencanaan serta penciptaan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari pelayanan urusan dasar wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah. Kabupaten Nganjuk tergolong daerah kategori tinggi rawan bencana dengan skor Indeks Resiko Bencana sebesar 152,8. Penyebab utama permasalahan adalah belum tersusunnya strategi pengurangan resiko bencana, kurang optimalnya koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana serta kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terbatas.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuannya adalah agar dapat diwujudkan gambaran masa depan yang diinginkan untuk setiap tahapan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta masa depan 5 tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat terwujud tujuan pembangunan daerah. Visi yang ingin dicapai dalam masa 5 tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Nganjuk, adalah: "***NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA".*** Pencapaian visi ini ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai; dan
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Fokus pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 lebih diarahkan pada penguatan capaian hasil yang telah dicapai dengan menitikberatkan pada program (sebagaimana dalam uraian Tabel 1.14) yang berkaitan dengan :

1. Penciptaan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kerukunan melalui apresiasi seni, budaya, keolahragaan yang berlandaskan gotong royong serta kearifan lokal di masyarakat;
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima berlandaskan keimanan yang ber-Ketuhanan YME;
3. Peningkatan daya saing produk sektor unggulan Daerah Kabupaten Nganjuk melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, peningkatan mutu dan perlindungan produk lokal daerah;
4. Peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan;
5. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan investasi, pembinaan ekonomi kerakyatan dan perluasan kesempatan berusaha serta daya saing industri; dan
6. Percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dari keenam fokus pembangunan tersebut perlu dikembangkan tema pembangunan tahunan dalam setiap penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Untuk rincian kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, dapat dilihat pada BAB IV tentang Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, RAPBN Tahun 2021, dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Dengan tema ***"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Pembangunan Kemandirian Ekonomi yang Meliputi UMKM, Koperasi, Pertanian Terpadu dan Pariwisata yang didukung Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia"*** yang selanjutnya diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2021. Rumusan prioritas dan strategi pembangunan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
4. Penanganan permasalahan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan mutu pendidikan; dan
6. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,72	71,97	0,35
2	Angka Kemiskinan	11,62	11,85	1,98
3	Angka Pengangguran	4,80	4,98	3,75
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,71	3,61	311,11
5	Pendapatan Per Kapita	26.601,16	28.053,33	5,46
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,34	0,31	- 8,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks pembangunan manusia daerah yang bersangkutan.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
5. Pendapatan per kapita adalah persentase kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan.
6. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* adalah *gini ratio* daerah yang bersangkutan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2.2
Tabel Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	PENDIDIKAN	1. Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	Sudah cukup jelas	394 Lembaga	
		2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Sda.	29.786 Anak	
		3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	29.786 Anak	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Sda.	2.097 Orang	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD	Sda.	2.837 Orang	
		6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sda.	2.256 Orang	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau	Sda.	749 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang			
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	Sda.	628 Lembaga	
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Sda.	96.583 Siswa	
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda.	51.228 Siswa	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	96.583 Siswa	
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	51.228 Siswa	
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sda.	3.449 Orang	
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	1.601 Orang	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sda.	7.096 Orang	
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	3.668 Orang	
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sda.	726 Orang	
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	167 Orang	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sda.	662 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda.	239 Orang	
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda.	6.988 Orang	
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda.	3.668 Orang	
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda.	662 Orang	
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda.	238 Orang	
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sda.	650 Orang	
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sda.	529 Orang	
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Sda.	7 Lembaga	
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda.	1.546 Siswa	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda.	1.546 Siswa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda.	55 Orang	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda.	174 Orang	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sda.	132 Orang	
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda.	662 Orang	
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sda.	14 Orang	
2	KESEHATAN	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	5 Rumah Sakit	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sda	5 Rumah Sakit	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan.	Dukungan logistik seperti: - Vaksin Tetasus Difetri (Td) - Tablet Tambah Darah - Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin - Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu - Buku KIA, dll	52.135	
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sudah cukup jelas	738 Orang	
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	Dukungan logistik seperti: - Formulir Photograf - Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu - Buku KIA, dll	36.802	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sudah cukup jelas	738 Orang	
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Dukungan logistik seperti: - Vaksin Hepatitis BO - Vitamin K1 Injeksi - Salep/Tetes Mata Antibiotik - Formulir Bayi Baru Lahir - Formulir MTBM - Buku KIA , dll	82.721	
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar bagi bayi baru lahir	Sudah cukup jelas	738 Orang	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku - Formulir DDTK - Vitamin A Biru , Vitamin A Merah - Vaksin Imunisasi Dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT-HB-Hib, Campak Rubell - Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT-HB-Hib, Campak Rubella - Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA, dll	197.811	
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sudah cukup jelas	738 Orang	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Buku Raport Kesehatanku - Buku Pemantauan Kesehatan - Kuesioner Skrining Kesehatan - Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah - Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, dll	136.237	
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sudah cukup jelas	738 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Pedoman dan Media KIE: Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), dll	1.327.400	
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan bagi orang usia 15-59 tahun sesuai standar	Sudah cukup jelas	775 Orang	
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Strip Uji Pemeriksaan: Gula Darah, Kolesterol - Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) - Buku Kesehatan Lansia, dll	132.232	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan bagi orang usia 60 tahun sesuai standar	Sudah cukup jelas	738 Orang	
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE - Tensimeter - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM, dll	758.826	
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita hipertensi sesuai standar	Sudah cukup jelas	775 Orang	
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dukungan logistik seperti : - Glukometer: Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM - Pedoman dan Media KIE, dll	65.748	
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita DM sesuai standar	Sudah cukup jelas	775 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dukungan logistik seperti: - Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) - Kit Berisi 2 Alat Fiksasi - Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan Media KIE, dll	5.667	
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	Sudah cukup jelas	120 Orang	
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dukungan logistik seperti: - Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) - Reagen Zn TB - Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 - Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering - Catridge Tes Cepat Molekuler - Formulir Pencatatan dan Pelaporan Pedoman/Standar Operasional Prosedur, dll	7.032	
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	Sudah cukup jelas	70 Orang	
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dukungan logistik seperti: - Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner - Tes Cepat HIV (RDT) Pertama - Bahan Medis Habis Pakai: Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai, Alat tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK - Lainnya...	36.878	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Sudah cukup jelas	145 Orang	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Sudah cukup jelas	54.030 ha	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)	Sda	95.000 m	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Sda	8,234936 ha	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	Sda	2,2892 ha	
		5. Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten	Ada/tidak	Ada	
		6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	Ada/tidak	Ada	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	Jumlah	Tanggul sungai sepanjang 125 m	
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	Nihil	
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	$\frac{11.484{,}88 \text{ ha}}{14.951 \text{ ha}} \times 100\% = 76{,}817\ \%$	
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten (Ada /Tidak)	Ada/tidak	Ada	
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada/tidak	Ada	
		13. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada/tidak	1 BUMD PDAM	
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	85 (1 PDAM dan 84 KPSPAM)	
		15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Sda	4 Kerjasama	
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sda	216.045 Unit	
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sda	92.391 Unit	
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sda	308.436 Unit	
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sudah cukup jelas	Nihil	
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Sda	Nihil	
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sda	308.436 Unit	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\text{Σ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\text{Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	$\frac{216.045}{325.293} \times 100\%$ = 66,41 %	
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\text{Σ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	$\frac{0}{325.293} \times 100\%$ = 0 %	
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\text{Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD-T}} \times 100\%$	$\frac{92.391}{325.293} \times 100\%$ = 28,40 %	
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\text{Σ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\text{Σ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	Nihil	
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\text{Σ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{Σ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\text{Σ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\text{Σ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\text{Σ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\text{Σ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	Nihil	
		30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	$\frac{85}{96} \times 100\%$ = 88,54 %	
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas	35 IMB	
		32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada/tidak	Ada Perda Nomor 3 Tahun 2017	
		33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada/tidak	Nihil	
		34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	201 Gedung	
		35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Sda	201 Gedung	
		36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	Sda	201 Gedung	
		37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten yang dipelihara/dirawat	Sda	201 Gedung	
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten	Sudah cukup jelas	1.153,482 km	
		39. Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	39.711,9 m	
		40. Panjang jembatan yang dibangun	Sda	78 m	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sda	23.600,1 m	
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sda	18 m	
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi / direhabilitasi	Sda	23.600,1 m	
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sda	61 m	
		45. Panjang jalan yang dipelihara	Sda	1.004,358 km	
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	Sda	27,4 m	
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten	Sda	1 Pelatihan (61 Peserta)	
		48. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten	Sda	61 orang	
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten	Sda	27 orang	
		50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	Ada SIPJAKI	
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	Sda	Ada SIPJAKI	
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Sda	Ada SIPJAKI	
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sda	Ada SIPJAKI	
		54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa	Sda	Ada SIPJAKI	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten	Sda	Ada	
		56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yangdiregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Sda	Ada 1 Kegiatan	
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Sda	Ada	
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah Kabupaten	Sda	Ada	
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	Sda	Ada	
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sda	Ada	
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten	Sda	66	
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	Sda	40	
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sda	Nihil	
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	PERUMAHAN RAKYAT	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah Cukup jelas	Nihil	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sda	106 unit	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sda	112	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sda	58 Unit	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sda	58 Unit	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sda	Nihil	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sda	48 Unit	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sda	112	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sda	5 Ha	
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	58	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	Nihil	
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	54 KK	
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah	Sda	58	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sda	54	
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Sda	5 Ha	
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sda	131,2 Ha	
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sda	293.265 Unit	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Sda	21,4 Ha	
		19. Jumlah rumah di Kabupaten	Sda	325.293 Unit	
		20. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sda	293.265 Unit	
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	Sda	43.532 Unit	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sda	Nihil	
		23. Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$	$\frac{310.959}{325.305}$ = 0,956	
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	Sda	1.988 Unit	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	10 Perumahan (1.395 Unit)	
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sda	10 Perumahan (1.395 Unit)	
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sda	10 Perumahan (1.395 Unit)	
		28. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	Sda	10 Perumahan (1.395 Unit)	
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sda	10 Perumahan (1.395 Unit)	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sda	Nihil	
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sda	8	
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sda	8	
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sda	8	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	Sudah cukup jelas	29	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sda	62	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sda	8	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sda	1	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/tidak	Ada (10 SOP)	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Sda	11 Kendaraan Operasional	
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\ \%$	
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\ \%$	
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\ \%$	
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\ \%$	
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{360}{360} \times 100\% = 100\ \%$	
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	$\frac{1.103.902}{1.103.902} \times 100\% = 100\ \%$	
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Nihil	
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	Nihil	
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$	
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	$\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$	
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	$\frac{948}{948} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten	Sudah cukup jelas	3 Jenis Layanan	
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak	Nihil	
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/tidak	Nihil	
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	Nihil	
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar	15 Jenis	
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	14 Orang	
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah cukup jelas	Nihil	
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	14 Orang	
6	SOSIAL	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	3 Layanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sda	79 Orang	
		3. Jumlah TimReaksi Cepat yang dibentuk	Sda	1 Tim (10 Anggota)	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sda	79 Orang	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sda	4 Kendaraan	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sda	30 Orang	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sda	1 Rumah Singgah	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sda	Nihil	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sda	19 Alat Bantu Per Orang	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sda	1 (Kursi Roda)	
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sda	25 Jenis Obat Kesehatan	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sda	17 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sda	1 Nakes	
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Sda	53 Pekerja	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sda	17 Orang	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sda	Nihil	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sda	2 Orang	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sda	2 Orang	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Sda	13 Orang	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sda	11 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sda	2 Orang	
		22. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sudah cukup jelas	150 Orang	
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sda	Nihil	
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sda	2 Tenda	
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sda	1.500 Paket	
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/tidak	Nihil	
		27. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Sda	53 Pekerja	
7	TENAGA KERJA	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada	
		2. Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% $\frac{\text{Realisasi indikator - target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	$\frac{4{,}98 - 4{,}64}{4{,}98} \times 100\%$ = 6,83%	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	15 Perusahaan	
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\%$	Data dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\ \%$	
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{6}{335} \times 100\% = 1{,}79\ \%$	
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{5}{25} \times 100\% = 20\ \%$	
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{55}{55} \times 100\% = 100\ \%$	
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	Sudah cukup jelas	295 Orang	
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{295}{295} \times 100\% = 100\ \%$	
		11. Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{169}{169} \times 100\% = 100\ \%$	
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{592}{867} \times 100\% = 68{,}28\%$	
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah CPMI dilatih}}{\text{Jumlah CPMI terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{91}{91} \times 100\% = 100\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah cukup jelas	90 Orang	
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{14}{159} \times 100\% = 8{,}97\ \%$	
		16. Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja)	Data dalam proses	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	$\frac{28}{171} \times 100\% = 16\ \%$	
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$	$\frac{5}{10} \times 100\% = 50\ \%$	
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah cukup jelas	Data dalam proses	
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	$\frac{10}{28} \times 100\% = 36\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	$\frac{172}{367} \times 100\% = 46{,}87\ \%$	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{4}{367} \times 100\% = 1{,}09\ \%$	
		23. Jumlah mogok kerja	Sudah cukup jelas	Nihil	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Sda	Nihil	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	Sda	Nihil	
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sda	Nihil	
		27. Jumlah perselisihan PHK	Sda	2 Perselisihan	
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sda	7 Orang	
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sda	2 Perundingan	
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten yang diberdayakan	Ada/tidak	Data dalam proses	
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	$\frac{1}{2} \times 100\% = 50\ \%$	
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten	Sudah cukup jelas	Data dalam proses	
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten	Sda	4.593 Orang	
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten	Sda	20	
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten	Sda	Data dalam proses	
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten	Sda	Data dalam proses	
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	Sda	91 Perjanjian	
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sda	91 Tenaga Kerja	
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\text{Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\text{Jumlah CPMI/CTKI}} \times 100\%$	$\frac{75}{75} \times 100\% = 100\ \%$	
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas	91 Orang	
		42. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi PMI/TKI yang dipulangkan}}{\text{Jumlah PMI/TKI yang pulang}} \times 100\%$	$\frac{185}{185} \times 100\% = 100\ \%$	
		43. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\text{Jumlah PMI/TKI}} \times 100\%$	$\frac{90}{90} \times 100\% = 100\ \%$	
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	Nihil	
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	$\frac{\text{Jumlah LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	Nihil	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	117 Lembaga	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten	Sda	46 Program	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sda	4 Media Massa	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sda	3 Lembaga	
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	5 Lembaga	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten)	Sudah cukup jelas	4 Lembaga	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	32 Organisasi	
		9. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten yang sudah dilatih	Sda	Nihil	
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sda	Nihil	
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten	Sda	4 Lembaga	
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sda	8 Kebijakan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	Sda	2 lembaga	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	
9	PANGAN	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Nihil	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Nihil	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Nihil	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	
10.	PERTANAHAN	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	
		3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Obyek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	Nihil	
		4. Dokumen izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Nihil	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Hasil perhitungan Kabupaten terhadap: a.Indeks Kualitas Air (IKA) b.Indeks Kualitas Udara (IKU) c.Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai relatif = $\frac{Ci}{Lij}$ $:IP=\frac{\sqrt{(\frac{Ci}{Lij})^2 \text{ rata-rata}+(\frac{Ci}{Lij})^2 \text{ maksimum}}}{2}$	61,59	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Rumus Metode IP : 0≤PIj ≤1,0 →baik(memenuhi baku mutu) 1,0 < *PIj* ≤5,0 →cemar ringan 5,0 < *PIj* ≤5,0 →cemar sedang Pij > 10.0 →cemar berat **IKTL = 100 – ((84,3 – (TH x 100)) x 50/54,3)** IKU 100 – [50/0.9 x (leu – 0,1)] Dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan		
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	Ada	
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}}$ x 100%	Nihil	
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten}}$ x 100%	Nihil	
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}}$ x 100%	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun		
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	Nihil	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$	$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	
		8. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{66}{66} \times 100\% = 100\%$	
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	$\frac{66}{66} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun}}{\text{2 tahun}}$ x 100%	$\frac{5}{5}$ x 100% = 100%	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	17 desa	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sda	17-17 = 0	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sda	LKD = 194 LAD = 156	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sda	Nihil	
		5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sda	17	
		6. Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sda	17-17 = 0	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sda	LKD = 194 LAD = 156	
		8. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lemabag adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sda	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Ada	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	$\frac{204.807}{24}$ = 8533,63	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFRi = $\frac{b_i}{{}_P\overline{I_i}}$ x k ASFI adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	$\frac{13.395}{268.231}$ x 1.000 = 49,94%	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}}$ x 100%	$\frac{521.162}{452.944}$ x 100% = 115,06%	
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	254 tokoh	
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}}$ x 100%	$\frac{38}{38}$ x 100% = 100%	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}}$ x 100%	$\frac{144.924}{184.713}$ x 100% = 78,46%	
		8. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	49 Kampung Keluarga Berkualitas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	$\frac{2.232}{13.395} \times 100\%$ = 16,66%	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	Kecamatan Tanjunganom (72,73%)	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	$\frac{63.839}{501.370} \times 100\%$ = 12,73%	
15	PERHUBUNGAN	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang Angkutan Jalan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\%$ = 100%	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	$\frac{1.392}{1.398} \times 100\%$ = 99,57%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Nihil	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{4}{14} \times 100\%$ = 28,57%	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{50}{50} \times 100\%$ = 100%	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daearah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo}}{\text{Jumlah perangkat desa}} \times 100\%$ Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	$\frac{50}{50} \times 100\%$ = 100%	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pad Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{49}{49} \times 100\% = 100\%$	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{19}{49} \times 100\% = 38{,}77\%$	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$	
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	$\frac{84}{84} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	$\frac{84}{84} \times 100\% = 100\%$	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	$\frac{19}{50} \times 100\% = 38\%$	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{19}{50} \times 100\% = 38\%$	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{20}{50} \times 100\% = 40\%$	
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$	$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 1$	$\frac{13}{50} \times 100\% = 26\%$	
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 10$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak Ada) 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:	Ada	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	$\frac{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{Mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten}} \times 10$ Komunitas masyarakat/ mitra strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	$\frac{81}{81} \times 100\%$ = 100%	
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kotasesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan Kabupaten dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi}} \times 100$	$\frac{286}{286} \times 100\%$ = 100 %	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\sum \text{Diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	$\frac{3.829}{3.829} \times 100\%$ = 100 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
17	KOPERASI UKM	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penebitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	$\frac{10}{144} \times 100\%$ = 6,94 %	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan jumlah permohonan izin pembukaan}}{\text{Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100$	$\frac{2}{2} \times 100\%$ = 100 %	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{143}{887} \times 100\%$ = 16,12 %	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	$\frac{90}{553} \times 100\%$ = 16,27 %	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{200}{887} \times 100\%$ = 22,55 %	
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan koperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{200}{76.027} \times 100\%$ = 0,26 %	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{99}{887} \times 100\%$ = 11,16 %	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	Nihil	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{284}{887} \times 100\% = 32{,}02\ \%$	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{344}{887} \times 100\% = 38{,}78\ \%$	
		11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	Nihil	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{221}{887} \times 100\% = 24{,}9\ \%$	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	Nihil	
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	$\frac{6.151}{118.000} \times 100\% = 5{,}21\ \%$	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem *online data system* (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	Nihil	
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usah mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{87}{118.000} \times 100\% = 0{,}073\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	$\frac{1.600}{118.000} \times 100\% = 1,35\ \%$	
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitassi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha yang belum mendapakan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	$\frac{87}{118.000} \times 100\% = 0,073\ \%$	
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{165}{118.000} \times 100\% = 0,14\ \%$	
		20. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	$\frac{21}{118.000} \times 100\% = 0,018\ \%$	
18	PENANAMAN MODAL	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Nihil	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Nihil	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Nihil	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Nihil	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Ada	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	15 orang	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	3.585 Penerbitan	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Rp 3.305.345.722.393	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	11 Orang	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	16	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Kabupaten	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	6 Permintaan	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	200 Orang	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	2 Orang	
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	30 Orang	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	35 Orang	
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan. Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis	109 Orang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga		
		6. Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	
20	STATISTIK	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Nihil	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	Dilakukan 2 kali	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	19 Sektoral	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Nihil	
		5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Nihil	
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$	
21	PERSANDIAN	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain. Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan	$\frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis. Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan		
		2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMK1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}}$ x 100% Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e procurement, e persuratan, simda dll Aplikasi keamanan lektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	$\frac{88}{88}$ x 100% = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko katergori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah di audit dengan reriko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	$\frac{61}{88} \times 100\%$ = 69,32%	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup terntu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	
22	KEBUDAYAAN	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	246 Obyek	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	257 Obyek	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan	Jumlah objek dimanfaatkan	2 Obyek	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	40 Desa, 16 Lembaga Adat	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian penetapan, pencatatan, pemeringkatan,penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	1 Cagar Budaya	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	19 Cagar Budaya	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Nihil	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	156 Cagar Budaya	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	19 Cagar Budaya	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	305 Koleksi	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	24.024 Pengunjung	
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Kabupaten	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	6 Komunitas	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Nihil	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Nihil	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	27 SDM	
		17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan pemuseuman Kabupaten	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	5 SDM	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB +Museum)	19 Cagar Budaya	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7 Kegiatan	
23	PERPUSTAKAAN	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	$\frac{11.564.478}{768.168} \times 100\% = 1.505\%$ (Jumlah penduduk usia 15-64 tahun)	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 1($	$\frac{1.026.860}{768.168} \times 100\% = 133,68\%$ (Jumlah penduduk usia 15-64 tahun)	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	$\frac{1.031}{768.168} \times 100\% = 0,13\%$ (Jumlah penduduk usia 15-64 tahun)	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$	$\frac{8}{1.145} \times 100\% = 0,69\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.		
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1.026.860	
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Nihil	
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	Nihil	
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayah (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item). Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	21 Koleksi Budaya	
24	KEARSIPAN	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$	$\frac{513}{513} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal intansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier. Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan	$\frac{20.085}{20.085} \times 100\% = 100\%$	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$ Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP	$\frac{623}{623} \times 100\ \%$ $= 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012		
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kabupaten}} \times 100\%$ Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	$\frac{623}{623} \times 100\ \%$ = 100%	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	327 Berkas	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Nihil	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan / pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Nihil	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	1.098 Arsip	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	8 Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Nihil	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Nihil	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten yang diterbitkan	Nihil	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	31 Kelompok Budidaya	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	261.031 Benih	
26	PARIWISATA	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi. Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi	6 Destinasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata - Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian - Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	89 Fasilitas Umum	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : - Daya Tarik usaha - Kawasan pariwisata - Jasa transportasi wisata - Jasa perjalanan wisata - Jasa makanan dan minuman - Penyediaan akomodasi - Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi - Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran - Jasa informasi pariwisata - Jasa konsultan pariwisata - Jasa pramuwisata - Wisata tirta - Spa	Nihil	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri, bisa sebagai peserta atau penyelenggara	5 Event	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	Nihil	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	2	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}}$ x 100% Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah: - Sub sektor biro perjalanan wisata - Sub sektor hotel dan restoran - Sub sektor spa - Sub sektor restoran, bar dan jasa boga Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader): - Bidang kepemanduan wisata selam - Bidang kepemanduan wisata - Bidang kepemanduan ekowisata - Bidang arung jeram - Bidang kepemanduan wisata agro - Bidang jasa boga	$\frac{7}{350}$ x 100% = 2%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			- Bidang kepemanduan wisata goa - Bidang manajerial spa - Bidang MICE		
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	$\frac{56}{56} \times 100\%$ = 100%	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	33 Lokasi	
27	PERTANIAN	1. Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan - Pengadaan sarana produksi pupuk urea (non subsidi) dan pupuk NPK (non subsidi) kegiatan bantuan sosial penanganan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 bidang pertanian TA 2020, Nomor: 600/405/411.316/PPK/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 a. Prasarana pertanian bidang perkebunan sebanyak 23 unit b. Prasarana pertanian bidang tanaman pangan sebanyak 197 unit c. Alat pengolahan saribuah dan keripik buah (APBD Provinsi Jawa Timur), 1 kelompok tani (satu paket) d. Pengolahan dan pemasaran hasil holtikultura (APBN) 2 kelompok tani/gapoktan sebanyak 189 unit (1 paket)	Sarana pertanian yang diberikan: 1. Pupuk, yang terdiri dari - Urea : 27.884 kg - ZA : 11.728 kg - SP-36 : 3.189 kg - NPK : 18.429 kg - Organik : 10.778 kg - Organik cair : 14.858 lt 2. Benih kedelai 40 kg x 695 ha = 27.800 kg 3. Benih porang 1 ha 22.500 biji 4. Benih padi 25 kg x 749 ha = 18.725 kg 5. Pembangunan irigasi tanah dangkal = 17 unit 6. Pembangunan dam parit = 5 unit	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
				7. Rehabilitasi BPP Kecamatan : 15 unit Total : 41 unit sarana dan prasarana	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	37 Unit	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	1 Izin Usaha	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	$\frac{37 \text{ unit}}{37 \text{ unit}} \times 100\% = 100\%$	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	$\frac{325{,}52 \text{ Ha}}{326{,}05 \text{ Ha}} \times 100\% = 99{,}84\%$	
28	KEHUTANAN	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	Urusan kehutanan tidak diampu oleh Kab. Nganjuk, melainkan kewenangan Provinsi	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi		
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi		
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun		
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Nihil Kab.Nganjuk tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral karena tidak memiliki kawasan panas bumi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
30	PERDAGANGAN	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan/atau benar}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan/atau benar}} \times 100\%$	a. Pusat perbelanjaan = Nihil b. Toko swalayan $\frac{28}{28} \times 100\%$ = 100%	
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100\%$ = 100%	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100\%$ = 100%	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri: $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri:	Nihil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri x 100% Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri: Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri x 100%		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten / Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer x 100%	Nihil	
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam) / Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%	Nihil	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	(0.5+0.5) x 100% = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)		
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	4,183%	
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	$\frac{96.826,75}{90.931,5 \times 101.035} \times 100\%$ = 1,05%	
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{11.373}{24.000} \times 100\%$ = 47,39%	
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	$\frac{60}{60} \times 100\%$ = 100%	
31	PERINDUSTRIAN	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Nihil	
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan	1 Perda (Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040)	
		3. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{370}{370} \times 100\% = 100\%$	
		4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di Kabupaten yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{29}{1.327} \times 100\% = 2{,}19\%$	
32	TRANSMIGRASI	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Data dalam proses	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	Data dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Sudah cukup jelas	Data dalam proses	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	PENDIDIKAN	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{29.786}{30.479} \times 100\% = 97,73\%$	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{89.234}{103.203} \times 100\% = 86,46\%$	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{39.737}{50.829} \times 100\% = 78,18\%$	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{283}{203.007} \times 100\% = 0,14\%$	
2.	KESEHATAN	1. Rasio daya tampung RS Rujukan terhadap jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{887}{1.060.086} \times 100\% = 0,084\%$	
		2. Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{12.451}{15.648} \times 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
				= 79,56%	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{12.264}{14.936} \times 100\%$ = 82,11%	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{12.882}{14.225} \times 100\%$ = 90,56%	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{43.626}{58.449} \times 100\%$ = 74,64%	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{60.996}{172.220} \times 100\%$ = 35,42%	
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{156.075}{663.700} \times 100\%$ = 23,52%	
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{88.996}{179.232} \times 100\%$ = 49,65%	
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{55.123}{379.319} \times 100\%$ = 14,53%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{21.276}{21.916} \times 100\% = 97,08\%$	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2.501}{3.286} \times 100\% = 76,11\%$	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{682}{682} \times 100\% = 100\%$	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{18.439}{18.439} \times 100\% = 100\%$	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100\%$	$\frac{68.405}{122.435} \times 100\% = 55,87\%$	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100$	$\frac{48.900,49}{57.000} \times 100\% = 85,79\%$	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun existing}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{11.484,88}{14.951} \times 100\% = 76,82\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindugi dalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{283.053}{283.477} \times 100\% = 99,85\%$	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{308.436}{325.293} \times 100\% = 94,82\%$	
		6. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$	
		7. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.004,358}{1.153,482} \times 100\% = 87,07\%$	
		8. Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{85}{259} \times 100\% = 32,81\%$	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100$	$\frac{537}{537} \times 100\% = 100\%$	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100$	$\frac{284}{284} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	$\frac{205}{205} \times 100\% = 100\%$	
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	$\frac{28}{131,2} \times 100\% = 21,34\%$	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{43.532}{325.293} \times 100\% = 13,38\%$	
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.395}{325.293} \times 100\% = 0,43\%$	
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.103.902}{1.103.902} \times 100\% = 100\ \%$	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{742.521}{891.054} \times 100\% = 83,3\ \%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah keseluruhan korban bencana di wilayah Kabupaten x 100	948/948 x 100% = 100%	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah / Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten x 10	47/47 x 100% = 100%	
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	9,63 menit	
6.	SOSIAL	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	17/42 x 100% = 40,47%	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten x 100%	133/133 x 100% = 100%	
7.	TENAGA KERJA	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten x 100	Data dalam proses	
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	0/11.005 x 100% = 0%	
		3. Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100%	Data dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}}$ x 100%	Data dalam proses	
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}}$ x 100%	$\frac{3.723}{4.593}$ x 100% = 81,06%	
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}}$ x 100%	$\frac{152.107.004.420}{335.454.340.721,76}$ x 100% = 45,34%	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) di Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{21}{316.298}$ x 100% = 0,007%	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}}$ x 100.000	$\frac{41}{548.622}$ x 100.000 = 7,47	
9.	PANGAN	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}}$ x 100%	$\frac{313.946,83}{105.645,21}$ x 100% = 297,17 %	
10.	PERTANAHAN	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}}$ x 100%	$\frac{76.685}{76.685}$ x 100% = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{41.608,25}{95.402,3} \times 100\%$ = 43,61%	
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{22.596}{22.596} \times 100\%$ = 100%	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	Nihil	
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	Nihil	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA x 30%) + (IKD x 30%) + (ITH x 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	(53,33 x 30%) + (78,84 x 30%) + (54,86 x 40%) = 61,59%	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{458.063,79}{488.393,01} \times 100\%$ 93,79%	
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kabupaten}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{72}{72} \times 100\%$ = 100%	
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	1. Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 10$	$\frac{1.038.274}{1.247.119} \times 100\%$ = 83,2%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
	PENCATATAN SIPIL	2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}}$ x 100%	$\frac{60.343}{367.119}$ x 100% = 16,4% (Data jumlah anak yang digunakan adalah usia 0-19 tahun)	
		3. Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}}$ x 100%	$\frac{697.252}{367.119}$ x 100% = 189,9% (Data jumlah anak yang digunakan adalah usia 0-19 tahun)	
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}}$ x 100%	$\frac{4}{50}$ x 100% = 8%	
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}}$ x 100%	Sudah tidak ada desa tertinggal	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}}$ x 100	$\frac{112}{167}$ x 100% = 67,07%	
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $ASFR\ i = \frac{b_i}{p_i^f} x\ k$ TFR : Angka Kelahiran Total ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	$\frac{5 \times 365,31}{1000}$ = 1,83%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i : Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 k : Bilangan Konstanta biasanya 1000		
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	$\frac{144.924}{184.713} \times 100\%$ = 78,46 %	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	$\frac{17.841}{184.713} \times 100\%$ = 9,66 %	
15.	PERHUBUNGAN	1. Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten tersebut) • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil	20	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5		
		2. Kinerja lalu lintas Kabupaten	V/C ratio di jalan Kabupaten	0,47	
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{49}{49} \times 100\% = 100\%$	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	$\frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten / Jumlah penduduk x 100	867.199 / 1.103.902 x 100% = 78,55%	
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi x 100	215 / 887 x 100% = 24,24%	
		2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	6.151 / 118.000 x 100% = 5,21 %	
18.	PENANAMAN MODAL	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten / Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten x 100%	3.305.345.722.393 - 3.616.846.679.210 = - 311.500.956.817 / 3.616.846.679.210 x 100 = - 8,61%	
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten / Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten x 100	200 / 216.175 x 100% = 0,092%	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten / Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten x 100%	141.533 / 216.175 x 100% = 65,47%	
		3. Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	12	
20.	STATISTIK	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD x 100%	50 / 50 x 100% = 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}}$ x 100%	$\frac{50}{50}$ x 100% = 100%	
21.	PERSANDIAN	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}}$ x 100%	$\frac{415}{645}$ x 100% = 64,3%	
22.	KEBUDAYAAN	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}}$ x 100%	$\frac{89}{305}$ x 100% = 29,18%	
23.	PERPUSTAKAAN	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Data dalam proses	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\Sigma \frac{\text{UPLM}}{\text{ALM}}$ x 100	Data dalam proses	
24.	KEARSIPAN	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Data dalam proses	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Data dalam proses	
25.	KELAUTAN & PERIKANAN	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Perikanan Tangkap : 300 kg Perikanan Budidaya: 10.010.860 kg	
26.	PARIWISATA	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}$ x 100%	Nihil	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}$ x 100%	$\frac{193.092-184.739}{193.092}$ x 100% = 4,44%	
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$ x 100%	$\frac{5.541}{5.952}$ x 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
				= 93,09%	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{481.154,6}{24.879.347,03}$ x 100% = 1,93%	
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{481.154,6}{1.022.740.460}$ x 100% = 0,047%	
27.	PERTANIAN	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen (ha)}}$ x 100%	$\frac{718.055,46}{111.262}$ x 100% = 645,373%	
		2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}$ x 100%	$\frac{3.756\text{-}4.011 = -255}{4.011}$ x 100% = 6,35%	
28.	KEHUTANAN				
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}}$ x 100	Nihil (Kab.Nganjuk tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral karena tidak memiliki kawasan panas bumi)	
30.	PERDAGANGAN	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}}$ x 100	$\frac{36}{36}$ x 100% = 100%	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}}$ x 100%	$\frac{96.826,75}{101,035}$ x 100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
				= 95,83 %	
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{11.373}{24.000} \times 100\%$ = 47,39%	
31.	PERINDUSTRIAN	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{1.342-1.316}{1.316} \times 100\%$ = 1,98%	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK}}{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP}} \times 100\%$ Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	$\frac{7}{10} \times 100\%$ = 70%	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{25}{29} \times 100\%$ = 86,21%	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Nihil	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Nihil	
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri :	100%	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja	Sumber Data
			- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		
32.	TRANSMIGRASI				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{311.791.645.364}{2.335.569.539.485} \times 100\% = 13,35\%$	
		2. Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{478.462.298.146,24}{28.053.330.720} \times 100\% = 1.705,54\ \%$	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{2.043.666.744.582,36 - 500.378.887.765 = 1.543.287.856.817}{2.335.569.539.485} \times 100\% = 66,08\%$	
		6. Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP	
2.	PENGADAAN	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	Nihil	
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{186}{640} \times 100\% = 29\%$	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	$\frac{243.720.560.236,87}{243.720.560.236,87} \times 100\%$	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
				= 100%	
3.	KEPEGAWAIAN	1. Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}}$ x 100%	$\frac{1.276}{1.108}$ x 100% = 115,16%	
		2. Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$ x 100%	$\frac{310}{2.384}$ x 100% = 13%	
		3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$ x 100%	$\frac{0}{310}$ x 100% = 0%	
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}}\right)\text{-}1\right)$ x 100%	$\left(\left(\frac{2.395.343.354.250,62}{2.335.569.539.485}\right)\text{-}1\right)$ x 100% = 3%	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}}\right)\text{-}1\right)$ x 100%	$\left(\left(\frac{478.462.298.146,24}{359.762.424,055}\right)\text{-}1\right)$ x 100% = 33%	
		3. Manajemen Aset	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	(Ya) 100%	
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}}$ x 100%	$\frac{551.064.756.631,12}{1.977.318.529.716,48}$ x 100%	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data
				= 27,87%	
5.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	$\frac{368.400.000}{368.400.000} \times 100\%$ = 13,03%	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	$\frac{32}{4} \times 100\%$ = 800%	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Pada birokrasi, akuntabilitas instansipemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakansebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, di mana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5
Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	a. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	%	80	Satpol PP
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	BPKAD
	b. Rasio kemandirian keuangan daerah	%	14,80	Bapenda
	c. Maturitas SPIP	Nilai	3	Inspektorat
	d. Predikat SAKIP	Nilai	75 (BB)	Sekretariat Daerah
	e. Nilai EKPPD	Nilai	3,4140	Sekretariat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	f. Indeks SPBE	Skor	Baik (2,6 ≤ 3,5)	Dinas Komunikasi dan Infomartika
	g. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	76	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.	Skor	80	Sekretariat Daerah
	i. Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	%	100	BAPPEDA
	j. Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*policy brief*)	%	80	BAPPEDA
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	%	47	BKD
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	%	10,36	Dinas Sosial PPPA
	b. Persentase penurunan PMKS	%	0,4	Dinas Sosial PPPA
5. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	a. Indeks Pendidikan	Skor	0,60	Dinas Pendidikan
	b. Indeks Pembangunan Pemuda	%	0,57*	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Indeks Kesehatan	Skor	0,79	Dinas Kesehatan
	b. Laju Pertumbuhan	%	0,32	Dinas PPKB
7. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender	Skor	94,38	Dinas Sosial PPPA
	b. Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	67,16	Dinas Sosial PPPA
8. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	3,80	Dinas Pertanian
	b. Nilai Tukar Petani	Nilai	104,1	Dinas Pertanian
9. Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	%	4,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	20,45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,10	Dinas Tenaga Kerja, Usaha Mikro dan Koperasi
11. Meningkatnya Iklim investasi	a. Nilai Investasi Daerah	Rp (milyar)	2.284,7	Dinas Penanaman

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	a. Indeks desa Membangun	Skor	0,6292	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	a. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
14. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	29	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	28	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	%	66,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Skor	72,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	76,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	%	35,39	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	%	83,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/ kawasan/kota	%	64,03	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	%	89,69	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	h. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	%	79,45	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	i. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	%	92,46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	j. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu	%	15	Dinas Perhubungan

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	lintas			
16. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	a. Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	%	80,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a. Indeks Kualitas Air	Skor	69	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Indeks Kualitas Udara	Skor	83,9	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skor	75,51	Dinas Lingkungan Hidup
	d. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	74	Dinas Lingkungan Hidup
	e. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	%	24	Dinas Lingkungan Hidup
	f. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	%	54,24	Dinas Lingkungan Hidup
18. Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulan gan bencana	a. Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	%	100	BPBD

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.6
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten NganjukTahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	80	100	111,11%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Opini BPK terhadap LKPD	WTP	N/A	N/A
		b. Rasio kemandirian keuangan daerah	14,80	19,88	134,32%
		c. Maturitas SPIP	3	3,063**	102,10%
		d. Predikat SAKIP	75 (BB)	N/A	N/A
		e. Nilai EKPPD	3,4140	N/A	N/A
		f. Indeks SPBE	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2,14 (cukup)	82,30 %
		g. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	76	68	89,47%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	80	81,75	102 %
		i. Persentase Indikator RPJMD yang mencapai target	100	83,33%	83,33%
		j. Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*policy brief*)	80	91 %	113 %
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi	47	35,74	76,05 %
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	10,36	11,85	87,42 %
		b. Persentase penurunan PMKS	0,4	3,18 %	795 %
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	0,60	0.62	103 %
		Indeks Pembangunan Pemuda	0,57	0,48*	106,67*
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,79	0,79	100%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,32	0,23*	134,78*
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	94,38	93,26*	99 %*
		b. Indeks Pemberdayaan Gender	67,16	69,90*	104,08%*
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	3,80	2,35*	61,84 %*
		b. Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura)	104,1	100.34	96,39 %
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	4,50	10,70*	237,77 %*
		b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	20,45	8,26*	40,39 %*
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,10	4,98%	42,16
11	Meningkatnya Iklim investasi	Nilai Investasi Daerah	2.284,7	3.305,34	144,67 %
12	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	Indeks desa Membangun	0,6292	0,73197	116,33 %
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	5	4,33	86,6 %
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal daerah	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	29	29,18	100,62%
		b. Persentase warisan seni budaya dan	28	29,73	106,18%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		tradisi lokal yang dilestarikan			
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	66,00	87,07	131,92%
		b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	72,11	76,82	106,53%
		c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	76,70	89,10	116,17%
		d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	35,39	86,46	244,30%
		e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	83,36	90,98	109,14%
		f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/ kawasan / kota	64,03	38,14	59,57%
		g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	89,69	79,84	89,02%
		h. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	79,45	76,24	95,96%
		i. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	92,46	86,62	93,68%
		j. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	15	32,71	218,07%
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	80,63	81.44%	101 %
17	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam	a. Indeks Kualitas Air	69	54	78,26%
		b. Indeks Kualitas Udara	83,9	78,84	93,97%
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,51	54,99	72,82%
		d. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74	71,28	96,32%
		e. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	24	22,51	93.79%
		f. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	54,24	52,46	96,72%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	100	84,21	84,21%

Keterangan : * Data Tahun 2020

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnyastabilitas kondisi sosial, tentram, tertib,dan religius	a.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	75	100	133%	80	100	111,11%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a.	Opini BPK terhadap LKPPD	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A
		b.	Rasio kemandirian keuangan daerah	14,80	21,18	143,13%	14,80	19,88	134,32%
		c.	Maturitas SPIP	3	N/A	N/A	3	3,063**	102,10%
		d.	Predikat SAKIP	70 (BB)	N/A	N/A	75 (BB)	N/A	N/A
		e.	Nilai EKPPD	3,3640	3,2244	95,85 %	3,4140	N/A	N/A
		f.	Indeks SPBE	Cukup (1,8 ≤ 2,6)	2,62 (baik)	144%	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2,14 (cukup)	82,30 %
		g.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	64	58	90,628%	76	68	89,47%
		h.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	79	81,68	103,39%	80	81,75	102 %
		i.	Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target	100%	83,33%	83,33%	100	83,33%	83,33%
		j.	Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (Policy Brief)	80%	67%	83,75%	80	91 %	113 %
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	a.	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	30	38,36	127,80 %	47	35,74	76,05 %
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a.	Tingkat Kemiskinan	10,75	11,62	107,9%	10,36	11,85	87,42 %
		b.	Persentase penurunan PMKS	0,4	42,19 %	94,80 %	0,4	3,18 %	795 %
5	Meningkatnya kualitas	a.	Indeks Pendidikan	0,60	0.61	101,66%	0,60	0,62	103 %

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	dan aksesibilitas pendidikan	b.	Indeks Pembangunan Pemuda	0,45	0,48*	106,67*	0,57	0,48*	106,67*
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Indeks Kesehatan	0,79	0,79	100%	0,79	0,79	100%
		b.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,31	0,23	134,78	0,32	0,23*	134,78*
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a.	Indeks Pembangunan Gender	94,08	93,26	99%	94,38	93,26*	99 %*
		b.	Indeks Pemberdayaan Gender	66,96	68,45**	102%	67,16	69,90*	104,08%*
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	3,60	3,71	110%	3,80	2,35*	61,84 %*
		b.	Nilai Tukar Petani	103,7	106,86	103,05%	104,1	100.34	96,39 %
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	4,00	0,59	14,75%	4,50	10,70*	237,77 %*
		b.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	19,95	-3,77	-18,90%	20,45	8,26*	40,39 %*
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,20	4,80%	45,83%	2,10	4,98%	42,16 %
11	Meningkatnya iklim investasi	a.	Nilai Investasi Daerah	2.175,99	3.616,85	166,22%	2.284,7	3.305,34	144,67 %
12	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	a	Indeks desa Membangun	0,6286	0,7079	112 %	0,6292	0,73197	116,33 %
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	a.	Persentase peningkatankunjungan wisatawan	0,6286	0,7079	112%	5	4,33	86,6 %
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.	a.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	-48,05%	-9,61%	29	29,18	100,62%
		b.	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yangdilestarikan	28	28,53%	101,89%	28	29,73	106,18%
15	Meningkatnya infrastruktur	a.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	25	27,03 %	108,12%	66,00	87,07	131,92%

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal		Fungsional						
		b.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	64,00	85,213	133,145%	72,11	76,82	106,53%
		c.	Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,51	60,78	84,99%	76,70	89,10	116,17%
		d.	Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	74,47	88,35	118,64%	35,39	86,46	244,30%
		e.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	82,31	95,68%	116,24%	83,36	90,98	109,14%
		f.	Persentase sistem air limbahskala Rumah tangga/komunitas/ kawasan/kota	61,14	53,21%	87,03%	64,03	38,14	59,57%
		g.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	88,28	77,78%	88,11%	89,69	79,84	89,02%
		h.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	78,2	75,18	96,14%	79,45	76,24	95,96%
		i.	Persentase keteserdiaanRumah Layak Huni	90,71	86,98	95,89%	92,46	86,62	93,68%
		j.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	10%	7,81%	78,10%	15	32,71	218,07%
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	a.	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	80,13	81.36%	101,53 %	80,63	81.44%	101 %
17	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya	a.	Indeks Kualitas Air	68	56	82.35%	69	54	78,26%
		b.	Indeks Kualitas Udara	83,4	68.03	81.57%	83,9	78,84	93,97%
		c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,26	62.68	83.28%	75,51	54,99	72,82%
		d.	Persentase cakupan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	75	73.24	97.66%	74	71,28	96,32%
		e.	Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga melalui 3R	22	20.62	93.71%	24	22,51	93.79%
		f.	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	57	53	93%	54,24	52,46	96,72%
18	Meningkatnya	a.	Cakupan penanganan	100	100	100%	100	84,21	84,21%

No	Sasaran		Indikator Kinerja Satuan/Sasaran	Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	ketangguhan dalam penanggulangan bencana		Penanggulangan Bencana						

Keterangan : * Data Tahun 2020

** (Data Sementara)

*** (Data Amat Sementara)

d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

Tabel 2.8
Tabel Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Dalam RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram,tertib, dan religius	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	90%	100	111,11
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yangbaik	a. Opini BPK terhadap LKPD	WTP	N/A	N/A
		b. Rasio kemandirian keuangan daerah	14,85	19,88	133,87
		c. Maturitas SPIP	3	3,063**	102,10%
		d. Predikat SAKIP	A (85)	N/A	N/A
		e. Nilai EKPPD	3,5140	N/A	N/A
		f. Indeks SPBE	Sangat Baik (3,5 ≤ 4,2)	2,14 (cukup)	61,14
		g. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	68	68
		h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	82	81,75	99,69
		i. Persentase Indikator RPJMD yang mencapai target	100%	83,33%	83,33
		j. Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*Policy Brief*)	80%	91 %	113,5
3	Meningkatnya profesionalisme aparaturpemerintah daerah	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	71%	35,74	50,33
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	9,57%	11,85	80,75
		b. Persentase penurunan PMKS	0,4	3,18 %	795 %
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	0,61	0,62	103,33
		Indeks Pembangunan Pemuda	0,68%	0,48*	00
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,80	0,79	98,75
		Laju PertumbuhanPenduduk	0,32%	0,23*	139,13*
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	94,98	93,26*	98,18*
		b. Indeks Pemberdayaan Gender	67,56	69,90*	103,55*
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	4,20%	2,35*	55,95
		b. Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura)	104,9	100.34	95,65
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	5,50%	0,78*	194,54*
		b. Persentase pertumbuhan	21,45%	8,26*	40,39*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Dalam RPJMD	Realisasi	Capaian %
		PDRB sektor perdagangan			
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))	2%	4,98%	42,16
11	Meningkatnya Iklim investasi	Nilai Investasi Daerah	2.518,99 milyar	3.305,34	131,21
12	Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan perdesaaan	Indeks Desa Membangun	0,6304	0,73197	116,11
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	5%	4,33	86,60
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	31%	29,18	94,12
		b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	32%	29,73	92,90
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaanumum dan perumahanrakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	70%	87,07	124,38
		b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	73,11	76,82	105,07
		c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	80,58%	89,10	110,57
		d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	38,53%	86,46	224,39
		e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	85,46%	90,98	106,45
		f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/kawasan/ kota	69,81%	38,14	54,63
		g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	92,51%	79,84	86,30
		h. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	81,95%	76,24	93,03
		i. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	95,96%	86,62	90,26
		j. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	25%	32,71	130,84
16	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	81,83%	81.44%	99,52
17	Meningkatnya kualitas	a. Indeks Kualitas Air	71	54	76,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Dalam RPJMD	Realisasi	Capaian %
	lingkungan dan konservasi sumber dayaalam	b. Indeks Kualitas Udara	84,9	78,84	92,86
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76,01	54,99	72,34
		d. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga	72%	71,28	99
		e. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	27%	22,51	83,37
		f. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	55,44%	52,46	94,62
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	100%	84,21	84,21

Keterangan : * Data Tahun 2020

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan sasaran strategisyang telah dicapai

Tabel 2.9
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang terselesaikan	111,11	90	21,11
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	a. Opini BPK terhadap LKPD	N/A	95,42	N/A
		b. Rasio kemandirian keuangan daerah	133,87	85,92	47,95
		c. Maturitas SPIP	102,1**	68,76	33,34**
		d. Predikat SAKIP	N/A	29,92	N/A
		e. Nilai EKPPD	N/A	37,77	N/A
		f. Indeks SPBE	61,14	85,79	24,65
		g. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	68	30,63	37,37
		h. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik	99,69	53,76	45,93
		i. Persentase Indikator RPJMD yang mencapai target	83,33	74,78	8,55
		j. Persentase	113,5	59,31	54,19

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*policy brief*)			
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi	50,33	82,72	-32,39
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. Tingkat Kemiskinan	80,75	93,87	-13,12
		b. Persentase penurunan PMKS	795	98,90	691,1
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	103,33	91,23	12,10
		Indeks Pembangunan Pemuda	00		
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	98,75	80,91	17,84
		Laju Pertumbuhan Penduduk	139,13*	71,78	67,43*
7	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Indeks Pembangunan Gender	98,18*	99,38	1,20*
		b. Indeks Pemberdayaan Gender	103,55*	92,38	11,17*
8	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usahapertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	61,84*	71,60	-9,76*
		b. Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura)	95,65	91,91	3,74
9	Meningkatnya volume usaha sektor industri danperdagangan	a. Persentasepertumbuhan PDRB sektor industri	237,77*	68,73	-169,04*
		b. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	40,39*	93,99	-53,60
10	Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	42,16	75,07	-32,91
11	MeningkatnyaIklim investasi	Nilai Investasi Daerah	131,21	59.61	71,60
12	Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan perdesaaan	Indeks desa membangun	116,11	78	38,11
13	Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah	Persentase peningkatan	86,60	80,58	6,02

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		kunjungan wisatawan			
14	Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah	a. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	94,12	99,27	5,15
		b. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	92,90	99,58	-6,68
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal	a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional	124,38	90,67	33,71
		b. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	105,07	88,97	16,10
		c. Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik	110,57	90,67	19,90
		d. Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik	224,39	91,67	132,72
		e. Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan	109,14	82,30	26,84
		f. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/ komunitas/ kawasan/ kota	59,57	96,60	-37,03
		g. Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	89,02	88,30	0,72
		h. Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	95,96	96,80	-0,84
		i. Persentase keteserdiaan Rumah Layak Huni	93,68	77,53	12,73
		j. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	130,84	77,76	53,08
16	Meningkatnya ketaatan	Persentase luas	99,52	77,43	22,09

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	pemanfaatan ruang daerah	kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW			
17	Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumberdaya alam	a. Indeks Kualitas Air	76,05	97,06	-21.01
		b. Indeks Kualitas Udara	92,86	97,06	-4.20
		c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	72,34	97,06	-24,76
		d. Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99	96,18	2.82
		e. Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R	83,37	89,42	-6,05
		f. Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan	94,62	97,69	-3,07
18	Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Cakupan penanganan Penanggulangan Bencana	84,21	87,56	-3,35

Keterangan : * Data Tahun 2020

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. **Misi 1** : ***"Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban"***

Tujuan : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran, dan aman.

Sasaran : Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan hidup beragama

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan keamanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sasaran Rpjmd		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan hidup beragama	Persentase penanganan pelanggaran Perdayang terselesaikan	80	100	111,11

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis operasional, untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Nganjuk yang aman dan tertib.indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam penegakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Target persentase penanganan pelanggaran Perda Tahun 2021 : 80 %
Realisasi persentase penanganan pelanggaran PerdaTahun 2021 :100 %
Capaian Kinerja Tahun 2021 : 111,11 %

Capaian kinerja pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan akhir Tahun 2021 terkait dengan pelanggaran perda adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan : Operasi penertiban pedagang kaki lima
   Target : 7 Kegiatan
   Realisasi : 7 Kegiatan
2) Kegiatan : Pengawasan dan penertiban perijinan reklame
   Target : 12 Kegiatan
   Realisasi : 12 Kegiatan
3) Kegiatan : Penertiban, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan
   Target : 7 Kegiatan
   Realisasi : 7 Kegiatan
4) Kegiatan : Penertiban Pengawasan Bangunan Liar
   Target : 11 Kegiatan
   Realisasi : 11 Kegiatan

5) Kegiatan : Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus
   Target : 2 Kegiatan
   Realisasi : 2 Kegiatan
6) Kegiatan : Operasi Pekerja Seks Komersial (PSK)
   Target : 6 Kegiatan
   Realisasi : 6 Kegiatan
7) Kegiatan : Penertiban Anjal Gepeng dan Pengamen
   Target : 7 Kegiatan
   Realisasi : 7 Kegiatan
8) Kegiatan : Operasi penertiban minuman beralkohol
   Target : 11 Kegiatan
   Realisasi : 11 Kegiatan
9) Kegiatan : Penertiban, pemantauan pengawasan dan mineral dan batubara
   Target : 7 Kegiatan
   Realisasi : 7 Kegiatan

Pencapaian sasaran "Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan hidup beragama" rata-rata tercapai 100% dengan kategori "tercapai". Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa intern dan antar umat beragama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

2. **Misi 2** : ***"Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan".***

Tujuan : Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang professional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih.

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Terdiri dari sepuluh indikator kinerja, adapun indikatornya sebagai berikut :

1) Opini BPK Terhadap LKPD

Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan/Fungsi Penunjang menjelaskan pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	N/A	N/A

Analisis pencapaian sasaran pembangunan daerah untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD dengan target WTP untuk LKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2021 masih dalam proses audit oleh BPK. Opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 membutuhkan dukungan dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk yang telah seluruhnya mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan secara mandiri.

2) Rasio Kemandirian Keuangan

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana sasaran yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Indikator tersebut untuk mengukur sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi belanja daerah yang menjadi tuntutan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah meliputi kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan prosentase kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah yang pada Tahun 2021 ditetapkan target sebesar 14,80 %, realisasi mencapai 19,88 % sehingga capaian rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 134,32%.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

Realisasi PAD Tahun 2021	Rp	476.165.336.138,49
Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Rp	2.395.749.699.485.49
Target rasio kemandirian keuangan daerah	%	14,80

Realisasi rasio kemandirian keuangan daerah	%	19,88
Capaian kinerja rasio kemandirian keuangan daerah	%	134,32

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator nomor 2 yaitu rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 134,32%. Berdasarkan skala ordinal pencapaian sasaran yang diperoleh tersebut dalam kategori "**tercapai**".

3) Maturitas SPIP

Untuk penilaian Indeks Maturitas SPIP Tahun 2021 sebesar mendapatkan nilai sebesar 3,063. Namun nilai ini belum melaksanakan Self Assessment (SA) ke BPKP Perwakilan Jawa Timur, dikarenakan proses penilaian yang dilaksanakan perangkat daerah pada Tahun 2020 Nilai Quality Assurance (QA) dari BPKP Pusat hasilnya belum keluar. Dari sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik", diukur dari indikator maturitas SPIP "**tercapai**".

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyatata kelola pemerintahan yang baik	Maturitas SPIP	3	3,063**	102,1 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				-

**) Data sementara, belum mendapatkan *quality assurance*

4) Predikat SAKIP

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat SAKIP	75	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian Kinerja				-

Dari sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik", diukur dari indikator predikat SAKIP "**belum tercapai**" dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi atau penilaian dari Kementrian PAN RB.

5) Nilai EKPPD

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai EKPPD	3,4140	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja				**-**

Dari sasaran "**Meningkatnya tata Kelola pemerintahan daerah yang baik**", Nilai EKPPD masih menunggu evaluasi atau penilaian dari Kementrian Dalam Negeri.

6) Nilai Indeks SPBE

Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan indikator Nilai indeks SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
2.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Nilai Indeks SPBE	Baik (2,6 ≤ 3,5)	2.14	82,30 %
Rata-Rata Capaian Kinerja					**82,30 %**

Pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 2,14 (cukup) mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 yang mendapat nilai 2,62 (baik). Terdapat 3 (tiga) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Dari 3 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 35 indikator. Adapun nilai masing-masing domain serta perbandingannya dengan nilai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NILAI SPBE MASING-MASING DOMAIN

DOMAIN	2020	2021
Kebijakan SPBE	2,18	1,90
Tata Kelola SPBE	2,14	1,90
Layanan SPBE	3,00	2,75

Dari nilai tersebut di atas domain kebijakan SPBE mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 dari nilai 2,62 ke 2,14 di Tahun 2021. Dari indikator sasaran "Nilai Indeks SPBE", rata-rata capaian kinerja 82,30 % atau dapat dikategorikan "**belum tercapai**" Hal tersebut berarti Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk kurang berhasil meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

7) Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Leading sector dalam bidang ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang memiliki sasaran sesuai RPJMD yakni Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip Pemerintah Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun menghadapi permasalahan. Kurangnya sarana penyimpanan arsip di depo arsip dan kurangnya jumlah tenaga pengelola kearsipan di masing-masing OPD. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran program kegiatan dalam rangka pencapaian target RPJMD, namun demikian karena terjadinya pandemi covid-19 telah dilakukan refocussing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga anggaran bidang kearsipan berkurang sebesar 50%. Pencapaian sasaran bidang kearsipan tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Sasaran	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
2.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Prosentase Perangkat Daerah (PD) yang memiliki tatakearsipan yang baku	76	68	89,47 %

Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah OPD : 50
- Target OPD yang memiliki tata kearsipan yang baku : 38
- Prosentase target OPD yang memiliki tatakearsipan yang baku : 76
- Realisasi OPD yang memiliki tata kearsipan yang baku : 34

- Prosentase Realisasi OPD yang memiliki tata kearsipan yang baku : 68
- Prosentase capaian kinerja tahun 2021 : 89,47 %

Indikator sasaran/kinerja "Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku" menghasilkan nilai capaian 89,47%. Berdasarkan skala ordinal, pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**belum tercapai**".

8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,75	102%
Rata-rata Capaian Kinerja				**102%**

Dari sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik", hanya diukur dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan rata-rata capaian kinerja 102% atau dapat dikategorikan "**tercapai**". Hasil perhitungan terhadap penilaian masyarakat terhadap pelayanan masing-masing perangkat daerah se Kabupaten Nganjuk melalui kuesioner yang sudah disebarkan kepada 4.907 responden, menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah 81,75. Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 0,81, apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan mutu pelayanan Kabupaten Nganjuk adalah B dengan kinerja Pelayanan BAIK.

9) Persentase Indikator RPJMD yang Mencapai Target

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan dalam rangka capaian sasaran kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik". Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah "Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target", dengan mengitung capaian kinerja per sasaran secara

skala ordinal diatas 90 %. Hasil capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- Jumlah Sasaran dalam RPJMD : 18 Sasaran
- Jumlah sasaran yang tercapai : 14 Sasaran
- Jumlah sasaran yang kurang tercapai : -
- Jumlah sasaran tidak tercapai : 4 Sasaran
- % capaian kinerja sasaran Tahun 2021 : 77,77%

Perlu dijelaskan permasalahan capaian kinerja sasaran tidak tercapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan
3. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
4. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah

Keempat sasaran pembangunan yang tidak tercapai di atas terkait dengan sasaran pembangunan sosial dan ekonomi. Indikator- indikator makro ekonomi dan sosial pada Tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid 19. Namun demikian secara formulasi jika dihitung seluruh jumlah sasaran dalam RPJMD dengan jumlah sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang tercapai adalah sebesar 77,77%. Dengan demikian sasaran pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan “CUKUP”.

10) Persentase Penelitian Yang Digunakan Sebagai Rekomendasi Kebijakan (*Policy brief*).

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan dalam rangka capaian sasaran kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik”. Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah “Persentase Penelitian yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan (*policy brief*)”. Indikator ini untuk mengukur kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan harapan

rekomendasi hasil penelitian dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk tahun berikutnya.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Nganjuk. Indikator sasaran kinerja "Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif" menghasilkan nilai capaian 91%. Berdasarkan skala ordinal predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**".

Diukur dari hasil capaian k inerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah dokumen hasil kajian yang dilaksanakan : 11 dokumen
- Jumlah dokumen yang dimanfaatkan : 10 dokumen
- % Target capain kinerja : 100%
- % Hasil capaian indikator kinerja : 91 %

11 (sebelas) kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

1. Masterplan *Smart Farming* Berbasis Korporasi
2. Dokumen Amdal Selingkar Wilis (Amdal, RKL, RPL) ;
3. Dokumen Penataan Batas Lahan Relokasi Bencana Selopuro;
4. Dokumen Supervisi Penataan Batas Lahan Relokasi Bencana Selopuro;
5. Dokumen Apraisal Lahan Relokasi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok;
6. Dokumen Pembagian Lahan Relokasi Warga Terdampak;
7. Dokumen Kajian Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi Kabupaten Nganjuk;
8. Dokumen Kajian Survey Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Kajian Tata Batas Lahan Pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH);

Dari target 11 (sebelas) kegiatan litbang yang seharusnya ditindaklanjuti pemanfaatannya ada 1 (satu) kegiatan kajian kelitbangan di tahun 2021 yang tidak terealisasi karena terdapat permasalahan, yaitu kegiatan :

1. Kajian Tata Batas Lahan Pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) karena terkendala adanya penerapan aturan PPKM di semua daerah termasuk di Kabupaten Bondowoso sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi.

Untuk itu upaya pemecahan masalah adalah dengan melanjutkan perpanjangan ijin dispensasi untuk melanjutkan proses penyelesaian TMKH.

b. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Misi 2 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dengan indikator capaian Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase Pejabat yang Memenuhi standard kompetensi	47%	35,74%	76,05 %
Rata-Rata Capaian Kinerja				**76,05%**

Analisa dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah diukur dengan indikator kinerja persentase pejabat yang memenuhi standard kompetensi adalah pejabat struktural pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur dengan rincian pejabat yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai berikut :

- Jumlah jabatan struktural yang terisi : 635
- Jumlah pejabat struktural yang telah ikut uji kompetensi : 227
- Jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti uji kompetensi : 408
- Persentase Jumlah pejabat struktural yang telah ikut uji kompetensi : 35,74%
- Persentase target capain kinerja : 47%
- Persentase hasil capaian indikator kinerja : 76,05 %

Dari indikator sasaran "persentase pejabat yang memenuhi standard kompetensi", rata-rata capaian kinerja 76,05 % atau dapat dikategorikan "**belum tercapai**". Hal tersebut disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan bersifat tatap muka dan pengumpulan massa serta adanya refocussing anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19. Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk belum berhasil meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

3. **Misi 3** : ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas"***

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yangunggul.

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat terdiri 2 indikator kinerja yaitu:

1) Tingkat Kemiskinan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	9,57%	11,85 %	80,75%
Rata-Rata Capaian kinerja				80,75%

Dari hasil penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Nganjuk tahun 2021 sebesar 428.882 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar 20.722 rupiah dibanding garis kemiskinan tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai penduduk non-miskin di Kabupaten Nganjuk, seseorang perlu mempunyai pendapatan minimal 428.882 rupiah per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2021 P1 Kabupaten Nganjuk sebesar 1,62 poin. Nilai P1 dapat digunakan untuk menghitung biaya minimal pengentasan kemiskinan dengan syarat biaya tersebut merata ke seluruh penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada tahun 2021 P2 kabupaten Nganjuk sebesar 0,35 poin atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2019.Angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk

Tahun 2021 meningkat 0,38 % menjadi 11,62 persen apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun 2019, hal ini tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

2) Persentase Penurunan PMKS

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Penurunan PMKS	0,4 %	3,18 %	795 %
Rata-rata Capaian Kinerja				**795 %**

PMKS/ PPKS yang tertangani :

- Jumlah PMKS/PPKS Tahun 2021 : 53.995
- Jumlah PMKS/PPKS Tahun 2020 : 89.608
- Selisih jumlah PMKS/PPKS Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 : 35.613
- Persentase penurunan jumlah PMKS/PPKS Tahun 2021 : 3,18 %
- Persentase prosentase target RPJMD penurunan jumlah PMKS/PPKS Tahun 2021 : 0,4 %
- Persentase hasil capaian indikator kinerja : 795 %

Jumlah PMKS/PPKS pada tahun 2020 sejumlah 89.608 orang atau sebesar 7,94% dari jumlah penduduk, sedangkan pada Tahun 2021 jumlah PMKS/PPKS sebesar 53.995 orang atau 4,76 %. Dengan demikian, ada penurunan persentase PMKS/PPKS di Tahun 2021 sebesar 3,18%. Hal ini disebabkan adanya program penanganan dampak covid-19 utamanya di bidang pemulihan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa target penurunan PMKS di tahun 2021 dikategorikan "**tercapai**".

b. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan Dan Prestasi Pemuda

Sasaran meningkatnya kualitas dana aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda terdiri 2 indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Pendidikan

No	SasaranRPJMD	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pendidikan	0,60	0,62	103%

Pencapaian indikator sasaran indeks pendidikan diukur dengan parameter sebagai berikut:

1. *Angka Partisipasi Murni*

Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI/Paket A danSMP/MTs/Paket B, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan di SD/MI/Paket A dan usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs/Paket B.

a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Data APM SD/MI/Paket A Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APM SD/MI/Paket A Tahun 2021sebesar 98,85%
- Jumlah anak sekolah SD/MI/Paket A usia 7-12 tahunsebanyak 89.234 anak
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 103.203 anak
- Realisasi APM SD/MI/Paket A sebesar 86,46 %
- Capaian kinerja adalah 87,42 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Data APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2021 sebesar 92,95%
- Jumlah anak sekolah SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun sebanyak 39.737 anak
    a. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 50.829 anak
    b. Realisasi APM SMP/MTs/Paket B sebesar 78,18 %
    c. Capaian kinerja adalah 84,11 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

2. *Angka Partisipasi Kasar*

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah siswa usia 4-6 tahun dibanding jumlah penduduk usia 4-6 tahun, sedangkan untuk SD/MI/Paket A atau SMP/MTs/Paket B merupakan indikator yang menunjukkan jumlah

semua siswa yang sekolah di SD/MI/Paket A dibanding penduduk usia 7-12 tahun atau jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibanding jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Data APK PAUD Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APK PAUD Tahun 2021 sebesar 75 %
- Jumlah siswa usia 4-6 tahun sebanyak 40.674 siswa
- Jumlah penduduk usia 4-6 tahun sebanyak 45.719orang
- Realisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar88,97 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 118,63 %

  Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Data APK SD/MI/Paket A Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APK SD/MI/Paket A Tahun 2021sebesar 107,85%
- Jumlah siswa sekolah SD/MI/Paket A usia 7-12 tahunsebanyak 96.649 siswa
- Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 103.203 orang
- Realisasi APK SD/MI/Paket A sebesar 93,65 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 86,83 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Data APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APK SMP/MTs/Paket B Tahun 2021 sebesar 106,10%
- Jumlah siswa sekolah SMP/MTs/Paket B usia 13-15tahun sebanyak 51.790 siswa
- Jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 50.829 orang
- Realisasi APK SMP/MTs/Paket B sebesar 101,89 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 96,03 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "**tercapai**".

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh hasil pelaksanaan program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   a. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
   b. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
   b. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   a. Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
   a. Penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan

3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah indikator yang menunjukkan besarnya jumlah anak didik yang tidak mampu menyelesaikansuatu jenjang pendidikan karena berbagai alasan baik ditingkat SD/MI maupun SMP/MTs.

3.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Data APS SD/MI Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APS SD/MI Tahun 2021 sebesar 0,00%
- Jumlah anak sekolah SD/MI sebanyak 96.649 anak
- Jumlah anak sekolah SD/MI yang putus sekolah sebanyak 0 anak
- Realisasi APS SD/MI sebesar 0,00%
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00%

Capaian kinerja tersebut jika dibanding dengan target RPJM termasuk dalam kategori "**tercapai**".

3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Data APS SMP/MTs Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target persentase APS SMP/MTs Tahun 2021 sebesar0,00%
- Jumlah anak sekolah SMP/MTs sebanyak 51.619 anak
- Jumlah anak sekolah SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0 anak
- Realisasi APS SMP/MTs sebesar 0,00%
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,00%

Dari indikator tersebut rata-rata capaian kinerjanya adalah 100,00% yang masuk katagori tercapai. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh hasil pelaksanaan program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    a. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
    b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
    c. Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar.
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    a. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
    b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
    c. Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
    d. Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

4. Angka Kelulusan

Indikator angka kelulusan merupakan salah satu indikatoryang mengukur kualitas kegiatan belajar mengajar.

4.1 Angka Kelulusan SD/MI

Data Angka kelulusan untuk SD/MI Tahun 2021 sebagaiberikut :

- Target angka kelulusan SD/MI Tahun 2021 adalah sebesar 100 %
- Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 16.449 anak
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MIsebanyak 16.449 anak
- Realisasi persentase angka kelulusan SD/MI sebesar100 %
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 100 %

Capaian diatas menunjukkan bahwa target kelulusan tingkat SD/MI dapat dicapai dengan baik.

4.2 Angka Kelulusan SMP/MTs

Data Angka kelulusan untuk SMP/MTs Tahun 2021 sebagai berikut :

- Target angka kelulusan SMP/MTs Tahun 2021 sebesar 100%
- Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 16.527 anak

- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs sebanyak 16.548 anak
- Realisasi persentase angka kelulusan SMP/MTs sebesar 99,87%
- Capaian kinerjanya adalah sebesar 99,87%

Capaian diatas menunjukkan bahwa target kelulusan tingkat SMP/MTs yang ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai dengan baik. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh hasil pelaksanaan program pengelolaan Pendidikan,dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

Sasaran "**Meningkatnya Kulitas Dan Aksesibilitas Pendidikan Dan Prestasi Pemuda**" dari aspek pendidikan memperoleh capaian kinerja sebesar **1043,33%** yang masuk dalam kategori **"tercapai".** Hal tersebut berarti Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

2) Indeks Pembangunan Pemuda

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	0,45 %	0,48 %*)	106,67 %

*) angka sementara

Analisis terhadap pencapaian sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Pemuda memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja,

kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Secara umum IPP Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dari target 0,45 terealisasi 0,48 atau capaian kinerjanya 106,67%. Pencapaian indeks pembangunan pemuda juga didukung dengan indikator strategis antara lain :

a. Presentase organisasi kepemudaan yang aktif
   - Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif tahun 2021 sebanyak 14 Organisasi
   - Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Nganjuk tahun 2021 sebanyak 16 Organisasi

   Berdasarkan data diatas terdapat 87,5% organisasi kepemudaan aktif di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021

b. Jumlah cabang olahraga berprestasi
   - Target cabang olahraga yang berprestasi tahun 2021=16 cabang olahraga
   - Realisasi cabang olahraga yang berprestasi tahun 2021=16 cabang olahraga.

   Daftar capaian prestasi pada cabang olahraga Tahun 2021

No	Nama Event	Tingkat	Keterangan
1	Pemuda Pelopor (An. R.M. Luthfi)	Nasional	Juara II
2	Pemuda Pelopor (Dimas P.)	Nasional	Juara III
3	Pra PON Tarung Drajad (Bima Putra P.)	Nasional	Juara I
4	Pra PON Pencak Silat (Mohamad Pandu)	Nasional	Juara I
5	Pra PON Angkat Berat (Sulthon M.)	Nasional	Juara I
6	Pra PON Panahan (Garrincha D.N.)	Nasional	Juara I
7	Kejurprov Arung Jeram (Isna Auliya)	Prov	Juara I
8	Peparnas Bulutangkis (Eka Puspita)	Nasional	Juara I
9	Peparnas Renang (Mutiara Cantik)	Nasional	Juara I
10	Paralimpian Judo (Agus Suwandi)	Prov	Juara I
11	Kejurnas Angkat Berat (Kharismati H.G)	Nasional	Juara II
12	Kejurnas Angkat Berat (Gilang K.)	Nasional	Juara II
13	Kejurnas Angkat Berat (Alfiansyah)	Nasional	Juara III
14	Kejurprov Angkat Berat (Intan Nur)	Prov	Juara III
15	Kejurprov Angkat Berat (Firna Aulia)	Prov	Juara I (2 medali)
16	Kejurprov Angkat Berat (M. Tourik)	Prov	Juara II dan III

Dari sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda”, rata-rata capaian kinerja 106,67% atau dapat dikategorikan **“tercapai”** Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda.

c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Serta Pengendalian Penduduk

Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk terdiri 2 indikator kinerja yaitu:

1) Indeks Kesehatan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, target indikator tujuan tahun 2021 yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah :

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk	Indeks Kesehatan	0,79	0,79	100

Indeks kesehatan Tahun 2021 diukur dengan variabel usia harapan hidup, Rata-rata usia harapan hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah 71,54 Tahun meningkat apabila dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup tahun 2020 sebesar 71,54 Tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk ini masih diatas Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 71,30 dan Usia Harapan Hidup Nasional Tahun 2021 sebesar 71,47 tahun . Untuk menunjang indikator sasaran Indeks Kesehatan diukur dengan parameter sebagai berikut :

a) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang terakreditasi dalam kurun waktu satu tahun.
   - Target Fasilitas Kesehatan terakreditasi 100 %
   - Jumlah Fasilitas Primer yang terakreditasi 20 Puskesmas dan 4 RS sudah terakreditasi.
   - Jumlah seluruh fasilitas primer di Kabupaten Nganjuk tahun 2021 adalah 25 unit kerja.
   - Realisasi Fasilitas Kesehatan terakreditasi 96 %
   - Capaian kinerja 96 %

   Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori tercapai.

b) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 per 100.000 kelahiran hidup memiliki target :

- Target Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2021 sebesar 83 per 100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilaporkan sebesar 245,5 kematian per 100.000 kelahiran hidup
- Realisasi capaian Angka Kematian Ibu sebesar 245,5.
- Capaian kinerja adalah 33,80%

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori "tidak tercapai". Ketidakberhasilan mencapai target penurunan AKI di bawah target karena adanya pandemi Covid-19 yang berakibat pada meningkatknya resiko kematian ibu saat melahirkan.

c) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Keberhasilan pemberantasan dan pencegahan penyakit yang menyebabkan kematian bayi ditunjukkan dengan menurunnya AKB, sehingga AKB digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi Tahun 2021 per 1.000 kelahiran hidup memiliki target :

- Target Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021 sebesar 8,5 per 1.000 kelahiran hidup
- Angka kematian bayi (AKB) yang dilaporkan sebesar 71 kematian dengan AKB 5,81 %
- Realisasi kinerja adalah 5,81
- Capaian kinerja 146, 30 %

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam katagori tercapai. Pencapaian keberhasilan penurunan AKB ini karena berbagai faktor diantaranya :

- Adanya Kegiatan Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi

Risiko Tinggi (Gerdaristi) yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk;

- Adanya keberlanjutan Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk;
- Monitoring dan Evaluasi berkala baik di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas;
- Peningkatan kulitas pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas PONED;
- Rumah Sakit PONEK berfungsi dengan baik;
- Adanya regulasi yang mengatur kepatuhan petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibudan anak;
- Terjalinnya kerja sama lintas program dan lintas sektorterkait dalam menurunkan AKB di Kabupaten Nganjuk;
- Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah kabupaten Nganjuk baik berupa dana maupun kebijakan-kebijakan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Nganjuk.

d) Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat.

- Target Balita Stunting 15%
- Jumlah balita (0-59 bulan) 59.375 anak, jumlah balita (0-59 bulan) yang diukur tinggi dan berat badan pada tahun 2021 51.974 anak, jumlah balita stunting 6.185 anak dan didapatkan angka balita stunting sebesar 11,9%
- Realisasi 11,9%
- Capaian kinerja 126%

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam katagori "**tercapai**". Keberhasilan pancapaian target di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA), dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya;
- Program Pendampingan Balita Gizi Buruk (Gentasibu).

e) *Universal Child Immunization* (UCI)

Indikator *Universal Child Immunization* (UCI) untuk menunjukkan desa/kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi anak secara lengkap. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan UCI adalah melalui Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya imunisasi anak secara lengkap.

- Target desa UCI sebesar 90%
- Jumlah desa UCI tahun 2021 di Kabupaten Nganjuk 251 desakelurahan dengan jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 284.
- Realisasi 88,38 %
- Capaian kinerja 98,20%

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori tercapai.

f) Tuberculosis (TB)

Salah satu keberhasilan indikator program Tuberculosis adalah jumlah pasien Tuberculosis semua kasus yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus Tuberculosis yang diobati dan dilaporkan (success rate). Berdasarkan RPJMD 2018-2023, indikator keberhasilan tidak lagi menggunakan success rate tetapi prevalensi penderita per 100.000 penduduk.

- Target 50,62%
- Realisasi 64,33
- Capaian kinerja 78,68%

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori belum tercapai.

g) *Humman Immunodeficiency Virus* (HIV)

Adalah seseorang yang hasil pemeriksaan HIV positif dengan alat pemeriksaan reagen rapid test. Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) HIV, meliputi edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, skrining yang dilakukan dengan pemeriksaan test cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Capain indikator dengan formulasi penghitungan jumlah seluruh kasus dibagi jumlah penduduk dalam satu kurun waktu.

- Target 0,01%
- Realisasi 0,01245%
- Capaian Kinerja 80,32%

Capaian tersebut jika dibanding dengan target RPJMD masuk dalam kategori tercapai.

Dari ketujuh indikator tersebut capaian kinerja urusan kesehatan adalah **100%** yang masuk dalam kategori "**tercapai**". Hal tersebut berarti Pemerintah dari Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

d. Laju Petumbuhan Penduduk

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, target indikator tujuan tahun 2021 yang akan dicapai dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk	Prosentase laju pertumbuhan penduduk	0,32	0,23*	139,13*

Data kependudukan terdiri dari beberapa kumpulan data, antara lain :

- Data migrasi masuk
- Data migrasi keluar
- Jumlah kelahiran
- Jumlah kematian

LPP pada tahun 2020 sebesar 0,23%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,23%, sehingga dapat mempertahankan LPP dengan persentase yang sama. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nganjuk tercapai sebesar 139,13%. Pencapaian indikator Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk didukung dengan parameter berikut :

1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total.

   Jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 WUS (15-49) dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

   Dengan rumus sebagai berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^{7} ASFRi$$

   Dimana :

   ASFRi : angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur

   i = 1 : kelompok umur 20-24 tahun

   i = 7 untukkelompok umur 45-49 tahun.

2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

   Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

3. Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan.

   Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok kegiatan yang PUS}}{\text{Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok}} \times 100\%$$

Adapun hasil pencapaian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas”

   1.1. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total.

   TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Data dan capaian TFRTahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Kelahiran : 13.395
- Jumlah Wanita Usia Subur (usia 15-49) : 268.231
- Realisasi *Total Fertility Rate* : 1,83 %
- Target *Total Fertility Rate* : 2,00 %
- Capaian *Total Fertility Rate* : 109,29%

Sampai dengan Tahun 2021, indikator prosentase pencapaian Total Fertility Rate tercapai sebesar 109,29 %. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

1.2. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu). Data dan capaian CPR Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah peserta KB aktif : 144.924
- Jumlah pasangan usia subur : 184.713
- Realisasi *Contraceptive Prevalence Rate* : 78,46 %
- Target *Contraceptive Prevalence Rate* : 80,02 %
- Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* : 98,05%

Selanjutnya untuk indikator Capaian *Contraceptive Prevalence Rate* tercapai sebesar 98,05%. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk.

1.3. Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan. Data dan capaian Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah anggota kelompok kegiatan yang PUS : 64.661
- Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan : 84.484
- Realisasi Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan : 76,54%
- Target Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan : 87,00 %
- Capaian Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan : 87,97%

Indikator prosentase keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan tahun 2021 tercapai sebesar 87,97%. Keluarga yang ber-KB yang mengikuti kelompok kegiatan yang mampu menjalankan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) melalui kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).

Dengan melihat pencapaian indikator pada urusan kesehatan dan pengendalian penduduk maka rata-rata capaian sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk" sebesar 98,44% termasuk dalam kategori **"tercapai"**. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berhasil Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk.

e. Meningkatnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sasaran Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri 2 indikator kinerja yaitu :

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG mengukur kesenjangan tingkat kesejahteraan antara laki-laki dengan perempuan.

Aspek kesejahteraan ini diukur dari indeks pendidikan (lama sekolah dan harapan lama sekolah), indeks kesehatan (usia harapan hidup), serta indeks daya beli (pengeluaran/kapita). IPG Kabupaten Nganjuk tahun 2021 belum di-*release* oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, sedangkan target tahun 2021 sebesar 94,38 sedangkan capaian pada tahun 2020 sebesar 93,26.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.Indeks pemberdayaan gender (IDG) dimaksudkan untuk mengukur peran serta perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,keanggotaan dalam DPRD serta pengambil keputusan, maupun peran serta dalam berbagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Proyeksi realisasi IDG tahun 2021 yaitu sebesar 67,16. Sementara itu capaian untuk Tahun 2021 belum bisa didapatkan datanya karena belum di-release oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. Adapuncapaian untuk Tahun 2020 adalah sebesar 69,90. Meskipun capaian kinerjanya termasuk tercapai, tetapi masih ada keanggotaan perempuan dalam DPRD sebesar 24% dan belum mencapai 30%. Begitu pula perempuan sebagai pengambil keputusan/ perempuan sebagai pimpinan organisasi masih belum mencapai 30% termasuk kepala desa, lurah, camat, kepala perangkat daerah.

4. **Misi 4** : ***"Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Lokal Serta Sektor Produktif Lain Berbasis Teknologi Tepat Guna"***

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian dan potensi lokal.

Sasaran yang ingin dicapai :

4.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian Dan Perikanan,Serta Kesejahteraan Petani

Sasaran meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani terdiri 2 indikator kinerja yaitu :

4.1.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Sasaran	IndikatorSasaran	Capaian Kinerja		
		Target	RealisasI	Capaian
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	3,80%	2,35% *)	61,84 % *)

Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Sasaran pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan. PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) sebagai berikut:

No	Subsektor Usaha	PDRB Tahun (dalam Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021 *)
1.	Tanaman Pangan	2,746,282.10	2.684.688,9	2.753.118,5	2.843.987,90	2.651.242,20
2.	Tanaman Hortikultura Semusim	864,934.10	966.907,3	1.016.397,3	1.105.715,30	1.244.053,
3.	Perkebunan Semusim	250,382.40	278.769,8	286.697,6	308.628,4	351.064,00
4.	Tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya	256,465.00	285.807,8	299.778,4	303.355,0	321.667,10
5.	Perkebunan Tahunan	190,273.00	192.453,0	203.218,1	205.020,8	220.190,10
6.	Peternakan	1,868,115.90	2.145.379,4	2.252.713,8	2.309.683,8	2.410.585,10
7.	Jasa Pertanian dan Perburuan	90,709.30	89.721,6	92.750,8	95.186,8	97.567,00
8.	Perikanan	245.534,3	262.675,1	266.764,1	275.887,1	298.875,30
	Jumlah	**6.699.991,0**	**6.906.402,8**	**7.171.438,4**	**7.767.690,52**	**7.950.246,10**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara
*** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp. 7,950 triliun, meningkat kurang lebih Rp. 183 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti angka pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian dan Perikanan year-on-year 2020-2021 mencapai 2,35%. Dibandingkan dengan target pertumbuhan tahunan sebesar 3,80%, maka

berdasarkan realisasi untuk tahun 2021 tersebut, sasaran sudah tercapai dengan nilai capaian sebesar 61,84%.

Dari capaian tersebut, kontribusi subsektor terbanyak dihasilkan oleh subsektor tanaman pangan (38,19%), subsektor peternakan (31,01%) dan subsektor tanaman hortikultura semusim (14,85%). Pertumbuhan PDRB subsektor pertanian dan perikanan selama kurun waktu 2020-2021 menunjukkan di masa pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki resiliensi terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dimana di saat sektor lain mengalami kontraksi pertumbuhan, subsektor pertanian dan perikanan menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama untuk subsektor pertanian tanaman pangan.

4.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan Dan Hortikultura)

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021 dengan target 104,10% terealisasi 100,34% . Hal ini berarti capaian kinerja indikator NTP mencapai 96,39%. Kontribusi NTP terbesar diperoleh dari tanaman pangan (100,88%) serta dari sub sektor peternakan (107,10%), yang dapat diartikan bahwa nilai penerimaan petani tanaman pangan dan peternak sebesar masing-masing 100,88% dan 107,10% daripada nilai pengeluaran yang ditanggung oleh petani tersebut.

Di sisi lain, komoditas padi dan jagung memberikan kontribusi terbesar secara agregat bagi pencapaian NTP Kabupaten Nganjuk, dimana masing- masing memberikan kontribusi sebesar 60,69% dan 24,53% dikarenakan kedua komoditas ini mempunyai luas panen yang lebih besar daripada komoditas lainnya.

Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut, hal-hal yang menjadi fokus Dinas Pertanian antara lain adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian serta upaya penurunan kasus/kejadian penyakit hewan menular; yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Produksi Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

1) Produksi Tanaman Pangan

- Produksi Padi pada tahun 2021 sebesar 491.961,21 ton atau 110,92% dari target produksi tahun 2021 sebesar 443.546,93,00 ton. Capaian produksi padi ini mengalami

penurunan produksi 9,71% dibanding tahun 2020 yang sebesar 544.899,67 karena pengurangan luas panen.

- Produksi Jagung pada tahun 2021 sebesar 193.990,82 ton atau 85,75% dari target produksi tahun 2021 sebesar 226.231,58 ton. Capaian produksi Jagung ini mengalami penurunan 13,92% dibanding produksi Jagung Pada tahun 2020 sebesar 222.904,69 ton.
- Produksi Kedelai tahun 2021 sebesar 9.196,71 ton atau 99,51% dari target sebesar 9.242,35 ton.
- Produksi bawang merah tahun 2021 sebesar 193.668,6 ton atau 124,57% dari target tahun 2021 sebesar 155.466,97 ton. Capaian produksi bawang merah ini mengalami kenaikan 9,27% dibanding produksi tahun 2020 sebesar 177.232,2 ton.
- Produksi cabe rawit tahun 2021 sebesar 7.448,6 ton atau 128,14 % dari target tahun 2021 sebesar 5.812,69 ton. Capaian produksi cabe rawit mengalami penurunan 19,27% dibanding produksi tahun 2020 sebesar 9.113,3 ton.
- Produksi tebu tahun 2021 tercapai sebesar 16.790,02 ton atau 99,96 % dari target tahun 2021 sebesar 16.795,83 ton. Capaian produksi tebu mengalami kenaikan 0,002% dibanding produksi tebu tahun 2020 sebesar 16.789,68 ton.
- Produksi tembakau tahun 2021 tercapai sebesar 1.078 ton atau 62,68% dari target tahun 2021 sebesar 1.719,83 ton. Capaian produksi tembakau mengalami penurunan 37,32% dibanding produksi tahun 2020 sebesar 1.717,97 ton.
- Produksi daging tahun 2021 tercapai sebesar 3.649.972 ton atau 91,20% dari target tahun 2021 sebesar 4.001.789 ton. Capaian produksi daging mengalami kenaikan 0,87% dibanding produksi tahun 2020 sebesar 3.618.453 ton.

b. *Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular*

Jumlah kejadian penyakit/kasus pada tahun 2021 adalah 7.568 kasus dan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2020) adalah 7.889 kasus, sehingga terjadi penurunan

angka kasus/kejadian sebesar 4,07%. Sasaran "Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan Perikanan, serta kesejahteraan petani" dengan nilai capaian 96,62% berdasarkan skala ordinal predikat capaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **"tercapai"**.

4.2 Meningkatnya Volume Sektor Usaha Industri dan Perdagangan

Sasaran Meningkatnya Volume Sektor Usaha Industri dan perdagangan terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

4.2.1 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Urusan Industri

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri	4,50	10,70% *	237,77% *

Pada Tahun 2021 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri dengan target sebesar 4,50%. Dari target kinerja tersebut telah terealisasi sebesar 10,70% atau dengan capaian kinerja sebesar 237,77% .

- PDRB industri tahun 2021 : 4.188.847.00
- PDRB industri Tahun 2020 : 3.783.711.83
- Target Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Tahun 2021 : 4,50%
- Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Tahun 2021 : 10,70 %
- Capaian Kinerja Tahun 2021 : 237,77%

Indikator sasaran "meningkatnya volume usaha sektor industri" sebesar 237,77%, berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**".

4.2.2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan	Persentase PertumbuhanPDRB sektor perdagangan	20,45	8,26*	40,39%*

Pada Tahun 2021 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dengan target sebesar 20,45%. Dari target kinerja tersebut telah terealisasi sebesar 8,26% atau dengan capaian kinerja sebesar 40,39 %.

- PDRB sektor Perdagangan Tahun 2021 : 5.636.348.03
- PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2020 : 5.206.089,51
- Target Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Tahun 2021 : 20,45%
- Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB sector Perdagangan Tahun 2021 : 8,26%*
- Capaian Kinerja Tahun 2021 : 40,39%*

Indikator sasaran "meningkatnya volume usaha sektor perdagangan" rata-rata dibawah **60%** berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tidak tercapai"**. Raihan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebesar 8,26% belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 20,45%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Dampak pandemi membawa penurunan kegiatan ekonomi (perdagangan) dan konsumsi. Namun demikian, dibanding tahun 2020, capaian tahun 2021 telah tumbuh jauh lebih baik dimana pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan minus 3,77%.

4.3 Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat

Capaian sasaran indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	IndikatorKinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,10	4,98	42,16

Presentase TPT Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar 4,98% mengalami kenaikan sebesar 0,18 % dibanding tahun 2020 dimana persentase TPT sebesar 4,80%. Jumlah pengangguran Tahun 2021sebesar 26.982 orang dengan angkatan kerja sebanyak 515.053 orang. Realisasi Tingkat pengangguran Terbuka pada tahun 2021 ini juga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,1%. Namun demikian Persentase TPT di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 masih lebih kecil jika dibandingkan dengan angka TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 5,74 % dan TPT nasional di angka 6,49%.

Adanya pandemi Covid 19 menjadi penyebab utama kenaikan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 di kabupaten nganjuk, dimana

- Terjadi PHK sebesar 1.311 orang dirumahkan
- Kesulitan penempatan kerja, akibat kelesuan iklim bisnis banyak perusahaan tidak mengembangkan produksi sehingga tidak menambah karyawan.
- Beberapa kegiatan untuk mendukung penurunan TPT, harus mengalami *refocusing* angaran sebesar 60% sehingga tidak dapat dilaksanakan, diantaranya :
    1. Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Bursa Kerja AKAD;
    2. Pelatihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Berbasis 5R/5S;
    3. Pelatihan Potong Rambut;
    4. Pembangunan Balai Latihan Kerja; dan
    5. Job Fair (tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan sudah direncanakan akhir tahun namun dalam perjalanan waktu masihadanya covid-19).

Sasaran **“**Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat” dengan nilai capaian 42,16% berdasarkan skala ordinal predikat capaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **“tidak tercapai”.** Kondisi ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk masih mempunyai pekerjaan yang sangat besar dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan sehingga perlu koordinasi yang intensif dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang ramah investasi yang pada akhirnya berujung pada pengurangan pengangguran secara maksimal.

4.4 Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kondusif

Indikator sasaran meningkatnya iklim investasi adalah Nilai Investasi Daerah dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja		
		Target (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Capaian %
Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Investasi Daerah	2.284.790	3.305.340	144,67%
Rata-rata Capaian Kinerja				**144,67%**

Analisis atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : Realisasi Investasi PMDN/PMA yang ditanamkan/ diinvestasikan merupakan indikator yang menunjukkan meningkatnya investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk. Capaian Kinerja Tahun 2021 untuk PMDN sebagai berikut:

- Target realisasi Investasi tahun 2021 : 2.284.790.000.000
- Realisasi Investasi Tahun 2021 : 3.305.345.722.393
- Capaian Kinerja Tahun 2021 : 144,67%

Adapun perbandingan capaian untuk PMDN tahun 2020 dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Realisasi Investasi tahun 2020 : 3.616.846.679.210
- Realisasi Investasi Tahun 2021 : 3.305.345.722.393

Terdapat penurunan nilai investasi di Tahun 2021 sebesar Rp. 311.500.956.817,- atau penurunan tingkat pertumbuhan realisasi investasi 8,61%. Penurunan nilai investasi ini sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 dimana dampaknya dirasakan oleh semua aspek kehidupan, baik kesehatan maupun aspek perekonomian. Kegiatan investasi di Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2021 masih didominasi investor dalam negeri dan diharapkan di tahun-tahun yang akan datang akan mampu mengundang investor asing untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Nganjuk.

Indikator Sasaran/Kinerja dalam sasaran "meningkatnya realisasi Investasi di Kabupaten Nganjuk" pada urusan Penanaman Modal Daerah berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut mencapai 144,67% termasuk dalam kategori **"tercapai"**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil meningkatkan investasi di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditargetkan di tahun Anggaran 2021.

4.5 Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan

Pencapaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Nganjuk dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,6292	0,73197	116,33
Rata-rata capaian kinerja				**116,33**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkani mplementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.Sumber data dalam pengambilan data dilakukan di seluruh Desa dengan harapan mendapatkan Data dan Informasi sesuai fakta yang ada di Desa.

Dalam Penentuan Status IDM, klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,70724 Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
4. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Bahwa Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan status desa mandiri yang semula 5 desa pada Tahun 2020 menjadi 16 desa, desa maju yang semula 92 desa menjadi 136 desa, dan desa berkembang berkurang yang semula 167 desa menjadi 112 desa.

Sasaran "Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan pedesaan" menghasilkan nilai capaian 116,33%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut dalam kategori "**tercapai**". Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan kemandirian desa dan pemberdayaan kawasan pedesaan.

5. **Misi 5** : ***"Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata"***

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor unggulan daerah yang didukung kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal.

Sasaran yang ingin dicapai :

5.1 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

Sasaran "Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah", diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah kunjungan wisatawan baik regional maupun mancanegara baik dewasa maupun anak-anak di obyek wisata unggulan (obyek daya tarik wisata)baik yang berestribusi maupun yang tidak beretribusi, yaitu : semua lokasi wisata alam, wisata buatan, wisata religi dan wisata budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2021. Indikator tersebut juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan datang ke Kabupaten Nganjuk. Capaian kinerja dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah wisatawan Tahun 2020 (orang) : 184.739
- Target Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Tahun 2021 : 5 %
- Realisasi jumlah wisatawan data Tahun 2021 (orang) : 193.092
- Persentase realisasi jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 4,33%
- Capaian Kinerja Tahun 2021 : 86,60%

Jumlah kunjungan di lokasi wisata di Tahun 2021 sebanyak 193.092 orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebanyak 184.739 orang. Jika dibandingkan dengan tahunn 2020, kunjungan wisata tahun 2021 naik 8.353

orang, dengan persentase 4,33%. Realisasi jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,00%, sehingga capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 86,60%.

Kendala pencapaian sasaran kinerja dengan indikator Persentase peningkatan kunjungan wisatawan tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pada tahun 2021 sering terjadi penutupan pada semua obyek wisata dikarenakan adanya Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengnendalian Covid 19 serta peraturan peraturan lain tentang penutupan destinaasi wisata. Dari sasaran "Meningkatnya daya saing pariwisata daerah", rata-rata capaian kinerja 86,60% atau dapat dikategorikan **"tercapai"**.

5.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan, Kesenian, dan Tradisi Lokal Daerah

Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnyapelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokaldaerah	1	Persentase benda, situs, dankawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	29 %	29,18 %	100,62
	2	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokalyang dilestarikan (%)	28 %	29,73 %	106,18
Rata-Rata Capaian Kinerja					**103,4%**

Analisis terhadap pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Capaian kinerja persentase benda, situs, dan kawasan cagar budayayang dilestarikan Tahun 2021, dihitung berdasarkan :
   - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Tahun 2021 = 89 buah
   - Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 = 305 buah

   Target dari persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2021 adalah 29% terealisasi sejumlah 29,18 % sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,62%. Jika dibandingkan dengan tahun

2020, capaian kinerja turun dari 101,89% menjadi 100,62% turun (1,27%).

2. Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Capaian kinerja persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Tahun 2021, dihitung berdasarkan :
   - Jumlah warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan pada Tahun 2021 = 11
   - Jumlah warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada diKabupaten Nganjuk Tahun 2021= 37

   Target dari persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan Tahun 2021 adalah 28% terealisasi sejumlah 29,73% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 106,18%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, capaian kinerja turun dari 112,63% menjadi 106,18% turun (6,45%).

   Sasaran "Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian dan tradisi lokal daerah" menghasilkan nilai capaian 103,4%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan pelestarian kebudayaan,kesenian dan tradisi lokal daerah.

6. **Misi 6** : **"*Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana*"**

Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai :

5.3 Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

a. Persentase Jembatan Di Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Prosentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakanupaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan maupun peningkatanjembatan untuk memperlancar perekonomian antar desa maupun kecamatan. Analisis dan

evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah jembatan Kabupaten Nganjuk 661Unit
- Jumlah jembatan dalam kondisi mantap (dimensi dan struktir sudah standard Bina Marga) di Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2021 356 Unit
- Jumlah jembatan perlu pelebaran (kondisi baik) di Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2021 284 Unit
- Jumlah jembatan yang perlu dibongkar total (kondisi rusak) di Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2021 21 Unit
- Jumlah jembatan yang umur konstruksinya berkurang (umur konstruksi lebih dari 25 tahun) di Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2021 198 Unit
- Jumlah target jembatan di jalan Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik pada tahun 2021 597 Unit
- Persentase target jembatan di jalan Kabupaten Nganjuk dalm kondisi baik pada tahun 2021 76,70 %
- Rekapitulasi jumlah jembatan yang mengalami penyusutan di Kabupaten Nganjuk dalam akhir tahun 2021 4 Unit
- Realisasi jumlah pembangunan/pemeliharaan jembatan di Kabupaten Nganjuk dalam tahun 2021 9 Unit
- Total rekapitulasi jumlah jembatan di Kabupaten dalam kondisi baik s/d akhir tahun 2021 589 Unit
- Presentase realisasi jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 89,10 %
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2021 116,17 %

Keberhasilan ini disebabkan karena terselesainya dokumen perencanaan yang tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa serta pembangunan jembatan dapat selesai sesuai target.

b. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Fungsional

Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional merupakan upaya pemerintah daerah dalam pemeliharaan, peningkatan maupun pembangunan jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya

sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Panjang jalan Kabupaten Nganjuk 1.153,482 Km
- Panjang target jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2021 1.038,134 Km
- Persentase target jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2021 66,00 %
- Realisasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional s/d akhir tahun 2021 1.004,358 Km
- Total panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak s/d tahun 2021 149,124 Km
- Persentase realisasi jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional pada tahun 2021 87,07
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2021 131,92 %

Peningkatan ini disebabkan karena komitmen yang kuat dari pihak- pihak terkait, baik dari internal (Dinas PU dan Penataan Ruang) serta eksternal (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Penyedia jasa konstruksi maupun konsultan perencana/pengawas dan Masyarakat)

c. Persentase Bangunan Pelayanan Publik Yang Berfungsi Baik

Prosentase bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memelihara dan menjaga kondisi Bangunan Gedung Negara sehingga layak untuk dipergunakan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah seluruh bangunan gedung fasilitas umum tahun 2021 96 unit
- Jumlah target bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2021 87 unit
- Persentase target bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2021 35,36 %
- Realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik sampai akhir tahun 2020 73 unit
- Realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang 10 unit

berfungsi baik pada tahun 2021

- Total realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik sampai dengan akhir tahun 2021 — 83 unit
- Persentase realisasi bangunan gedung fasilitas umum yang berfungsi baik pada tahun 2021 — 86,46 %
- Persentase capaian kinerja pada tahun 2021 — 244,30 %

Peningkatan ini disebabkan karena komitmen yang kuat dari pihak- pihak terkait, baik dari internal (Dinas PU dan Penataan Ruang) serta eksternal (Penyedia jasa konstruksi maupun konsultan perencana/pengawas).

d. Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Sistem Kinera Sistem Irigasi merupakan salah satu indikator yang menyatakan luas jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk dalam kondisi baik. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Total luas jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk 14.951 Ha
- Jumlah target luas jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2021 10.781,17 Ha
- Persentase target luas jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2021 72,11 %
- Realisasi luas jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2021 11.484,88 Ha
- Prosentase luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2021 76,817 %
- Persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 106,53 %

Pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut diatas didukung dengan hasil-hasil program kegiatan pembangunan Bidang Perencanaan, Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, serta Bina Jasa Konstruksi dan Operasional. Hasil-hasil pembangunan s/d akhir tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
1.	Perencanaan Jalan, Jembatan, Fasilitas Umum, dan Saluran Irigasi	Dokumen	32
2.	Perencanaan kegiatan fisik jalan, jembatan, fasilitas umum dan saluran irigasi	Dokumen	131
3.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	m	11.225
4.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	m	106,8

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
5.	Pembangunan Jalan	m	39.837,9
6.	Pelebaran Jalan Menambah Jalur	m	3.757
7.	Rekonstruksi Jalan	m	19.843,1
8.	Rehabilitasi Jalan	m	20.998,44
9.	Pembangunan Jembatan	m	60
10.	Rehabilitasi Jembatan	m	18
11.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	m	28,2
12.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	m/ unit	5.351/ 2
13.	Pembangunan Tanggul Sungai	m	763
14.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	m	3.274
15.	Normalisasi/ Restorasi Sungai	m	15621

e. Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan system perpipaan dan non perpipaan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal.	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan.	83,36	90,98	109,14%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**109,14%**

Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai sarana penunjang pembangunan perekonomian daerah. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 (jiwa) 1.554.795
- Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2021 1.414.611
- Target persentase jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2021 83,36%
- Realisasi persentase jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system 90,98%

perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2021

- Capaian kinerja Tahun 2021 109,14%

Adapun rincian capaian sampai tahun tahun 2021 sebagai berikut :

Realisasi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2021 1.414.611

a. Dengan sistem perpipaan 357.941
b. Dengan sistem non perpipaan 1.056.670

Dengan capaian kinerja sebesar 109,14%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan dan non perpipaan sampai Tahun 2021 termasuk kategori **"Sangat Baik"**.

f. Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/kawasan/kota

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas kawasan/ kota	64,03	38,14	59,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**59,57%**

Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/ kawasan/ kota merupakan salah satu indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun dan menyediakan unit pengolah setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau sistem pengolahan terpusat. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 (jiwa) 1.554.795
- Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2021 589.651
- Persentase target penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2021 64,03%
- Realisasi persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota 38,14%

sampai Tahun 2021

- Capaian kinerja Tahun 2021 59,57%

Dengan capaian kinerja sebesar 59,57%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/ kawasan/ kota sampai Tahun 2021 termasuk kategori **"cukup"**.

g. Persentase Pemenuhan Drainase Lingkungan

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyainfrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	Persentase pemenuhan drainase lingkungan	89,69	79,84	89,02%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**89,02%**

Persentase pemenuhan drainase lingkungan merupakan indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun dan menyediakan drainase bagi lingkungan perumahan dalam rangka pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk perkotaan Tahun 2021 (jiwa) 407.967
- Jumlah penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2021 325.739
- Persentase target penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2021 89,69%
- Realisasi persentase penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2021 79,84%
- Capaian kinerja Tahun 2021 89,02%

Dengan capaian kinerja sebesar 89,02%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk yang terlayani drainase lingkungan sampai Tahun 2021 termasuk kategori **"baik"**.

h. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jalan Lingkungan.

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnyainfrastruktur pekerjaan umum,	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan	79,45	76,24	95,96%

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
perumahan rakyat dan perhubungan yang handal.	lingkungan			
Rata-Rata Capaian Kinerja				**95,96%**

Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan merupakan indikator yang menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam membangun dan menyediakan jalan bagi lingkungan perumahan dalam rangka pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Panjang jalan yang dibutuhkan (km) 2.736
- Realisasi panjang jalan yang dibangun sampai Tahun 2021 2.086
- Persentase target jalan lingkungan sampai Tahun 2021 79,45%
- Persentase realisasi jalan lingkungan sampai Tahun 2021 76,24%
- Capaian kinerja Tahun 2021 95,96%

Dengan capaian kinerja sebesar 95,96%, maka indikator kinerja persentase jumlah penduduk yang terlayani kebutuhan jalan lingkungan sampai Tahun 2021 termasuk kategori "**baik**".

i. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal	Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,46	86,62	93,68%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**93,68%**

Persentase ketersediaan rumah layak huni merupakan indikator yang menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah rumah s.d akhir tahun 2021 (unit) 325.293
- Jumlah rumah layak huni sampai Tahun 2021 (unit) 281.761

- Persentase target rumah layak huni sampai Tahun 2021 92,46%
- Persentase realisasi rumah layak huni sampai Tahun 2021 86,62%
- Capaian kinerja Tahun 2021 93,68%

Dengan capaian kinerja sebesar 93,68%, maka indikator kinerja persentase jumlah rumah layak huni sampai Tahun 2021 termasuk kategori "**baik**".

j. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas.

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	15	32,71	218,07%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**218,07%**

Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan indikator dalam rangka menciptakan transportasi di Kabupaten Nganuk yang aman dan tertib. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2018 (tahun dasar) 743
- Jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2021 500
- Persentase target penurunan kecelakaan lalu lintas Tahun 2021 15%
- Persentase realisasi penurunan kecelakaan lalu lintas Tahun 2021 32,71%
- Capaian kinerja Tahun 2021 218,07%

Dengan capaian kinerja sebesar 218,07%, maka indikator kinerja persentase penurunan kecelakaan lalu lintas Tahun 2021 termasuk kategori "**sangat baik**". Sasaran "Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal" menghasilkan nilai capaian 126,43%. Dengan demikian berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran tersebut dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal di Kabupaten Nganjuk.

5.4 Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Prosentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata ruang tahun 2021	153.058.800 m2
Luas target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2021	123.411.310 m2
Persentase target pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2021	80,63 %
Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang sampai akhir tahun 2020	124.523.018 m2
Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2021	135.245 m2
Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang s/d akhir tahun 2021	124.658.263 m2
Persentase realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang pada tahun 2021	81,44 %
Capaian kinerja Tahun 2021	101%

Keberhasilan ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang. Sasaran “Meningkatnya Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah” menghasilkan nilai capaian 101% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **“tercapai”**. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan Ketaatan Pemanfaatan Ruang Daerah sebagaimana yang ditargetkan dalam Tahun 2021.

5.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam terdiri dari 6 Indikator kinerja antara lain :

a. Indeks Kualitas Air

   Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimia dan biologis. Kualitas air menunjukkan kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air sungai menjadi ukuran standard terhadap kondisi kesehatan ekosistem air sungai dan kesehatan makhluk hidup lainnya. Perhitungan capaian kinerja Tahun 2021 adalah :

Target indeks kualitas air tahun 2021	69
Realisasi indeks kualitas air tahun 2021	54
Persentase capaian indeks kualitas air tahun 2021	78,26%

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air badan air sebanyak 30 titik yang terdiri dari 13 titik pada sungai dan 7 waduk. Hasil pengujian menunjukan dari 30 lokasi air badan air yang diambil sampelnya 9 titik memenuhi baku mutu air kelas II dan sisanya berada dalam kondisi cemar ringan. Waktu sampling dilakukan pada bulan pertengahan bulan November pada saat awal musin penghujan dan kondisi air sungai masih keruh karena erosi dan baru terisi air serta akibat pembuangan sampah rumah tangga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.

b. Indeks Kualitas Udara

Untuk penghitungan indek kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan CO2. Parameter CO2 mewakili emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan NO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lain. Dari delapan lokasi yang dipantau kualitas udara ambien diperoleh nilai rerata parameter NO2 dan SO2 masing-masing sebesar 6,079 µg/Nm3 dan 23,831 µg/Nm3. Perhitungan indeksnya adalah dengan membanding nilai rerata terhadap standard **European Union (EU) Directives**. Sehingga diperoleh indek kualitas udara mosel EU sebesar 0,675. Apabila nilai indek >1 berarti kualitas udara melebihi standar EU. Sebaliknya pabila nilai indek ≤ 1 maka kualitas udara memenuhi standar EU. Selanjutnya indek model EU dikonversikan menjadi indek kualitas udara (IKU) sehingga diperoleh nilai IKU sebesar 78,84. Perhitungan capaian kinerja Tahun 2021 adalah :

Indeks kualitas udara Tahun 2020	68,03
Target indeks kualitas udara 2021	83,9
Realisasi indeks kualitas udara 2021	78,84
Persentase capaian indeks kualitas udara	92,86 %

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan.

Indeks tutupan hutan dilakukan dengan menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder, kemudian dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Perhitungan capaian kinerja tahun 2021 adalah :

Luas hutan (km2)	53.595,15
Luas wilayah Kabupaten Nganjuk (km2)	122.433,15
Target indeks kualitas tutupan lahan 2021	75,51
Realisasi indeks kualitas tutupan lahan 2021	54,99
Persentase capaian indeks kualitas tutupan lahan	72,82 %

Indeks tutupan lahan dihitung berdasarkan besaran indeks tutupan hutan. Luas hutan di Kabupaten Nganjuk meliputi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat, serta hutan kota dengan luas keseluruhan sebesar 53.595,15 km2 sedangkan luas wilayah 122.433,15 km2 , Persentase luas tutupan hutan/lahan 43,77%.

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks kualitas air	54	30%	16,20
2	Indeks kualitas udara	78,84	30%	23,65
3	Indeks Tutupan Lahan	54,99	40%	22,00
IKLH Kabupaten				61,85

Sasaran "**Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam**" menghasilkan nilai capaian **81,31%** berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam sebagaimana yang ditargetkan dalam Tahun 2021.

d. Persentase Cakupan Penanganan Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perkiraan produksi sampah tahun 2021 (ton)	161.169,69
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021(ton)	119.504,02
Realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021 (ton)	114.881,76
Target cakupan penanganan sampah rumah tangga dan	74%

sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021	
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 2021	71,28%
Persentase capaian Tahun 2021	96,32 %

Dengan capaian kinerja sebesar 96,32 %, maka indikator kinerja persentase cakupan penanganan persampahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk kategori **"Sangat Baik"**.

e. Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui 3R

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perkiraan produksi sampah tahun 2021 (ton)	161.169,69
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021 melalui 3 R tahun 2021 (ton)	38.758,06
Realisasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021 (ton)	36.279,30
Target Persentase pengurangan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021	24%
Target Persentase pengurangan sampah rumah tangga dansampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2021	22,51%
Persentase capaian Tahun 2021	93,79 %

Uraian data pengurangan sampah melalui :

1. Pembatasan timbulan sampah (ton)	21.139,28
2. Pemanfaatan kembali sampah (ton)	10.606,91
3. Pendaur ulang sampah (ton)	4.533,15
BSU (ton)	16,06
BSI (ton)	24,48
TPS 3R KSM (ton)	473
Pengepul (ton)	4.019,60
Jumlah (ton)	36.279,30

f. Persentase RTH Perkotaan

Peningkatan Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan merupakan indikator yang menunjukkan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memilliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, fungsi sosial-ekonomi, bahwa RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota, sedangkan fungsi evakuasi adalah RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa jumlah RTH di setiap kota sebesar 30% dari luas kota.

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk (Ha)	28.950.710
Luas RTH perkotaan yang seharusnya ada (Ha)	8.685.21
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2020 (Ha)	4.556,11
Luas RTH perkotaan sampai tahun 2021 (Ha)	4.556,55
Target RTH perkotaan tahun 2021	54,24%
Realisasi RTH perkotaan tahun 2021	52,46 %
Capaian Kinerja Tahun 2021	96,72%

Pada tahun 2021 RTH Perkotaan yang dibangun sebagai berikut :

- Hutan Kota (Ha)	0
- Taman Kota (Ha)	0
- Sempadan sungai dan jalan (Ha)	0,44

5.6 Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana tahun 2021” sebagai berikut :

Sasaran RPJMD		**Pengukuran Kinerja**		
Uraian	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	100%	100%	100%

Sasaran ini menggambarkan upaya penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Analisis capaian indikator "Cakupan penanganan penanggulangan bencana" sebagaimana uraian berikut :

Jumlah seluruh bencana yang terjadi tahun 2021	134 kejadian
Realisasi Cakupan penanganan penanggulangan bencana	100%
Target kinerja tahun 2021	100%
Capaian kinerja tahun 2021	100%

Sasaran "Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana" menghasilkan nilai capaian 100 % berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**", kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil dalam upaya penanganan penanggulangan bencana di Tahun 2021.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, di samping didanai dari APBD juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBN. Dana tersebut dialokasikan melalui penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Alokasi Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Nganjuk meliputi :

A. Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

   Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk adalah :

   a. Surat Pengesahan DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-018.03.4.059178/2021 tanggal 30 April 2021
   b. Surat Pengesahan DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-018.08.3.059004/2021 tanggal 30 April 2021
   c. Surat Pengesahan DIPA TA. 2021 Nomor. SP-DIPA-018-06.4.059181/2021 tanggal 23 November 2020

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

   Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk diberikan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan pelaksana Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang dilimpahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yang meliputi :

a. Bidang Urusan Tanaman Pangan

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (P2HP), Pengawalan, Pembinaan, Pendampingan dan Monev Sarana Pasca Panen

2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan (bantuan sarana kedelai 695 ha, porang 1 ha)
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan (bantuan benih padi 749 ha)

3) Program Dukungan Manajemen

- Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

b. Bidang Urusan Prasarana dan Sarana Pertanian

1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

- Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
- Kegiatan Pengelolaan Sintem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
- Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

2) Program Dukungan Manajemen

- Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

c. Bidang Urusan Peternakan

1) Program peningkatan produksi sapi dan kerbau komoditas andalan negeri (SIKOMANDAN)

Kegiatan SIKOMANDAN

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri sebesar 100%, capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar 100%, capaian kinerja Program Dukungan

Manajemen sebesar 100%, capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, capaian kinerja Program Dukungan Manajemen dan capaian kinerja Program Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) sebesar 100%.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan dapat dilihat pada tabel di bawah.

3.1.2 Realisasi

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pertanian kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan	Surat Pengesahan DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-018.03.4.059178/2021 tanggal 30 April 2021	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	Kab. Nganjuk	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	**14.600.000**	**14.600.000**	**100**	**1 Paket**	**100**	
			Kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan (P2HP), pengawalan, pembinaan, pendampingan dan monev sarana pasca panen			14.600.000	14.600.000	100	1 Paket	100	
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			**53.100.000**	**53.100.000**	**100**	**1 Paket**	**100**	
			Kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan (bantuan sarana kedelai 695 ha, porang 1 ha) - Koordinasi, bimtek, monitoring, dan evaluasi	Kec. Wilangan, Bagor, Ngluyu	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	-	-	-	696 Ha	100	
						30.000.000	30.000.000	100	1 Paket	100	
			Kegiatan pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan	Kec. Loceret	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	-	-	-	749 Ha	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
			(bantuan benih padi 749 ha) - Koordinasi, bimtek, monitoring, dan evaluasi			23.100.000	23.100.000	100	1 Paket	100	
			Program Dukungan Manajemen	Kab. Nganjuk	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	**31.800.000**	**31.800.000**	**100**	**1 Paket**	**100**	
			Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan			31.800.000	31.800.000	100	1 Paket	100	
2	Kementerian Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana	DIPA TA. 2021 Nomor: SP DIPA-018.08.3.059004/2021 tanggal 30 April 2021	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kab. Nganjuk	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	**2.661.095.000**	**2.564.695.000**	**93,2**	**1 Tahun**	**100**	
			Kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian			1.594.000.000	1.563.700.000	98	18 Unit	100	
			Kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian			598.000.000	541.811.000	91	1 Tahun	100	
			Kegiatan pengelolaan sintem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian			15.000.000	15.000.000	100	1 Tahun	100	
			Kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida			433.910.000	428.499.000	99	1 Tahun	100	
			Kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian			20.185.000	15.685.000	78	1 Tahun	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
			Program Dukungan Manajemen			**100.000.000**	**88.200.000**	**88**	**1 Layanan**	**100**	
			Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada ditjen prasarana dan sarana pertanian			100.000.000	88.200.000	88	1 Layanan	100	
3	Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	DIPA TA. 2021 Nomor. SP-DIPA-018-06.4.059181/2021 tanggal 23 November 2020	**Program Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)**	Kab. Nganjuk	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	**2.340.750.000**	**1.147.680.000**	**47,67**	**3 Paket**	**47,67**	
			Kegiatan SIKOMANDA			1.296.000.000	709.560.000	55	23.652 Akseptor	55	
			Inseminasi Buatan (IB)			720.000.000	280.560.000	39	9.352 Layanan	39	
			Petugas Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Pelaporan Kelahiran			324.750.000	157.620.000	49	5.234 Ekor	49	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak Ada

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan yaitu :

- Belum semua Kelompok Tani mendapat bantuan;
- Kurangnya pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, koordinasi/workshop, apresiasi dan monev pemanfaatan bantuan alat pasca panen di Tingkat Kecamatan;
- Saat penyusunan usulan Alokasi Kegiatan (CP/CL) belum ada pedoman umum dari pusat sehingga alokasi kegiatan kurang spesifik;
- SK Bupati penetapan KP2B dan LP2B belum bisa di terbitkan oleh Bagian Hukum;
- Batas administrasi Kecamatan dan Desa belum sesuai dengan riilnya; dan
- Pelaksanaan PKB dalam bentuk tim dan petugas PKB harus mempunyai sertifikat pelatihan PKB/dokter hewan yang berdampak pada jumlah petugas sedikit.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan yaitu :

- Diadakan seleksi/pemerataan kegiatan pada kelompok tani oleh tim identifikasi CPCL;
- Pembinaan, monev dan bimbingan pasca panen lebih ditingkatkan/ditambah volumenya;
- Penyusunan CPCL tetap mengacu pada pedoman umum tahun sebelumnya selanjutnya tetap menunggu revisi/perubahan juklak/juknis yang baru;
- Saling bersinergi untuk mendukung kelancaran kegiatan;
- Update batas administrasi kecamatan dan desa; dan
- Pelaksanaan PKB harusnya bersifat individu.

B. Tugas Pembantuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Pada Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menerima dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Dana Dari Pusat ke Daerah dan Dana Desa;
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM/1.17/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
c. Surat dari Bappeda Kabupaten Nganjuk Nomor 059/ 894/411.401/2021 tentang Permohonan Laporan Pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memilki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan masnusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen limngkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis

Tujuan

Guna memperoleh data dan informasi mengenai kualitas air secara real time dan terus menerus/kontinyu sebagai bahan untuk perumusan kebijakan pengendalian pencemaran air dan keputusan investasi perlu disediakan dan diketahui oleh masyarakat secara luas.

Output dan Outcome

Output dari pengadaan ini sarana pemantauan kualitas air yaitu data dan informasi mengenai kualitas air secara real time dan terus menerus/kontinyu sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat dalam pengendalian pencemaran air di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.2
Target Tugas Pembantuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

No	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target	Target Outcome
1.	Alat /sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online (onlimo)	Dinas Lingkungan Hidup	1 buah alat on limo	Data kualitas air badan air sungai Kedungsoko secara realtime

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan dapat dilihat pada tabel di bawah.

3.1.2 Realisasi

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

No	K/LNPK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Keterangan
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Surat dari Bappeda Nomor 059/894/411.401/2021 tentang permohonan laporan DAK tahun 2021	**Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** Kegiatan koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut. Alat sistem pemantauan kualitas air secara otomatis dan kuntinyu (online)	Dam Badug	Dinas Lingkungan Hidup	1.300.000.000	1.287.000.000	99	1 buah alat on limo	100	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak Ada

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak Ada

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak Ada

C. Tugas Pembantuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor: 173/KPTS/DC/2020 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Hibah Insentif Desa (HID) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun Anggaran 2021 Tahap I;
b. Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor: 174/KPTS/DC/2020 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun Anggaran 2021 Tahap I;
c. Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor 74/KPTS/DC/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota dan Jumlah Lokasi Kegiatan Padat Karya dan Insfrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2021 Tahap V;
d. Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor 23/KPTS/DC/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota dan Jumlah Lokasi Kegiatan Padat Karya dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jendral Cipta Karya Tahap II Tahun Anggaran 2021;
e. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Ruk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor 5364/KPTS/Rb9.4.3/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021 Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;

f. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Ruk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor 5365/KPTS/Rb9.4.3/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021 Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;
g. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Ruk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor 1328/KPTS/Rb9.4.3/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021 Desa Ngujung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
h. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Ruk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor 5552/KPTS/Rb9.4.3/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021 Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
i. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Ruk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor 5553/KPTS/Rb9.4.3/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021 Desa Putukrejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
j. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Ruk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor 5366/KPTS/Rb9.4.3/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021 Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
k. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/168/K/411.012/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
l. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/262/K/411.012/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/168/K/411.012/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
m. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/264/K/411.012/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 SILPA Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2020; dan

n. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/412/K/412.012/2021 tentang Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2021 adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang sebagaimana tabel di bawah.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pelaksanaan penugasanyang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan dapat dilihat pada tabel dibawah.

3.1.2 Realisasi

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor 74/KPTS/DC/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota dan Jumlah Lokasi Kegiatan Padat Karya dan Insfrastruktur Berbasis Masyarakat Direktoral Jendral Cipta Karya Tahun Anggaran 2021	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Air Minum	Pamsimas (HID MAMA)	Desa Jegreg, Kec. Lengkong	Dinas PRKPP	300.000.000	300.000.000	100	972 Jiwa	100	
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor 173/KPTS/DC/2020 tentang Penetapan Desa Penerima Dana	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Pelayanan Air Minum	Pamsimas (HID)	Desa Sumberjo, Kec. Gondang Desa Jaan, Kec. Gondang	Dinas PRKPP	490.000.000	490.000.000	100	2580 Jiwa	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
		Hibah Insentif Desa (HID) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun Anggaran 2021 Tahap I		Kabupaten/ Kota										
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor 174/KPTS/DC/2020 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Tahun Anggaran 2021 Tahap I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Air Minum	Pamsimas (APBN)	Desa Pehserut, Kec. Sukomoro Desa Jampes, Kec. Pace Desa Selorejo, Kec. Bagor Desa Kebonagung, Kec. Sawahan Desa Klodan, Kec. Ngetos Desa	Dinas PRKPP	1.960.000.000	1.960.000.000	100	1704 Jiwa	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
							Kweden, Kec. Ngetos Desa Dawuhan Kec. Jatikalen Desa Dlururejo Kec. Jatikalen							
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Direktur Jenderal CIPTA KARYA Nomor :23/KPTS/DC/2021 Tentang Penetapan Kabupaten/ Kota dan Jumlah Lokasi Kegiatan Padat Karya dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahap	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Air Minum	Pamsimas (HID MAMA)	Desa Ketawang, Kec. Gondang Desa Nglinggo, Kec. Gondang Desa Bagorkulon, Kec. Bagor Desa Lengkongl or, Kec. Ngluyu Desa	Dinas PRKPP	1.225.000.000	1.225.000.000	100	2859 Jiwa	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
		II Tahun Anggaran 2021					Wengkal, Kec. Rejoso							
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 1328/KPTS/Rb9.4.3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Ngujung, Kec. Gondang	Dinas PRKPP	800.000.000	800.000.000	100	40 KK	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5363/KPTS/Rb9.4.3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Kacangan, Kec. Berbek	Dinas PRKPP	500.000.000	500.000.000	100	25 KK	100	
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5366/KPTS/Rb9.4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Sidokare, Kec. Rejoso	Dinas PRKPP	500.000.000	500.000.000	100	25 KK	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
		3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021												
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor : 5364/KPTS/Rb9.4.3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Ngadipiro, Kec. Wilangan	Dinas PRKPP	500.000.000	500.000.000	100	25 KK	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5365/KPTS/Rb9.4.3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Ngudikan, Kec. Wilangan	Dinas PRKPP	500.000.000	500.000.000	100	25 KK	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5552/KPTS/Rb9.4.3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Pesudukuh , Kec. Bagor	Dinas PRKPP	600.000.000	600.000.000	100	25 KK	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5553/KPTS/Rb9.4.3/2021 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang Tahun Anggaran 2021	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berupa Uang	Desa Pesudukuh, Kec. Bagor	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100	25 KK	100	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak Ada

3.5 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak Ada

D. Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 Kecamatan (Kec. Nganjuk, Pace, Tanjunganom, Baron dan Kertosono) yang dituangkan pada Progam pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Target Kinerja

Terget Kinerja untuk Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 Kecamatan (Kec. Nganjuk, Pace, Tanjunganom, Baron dan Kertosono).

3.1.2 Realisasi

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Progam, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1.	Kementrian LPNK	Peraturan Menteri LPNK No. 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Khusus Non Fisik Tahun 2021	Progam pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5 Kecamatan (Kecamatan Nganjuk, Pace, Tanjunganom, Prambon, Baron)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	125.000.000	106.817.000	85,45	Terlaksananya pendataan UMKM di 5 Kecamatan	100	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak Ada

3.3 Permasalahan dan Kendala

Kondisi Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya refocusing anggrana belanja, disamping itu ada beberapa rincian belanja yang harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Hal tersebut mengakibatkan ketersediaan dana mundur pada tribulan III. Belum tersedianya anggaran sampai tribulan III tersebut mengakibatkan pelaksanaan rangkaian kegiatan juga ikut mundur. Dengan kondisi ketersediaan anggaran yang baru tersedia pada tribulan III, dan jumlah rangkaian kegiataan yang melibatkan banyak pesserta, menuntut kegiatan pelatihan harus dipecah menjadi beberapa Angkatan. Untuk meninjaklanjuti kondisi dan waktu yang terbatas, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dengan berkelanjutan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak Ada

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 7 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
			5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
		Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten
4.	Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian kinerja SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang diwajibkan untuk difasilitasi pelayanan dasarnya oleh Pemerintah Daerah meliputi 3 jenis, yaitu:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS) merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Dengan adanya optimalisasi bidang pendidikan melalui implementasi standar pelayanan minimal sebagaimana telah disebutkan di atas, maka diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk. Hal ini cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang tertuang di dalam Tricita Bhakti dan salah satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala terus melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang pendidikan. Ketiga jenjang pendidikan tersebut memiliki pengukuran capaian yang sama yaitu didasarkan pada pengukuran angka partisipasi murni pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan tertentu diasumsikan sebagai tolok ukur yang diyakini mampu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memberikan fasilitas layanan pendidikan bagi penduduknya. Namun perlu dipahami bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemenuhan tersebut belum mampu dilaksanakan secara menyeluruh disebabkan karena dukungan anggaran dan validitas data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya di satuan pendidikan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Pendidikan diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2021. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang optimal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Mininal Pendidikan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh satuan pendidikan dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi bagi peserta didik. Ketika seluruh pencapaian 8 standar nasional pendidikan, perlengkapan dasar serta pembiayaan pendidikan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan satuan pendidikan, maka optimalisasi terhadap capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.1.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan,

akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang pendidikan. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang pendidikan hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang pendidikan :

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2021, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan anak usia dini dapat tercapai dengan baik. Hal ini didasarkan pada perhitungan prosentase antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini (TK dan RA) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Nganjuk. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{29.786}{30.479} \times 100\%$$

$$= 97{,}73\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat angka partisipasi murni pada anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini di satuan TK dan RA telah terealisasi sebesar 97,73% dan belum mencapai target 100%, karena tidak secara keseluruhan anak pada usia 5-6 tahun bersekolah pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal. Hal ini disebabkan adanya selisih prosentase sebesar 2,27% peserta didik berusia 6 tahun yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan dasar atas dampak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 bahwa salah satu persyaratan calon peserta didik baru yang akan bersekolah pada jenjang sekolah dasar paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Bahkan, calon peserta didik usia 5 tahun 6 bulan sudah diperbolehkan untuk mendaftar pada Sekolah Dasar dengan prasyarat memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 91,42%, maka pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan terhadap angka partisipasi murni PAUD sebesar 6,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya dalam memberikan fasilitas pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada para peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar menjadi tujuan ketuntasan penduduk usia sekolah pada rentang usia 7-15 tahun untuk bersekolah. Hal ini sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dalam meningkatkan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Berdasarkan pada hasil perhitungan standar pelayanan minimal, jenjang pendidikan dasar telah terealisasi sebesar 83,73% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{APM Dikdas} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun pada jenjang Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{128.971}{154.032} \times 100\%$$

$$= 83{,}73\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi anak rentang usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar adalah sebesar 83,73%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa anak usia 7-15 tahun telah mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan dasar dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jenjang pendidikan non formal yang dimanfaatkan beberapa anak usia sekolah pada rentang usia 7-18 tahun sebagai alternatif jalur pendidikan non formal ketika terdapat peserta didik yang belum mampu untuk menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan formal. Jalur pendidikan kesetaraan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan capaian angka partisipasi murni di Kabupaten Nganjuk. Untuk

mengetahui realisasi standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{APM P. Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun pada jenjang Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{283}{203.007} \times 100\%$$

$$= 0{,}14\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi murni pendidikan kesetaraan telah tercapai sebesar 0,14%. Hasil analisa ini mengandung maksud bahwa pada rentang anak usia 7-18 tahun hanya terdapat sebagian kecil warga yang putus sekolah sehingga harus mengikuti pendidikan kesetaraan. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan atas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nganjuk melalui pemberian fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas sehingga menurunkan angka putus sekolah dan berdampak pada tingkat partisipasi murni pada pendidikan kesetaraan yang mengalami penurunan pula.

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang pendidikan secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berikut kami tampilkan hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.3
Capaian SPM Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

No	Uraian	Jumlah Yang Dibutuhkan	Jumlah Yang Tersedia
1	Kepala Sekolah yang berkualifikasi S-1	781	749

No	Uraian	Jumlah Yang Dibutuhkan	Jumlah Yang Tersedia
2	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi SMA/Sederajat	32	32
3	Rombongan belajar di satuan pendidikan	2097	1.918
4	Satuan pendidikan yang akreditasi minimal C	781	394
5	Tenaga pendidik yang berkualifikasi S-1	2.097	2.256
6	6 buah buku gambar dalam kondisi baru per PD/Semester	377.556	377.556
7	1 set alat mewarnai paling sedikit 12 warna dalam kondisi baru per PD/Semester	62.926	62.926

b. Jenjang Pendidikan Dasar

Tabel 4.4
Capaian SPM Pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI)

No	Uraian	Jumlah yang Dibutuhkan	Jumlah yang Tersedia
1	Kepala Sekolah yang berkualifikasi S-1	662	662
2	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi SMA/Sederajat	1.726	650
3	Rombongan belajar di satuan pendidikan	3.449	4.846
4	Satuan pendidikan yang akreditasi minimal C	730	692
5	Tenaga pendidik yang berkualifikasi S-1	5.840	6.998
6	1 paket buku teks pelajaran sesuai kurikulum per PD/Semester	193.166	193.166
7	1 set perlengkapan belajar dalam kondisi baru per PD/semester	193.166	0

Tabel 4.5
Capaian SPM Pada Jenjang Pendidikan Dasar (SMP/MTS)

No	Uraian	Jumlah yang Dibutuhkan	Jumlah yang Tersedia
1	Kepala Sekolah yang berkualifikasi S-1	239	238
2	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi SMA/Sederajat	801	529
3	Rombongan belajar di satuan pendidikan	1.600	1.877
4	Satuan pendidikan yang akreditasi minimal C	159	125

No	Uraian	Jumlah yang Dibutuhkan	Jumlah yang Tersedia
5	Tenaga pendidik yang berkualifikasi S-1	1.601	3.668
6	1 paket buku teks pelajaran sesuai kurikulum per PD/Semester	102.456	102.456
7	1 set perlengkapan belajar dalam kondisi baru per PD/semester	102.456	0

c. Jenjang Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.6
Capaian SPM Pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan

No	Uraian	Jumlah yang Dibutuhkan	Jumlah yang Tersedia
1	Kepala Sekolah yang berkualifikasi S-1	19	14
2	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi SMA/Sederajat	19	4
3	Rombongan belajar di satuan pendidikan	77	62
4	Satuan pendidikan yang akreditasi minimal C	19	7
5	Tenaga pendidik yang berkualifikasi S-1	174	132
6	1 paket buku teks pelajaran sesuai kurikulum per PD/Semester	3.092	3.092
7	1 set perlengkapan belajar dalam kondisi baru per PD/semester	3.092	1.440

Berdasarkan pada tampilan capaian di masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa, berkaitan dengan pemenuhan standar satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar hampir seluruhnya telah terpenuhi dan terfasilitasi secara memadai. Akan tetapi pada standar biaya pribadi peserta didik dalam memenuhi perlengkapan dasar peserta didik belum dapat dipenuhi secara optimal. Menurut sajian data pada tabel di atas, untuk pemenuhan buku gambar, buku teks dan buku modul pembelajaran telah teralokasikan melalui anggaran Bantuan Oparasional Sekolah SD dan SMP. Namun untuk 1 set alat tulis bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu belum terpenuhi oleh satuan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan peran serta dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk memberikan bantuan dalam pemberian bantuan ATK bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 688.266.164.605
2) Program Pengelolaan Pendidikan Rp. 148.012.308.165
   a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp. 78.505.182.853
   b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp. 67.589.384.912
   c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp. 1.124.813.750
   d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp. 792.926.650
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 28.303.308.950
   a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp. 28.303.308.950

Berikut kami tampilkan rincian alokasi anggaran dan realisasinya yang ditujukan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**864,581,781,720.00**	**789,445,288,311.00**	**(75,136,493,409.00)**	**91.31**
DINAS PENDIDIKAN	**864,581,781,720.00**	**789,445,288,311.00**	**(75,136,493,409.00)**	**91.31**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**688,266,164,605.00**	**619,487,946,327.00**	**(68,778,218,278.00)**	**90.01**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**699,775,000.00**	**571,716,490.00**	**(128,058,510.00)**	**81.70**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	315,875,000.00	282,763,500.00	(33,111,500.00)	89.52
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383,900,000.00	288,952,990.00	(94,947,010.00)	75.27
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**684,732,646,860.00**	**616,538,720,435.00**	**(68,193,926,425.00)**	**90.04**
Belanja Pegawai	684,728,646,860.00	616,536,240,435.00	(68,192,406,425.00)	90.04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000.00	2,480,000.00	(520,000.00)	82.67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**116,400,000.00**	**85,263,100.00**	**(31,136,900.00)**	**73.25**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	116,400,000.00	85,263,100.00	(31,136,900.00)	73.25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**37,395,000.00**	**12,320,000.00**	**(25,075,000.00)**	**32.95**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15,000,000.00	9,760,000.00	(5,240,000.00)	65.07
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15,195,000.00	2,560,000.00	(12,635,000.00)	16.85
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,200,000.00	0.00	(7,200,000.00)	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**975,442,280.00**	**770,763,750.00**	**(204,678,530.00)**	**79.02**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,500,000.00	58,091,500.00	(2,408,500.00)	96.02
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,998,750.00	6,660,000.00	(8,338,750.00)	44.40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	355,214,400.00	315,106,050.00	(40,108,350.00)	88.71
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43,203,980.00	26,425,250.00	(16,778,730.00)	61.16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62,000,000.00	46,220,000.00	(15,780,000.00)	74.55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194,826,000.00	88,886,000.00	(105,940,000.00)	45.62
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9,699,150.00	6,621,950.00	(3,077,200.00)	68.27
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	235,000,000.00	222,753,000.00	(12,247,000.00)	94.79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**561,792,800.00**	**524,920,500.00**	**(36,872,300.00)**	**93.44**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	561,792,800.00	524,920,500.00	(36,872,300.00)	93.44
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**483,175,000.00**	**406,815,493.00**	**(76,359,507.00)**	**84.20**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,045,000.00	0.00	(2,045,000.00)	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406,130,000.00	331,815,493.00	(74,314,507.00)	81.70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**659,537,665.00**	**577,426,559.00**	**(82,111,106.00)**	**87.55**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136,365,115.00	99,268,501.00	(37,096,614.00)	72.80
Pemeliharaan Mebel	10,000,000.00	9,750,000.00	(250,000.00)	97.50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210,978,000.00	174,120,000.00	(36,858,000.00)	82.53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	302,194,550.00	294,288,058.00	(7,906,492.00)	97.38

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**148,012,308,165.00**	**143,117,154,385.00**	**(4,895,153,780.00)**	**96.69**
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**78,505,182,853.00**	**76,225,781,460.00**	**(2,279,401,393.00)**	**97.10**
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	492,758,000.00	478,162,200.00	(14,595,800.00)	97.04
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	631,630,000.00	617,216,000.00	(14,414,000.00)	97.72
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	165,500,000.00	164,024,900.00	(1,475,100.00)	99.11
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	17,826,407,900.00	16,514,962,500.00	(1,311,445,400.00)	92.64
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,785,294,000.00	1,737,020,999.00	(48,273,001.00)	97.30
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	192,185,000.00	181,477,000.00	(10,708,000.00)	94.43
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,756,070,000.00	1,707,814,500.00	(48,255,500.00)	97.25
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800,655,000.00	766,326,000.00	(34,329,000.00)	95.71
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3,914,130,000.00	3,853,370,050.00	(60,759,950.00)	98.45
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	153,037,200.00	107,670,250.00	(45,366,950.00)	70.36
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	633,470,450.00	290,627,470.00	(342,842,980.00)	45.88
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	410,534,950.00	314,487,465.00	(96,047,485.00)	76.60
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	199,445,900.00	75,405,600.00	(124,040,300.00)	37.81
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49,016,654,453.00	48,920,170,526.00	(96,483,927.00)	99.80
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	527,410,000.00	497,046,000.00	(30,364,000.00)	94.24
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**67,589,384,912.00**	**65,408,005,032.00**	**(2,181,379,880.00)**	**96.77**
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	225,765,000.00	221,975,000.00	(3,790,000.00)	98.32
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	774,935,000.00	694,403,000.00	(80,532,000.00)	89.61
Pembangunan Laboratorium	2,023,790,000.00	1,867,367,200.00	(156,422,800.00)	92.27
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	489,790,000.00	480,867,500.00	(8,922,500.00)	98.18
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7,618,189,000.00	6,688,005,000.00	(930,184,000.00)	87.79
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	582,120,000.00	572,227,000.00	(9,893,000.00)	98.30
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	86,450,000.00	84,659,000.00	(1,791,000.00)	97.93
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	779,560,000.00	763,638,000.00	(15,922,000.00)	97.96
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2,494,960,000.00	2,242,735,500.00	(252,224,500.00)	89.89
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	186,449,800.00	183,372,000.00	(3,077,800.00)	98.35
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	21,437,750,000.00	21,346,896,500.00	(90,853,500.00)	99.58

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	168,739,600.00	43,633,300.00	(125,106,300.00)	25.86
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	482,400,000.00	327,697,650.00	(154,702,350.00)	67.93
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	473,923,350.00	389,629,338.00	(84,294,012.00)	82.21
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	107,450,000.00	56,202,300.00	(51,247,700.00)	52.31
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28,650,192,562.00	28,569,722,107.00	(80,470,455.00)	99.72
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	487,620,600.00	364,405,837.00	(123,214,763.00)	74.73
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	390,080,000.00	384,092,800.00	(5,987,200.00)	98.47
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	129,220,000.00	126,476,000.00	(2,744,000.00)	97.88
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**1,124,813,750.00**	**829,848,773.00**	**(294,964,977.00)**	**73.78**
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	113,595,000.00	111,166,000.00	(2,429,000.00)	97.86
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	408,317,000.00	356,999,500.00	(51,317,500.00)	87.43
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	42,503,000.00	39,846,000.00	(2,657,000.00)	93.75
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	201,899,550.00	112,187,550.00	(89,712,000.00)	55.57
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	24,299,200.00	15,639,200.00	(8,660,000.00)	64.36
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	189,000,000.00	87,218,050.00	(101,781,950.00)	46.15
Pengelolaan Dana BOP PAUD	145,200,000.00	106,792,473.00	(38,407,527.00)	73.55
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**792,926,650.00**	**653,519,120.00**	**(139,407,530.00)**	**82.42**
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	399,890,000.00	370,927,400.00	(28,962,600.00)	92.76
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,710,000.00	0.00	(6,710,000.00)	0.00
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	198,600,000.00	144,615,050.00	(53,984,950.00)	72.82
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9,926,650.00	6,099,420.00	(3,827,230.00)	61.44
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	177,800,000.00	131,877,250.00	(45,922,750.00)	74.17
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**28,303,308,950.00**	**26,840,187,599.00**	**(1,463,121,351.00)**	**94.83**
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	**28,303,308,950.00**	**26,840,187,599.00**	**(1,463,121,351.00)**	**94.83**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27,646,014,950.00	26,600,415,999.00	(1,045,598,951.00)	96.22
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	657,294,000.00	239,771,600.00	(417,522,400.00)	36,48

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Berikut ini jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.8
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

No.	Jabatan Dalam Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Dinas Pendidikan	1
2.	Sekretaris	-
	- Sub. Bagian Umum	8
	- Sub. Bagian Keuangan	7
	- Sub. Bagian Aset	6
	Jumlah	22
3.	Kepala Bidang Perencanaan	1
	- Seksi Pendataan dan Perencanaan	3
	- Seksi Evaluasi dan Pelaporan	6
	Jumlah	10
4.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	1
	- Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal	4
	- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Formal	4
	- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	4
	Jumlah	13
5.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	-
	- Seksi Kurikulum	6
	- Seksi Kesiswaan	5
	- Seksi Sarana dan Prasarana	10
	Jumlah	21
6.	Kepala Bidang Ketenagaan	1
	- Seksi Tenaga Guru	5
	- Seksi Tenaga Kependidikan	3
	- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan	2
	Jumlah	11
7.	Pengawas	

No.	Jabatan Dalam Dinas Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
	- Pengawas SMP	4
	- Staf	1
	Jumlah	5
Jumlah Keseluruhan		**82**

Adapun jumlah pegawai guru yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di satuan pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Jumlah Pegawai Guru di Satuan Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Guru (Orang)
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SMA/SMK	212
4.	Diploma 1	4
5.	Diploma 2	47
6.	Diploma 3	198
7.	S1	7.868
8.	S2	254
9.	S3	2
Jumlah		8.579

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

a. Regulasi dan kebijakan pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
b. Implementasi kurikulum paradigma baru yang masih sulit dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
d. Kuantitas dan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan belum merata;
e. Data pokok pendidikan belum dimanfaatkan secara maksimal;
f. Integrasi Sistem Informasi Bidang Pendidikan belum optimal;
g. Standarisasi pendataan pendidikan yang belum berbasis pada sistem informasi dan belum terkelola dengan baik;

h. Sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk belum optimal dilaksanakan; dan
i. Indeks Inovasi Satuan Pendidikan rendah.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Tatap Muka di satuan pendidikan;
b. Penguatan kurikulum paradigma baru melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop kepada Guru di satuan pendidikan;
c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
d. Pemerataan kuantitas dan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan;
e. Pemanfaatan data pokok pendidikan secara maksimal;
f. Pemenuhan Integrasi Sistem Informasi Bidang Pendidikan secara optimal;
g. Penyediaan sistem informasi manajemen pelayanan pendidikan;
h. Optimalisasi sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan
i. Peningkatan Indeks Inovasi Satuan Pendidikan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

1) Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
2) Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan standarisasi pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan kesehatan. Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan pada seluruh penduduk di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang tertuang di dalam Tricita Bhakti dan salah satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan tersebut bukan hal yang mudah, namun memerlukan perumusan secara lebih terstruktur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada setiap hasil program dan kegitan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diampu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, antara lain:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.451}{15.648} \times 100\%$$

$$= 79{,}57\%$$

Pada tahun 2021, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 12.451 orang, sedangkan jumlah seluruh ibu

hamil di Kabupaten Nganjuk sebanyak 15.648 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 79,57%.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.264}{14.936} \times 100\%$$

$$= 82,11\%$$

Pada tahun 2021, jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan adalah sebanyak 12.264 orang sedangkan jumlah seluruh ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk sebanyak 14.936 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 82,11%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{12.882}{14.225} \times 100\%$$

$$= 90,56\%$$

Pada tahun 2021, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 12.882 bayi sedangkan jumlah seluruh bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk sebanyak 14.225 bayi. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 90,56%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada balita di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{43.626}{58.449} \times 100\%$$

$$= 74,64\%$$

Pada tahun 2021, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 43.626 balita sedangkan jumlah seluruh balita di Kabupaten Nganjuk sebanyak 58.449 balita. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Nganjuk mencapai 74.64%.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{64.007}{129.927} \times 100\%$$

$$= 49{,}26\%$$

Pada tahun 2021, jumlah anak usia pendididkan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 64.007 anak sedangkan jumlah seluruh anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk sebanyak 129.927 anak. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk mencapai 49,26%.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada penduduk yang berusia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dilaksanakan melalui edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia produktif di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{156.075}{663.700} \times 100\%$$

$$= 23{,}52\%$$

Untuk capaian tahun 2021, jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 156.075 jiwa, sedangkan jumlah seluruh orang usia 15-59 tahun di Kabupaten

Nganjuk sebanyak 663.700 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk usia produktif mencapai 23,52%.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia lanjut di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{88.996}{179.232} \times 100\%$$

$$= 49{,}65\%$$

Pada tahun 2021, jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 88.996 jiwa sedangkan jumlah seluruh lansia di Kabupaten Nganjuk sebanyak 179.232 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Nganjuk mencapai 49,65%.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{55.123}{379.319} \times 100\%$$

$$= 14{,}53\%$$

Pada tahun 2021, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tercatat sebanyak 55.123 orang, sedangkan jumlah seluruh penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk sebanyak 379.319 orang. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi mencapai 14,53%.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes mellitus dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita diabetes mellitus di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{21.276}{21.916} \times 100\%$$

$$= 97{,}08\%$$

Pada tahun 2021, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 21.276 jiwa, sedangkan jumlah seluruh penderita DM di Kabupaten Nganjuk sebanyak 21.916 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus mencapai 97,08%.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.501}{3.286} \times 100\%$$

$$= 76{,}11\%$$

Pada tahun 2021, jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah sebanyak 2.501 orang, sedangkan jumlah seluruh penderita ODGJ di Kabupaten sebanyak 3.286 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada ODGJ berat mencapai 76,11%.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis adalah pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Seluruh orang terduga penderita TBC dilakukan pemeriksaan/test lebih lanjut untuk memastikan gejala yang diderita adalah benar-benar TBC. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang terduga penderita tuberkulosis di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{682}{682} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2021, dari 682 orang terduga TBC telah semuanya mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar DOTS sehingga capaian kinerjanya mampu mencapai target 100%.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus = HIV*) yang meliputi: (1) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan (2) skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang memiliki risiko terinfeksi virus HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), dan warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{18.439}{17.477} \times 100\%$$

$$= 105{,}5\%$$

Dari 17.477 orang yang beresiko terinfeksi HIV, sebanyak 18.439 orang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sehingga capaian kinerja sebesar 105,5 %. Capaian ini melebihi target 100% karena sasaran yang dituju meliputi ibu hamil, warga binaan pemasyatakatan (WBP), dan Populasi Kunci (Ponci) yakni orang-orang yang mempunyai faktor resiko tinggi penularan HIV AIDS. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV mencapai 105,5%.

Berikut ini capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 hingga 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Target Setiap Tahun	Capaian	
			2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	69,63%	79,57%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	91,64%	82,11%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	86,32%	90,56%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	50,40%	74,64%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	60,00%	49,26%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	44,88%	23,52%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	40,51%	49,65%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	41,99%	14,53%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	78,05%	97,08%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	90,82%	76,11%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	76,19%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	100%	59,98%	105,5%

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.109.999.821.915
    2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 193.495.062.015
    3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp. 17.086.936.091
    4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp. 395.313.000
    5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp.1.806.536.150
2) RSUD Nganjuk
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.172.270.635.881,2
    b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 57.579.268.822
3) RSUD Kertosono
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.72.500.000.000

Berikut kami tampilkan rincian alokasi anggaran dan realisasinya yang ditujukan untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**625,133,573,874.2**	**501,031,084,011.1**	**-124,102,489,863.1**	**80.15**
DINAS KESEHATAN	**322,783,669,171.0**	**197,929,899,527.0**	**-124,853,769,644.0**	**61.32**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**109,999,821,915.00**	**85,809,033,352.00**	**-24,190,788,563.00**	**78.01**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**25,000,000.00**	**4,670,450.00**	**(20,329,550.00)**	**18.68**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000.00	4,670,450.00	(20,329,550.00)	18.68
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**107,525,124,646.00**	**84,500,662,882.00**	**(23,024,461,764.00)**	**78.59**
Belanja Pegawai	107,525,124,646.00	84,500,662,882.00	(23,024,461,764.00)	78.59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**15,000,000.00**	**4,146,000.00**	**(10,854,000.00)**	**27.64**
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	4,146,000.00	(10,854,000.00)	27.64
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**650,524,550.00**	**303,506,899.00**	**(347,017,651.00)**	**46.66**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	10,112,800.00	(4,887,200.00)	67.42
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,000,000.00	12,224,809.00	(52,775,191.00)	18.81
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165,025,000.00	147,014,490.00	(18,010,510.00)	89.09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132,617,550.00	78,314,800.00	(54,302,750.00)	59.05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000.00	4,395,000.00	(105,000.00)	97.67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268,382,000.00	51,445,000.00	(216,937,000.00)	19.17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**352,949,974.00**	**186,478,200.00**	**(166,471,774.00)**	**52.83**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Mebel	86,579,700.00	85,538,200.00	(1,041,500.00)	98.80
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266,370,274.00	100,940,000.00	(165,430,274.00)	37.89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**831,222,745.00**	**353,927,825.00**	**(477,294,920.00)**	**42.58**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	816,000.00	(3,184,000.00)	20.40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	779,222,745.00	313,111,825.00	(466,110,920.00)	40.18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,000,000.00	40,000,000.00	(8,000,000.00)	83.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**600,000,000.00**	**455,641,096.00**	**(144,358,904.00)**	**75.94**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000.00	217,944,290.00	(82,055,710.00)	72.65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	11,645,000.00	(3,355,000.00)	77.63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270,000,000.00	214,779,806.00	(55,220,194.00)	79.55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	11,272,000.00	(3,728,000.00)	75.15
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**193,495,062,015.00**	**103,517,326,353.00**	**-89,977,735,662.00**	**53.50**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**80,098,108,992.00**	**34,770,353,657.00**	**(45,327,755,335.00)**	**43.41**
Pembangunan Puskesmas	14,000,000,000.00	11,552,595,185.00	(2,447,404,815.00)	82.52
Pengembangan Puskesmas	5,000,001,540.00	4,065,521,045.00	(934,480,495.00)	81.31
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	15,699,999,900.00	11,468,112,650.00	(4,231,887,250.00)	73.05
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	436,893,000.00	428,030,206.00	(8,862,794.00)	97.97
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	244,550,000.00	239,979,714.00	(4,570,286.00)	98.13
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,850,000,000.00	660,963,500.00	(1,189,036,500.00)	35.73
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25,067,925,977.00	2,376,335,050.00	(22,691,590,927.00)	9.48
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	89,400,000.00	0.00	(89,400,000.00)	0.00
Pengadaan Obat, Vaksin	5,867,796,200.00	1,339,178,402.00	(4,528,617,798.00)	22.82
Pengadaan Bahan Habis Pakai	11,438,053,675.00	2,399,965,690.00	(9,038,087,985.00)	20.98
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	245,949,700.00	238,864,715.00	(7,084,985.00)	97.12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60,500,000.00	807,500.00	(59,692,500.00)	1.33
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43,120,000.00	0.00	(43,120,000.00)	0.00
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	53,919,000.00	0.00	(53,919,000.00)	0.00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**112,374,178,723.00**	**68,342,557,178.00**	**(44,031,621,545.00)**	**60.82**
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,483,031,000.00	590,405,471.00	(892,625,529.00)	39.81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,964,855,200.00	1,699,996,919.00	(264,858,281.00)	86.52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	67,981,300.00	9,237,500.00	(58,743,800.00)	13.59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	182,956,300.00	12,280,800.00	(170,675,500.00)	6.71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	635,263,850.00	52,826,575.00	(582,437,275.00)	8.32
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	251,406,200.00	190,452,000.00	(60,954,200.00)	75.75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	0.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	71,500,000.00	66,220,000.00	(5,280,000.00)	92.62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	106,800,000.00	52,123,400.00	(54,676,600.00)	48.80
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	77,223,549.00	19,287,600.00	(57,935,949.00)	24.98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7,761,358,650.00	1,896,998,143.00	(5,864,360,507.00)	24.44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,762,420,750.00	1,096,730,886.00	(1,665,689,864.00)	39.70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	456,171,350.00	178,338,000.00	(277,833,350.00)	39.09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	515,250,950.00	47,298,660.00	(467,952,290.00)	9.18
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,142,813,600.00	260,680,150.00	(882,133,450.00)	22.81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	13,675,000.00	3,209,100.00	(10,465,900.00)	23.47
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	449,174,650.00	67,599,300.00	(381,575,350.00)	15.05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	89,639,500.00	42,739,500.00	(46,900,000.00)	47.68
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,573,845,950.00	457,128,162.00	(1,116,717,788.00)	29.05
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	83,155,713,333.00	54,707,082,544.00	(28,448,630,789.00)	65.79
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5,388,000.00	0.00	(5,388,000.00)	0.00
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	141,985,000.00	50,134,300.00	(91,850,700.00)	35.31
Operasional Pelayanan Puskesmas	8,266,945,351.00	6,504,991,949.00	(1,761,953,402.00)	78.69
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	556,288,240.00	322,458,649.00	(233,829,591.00)	57.97
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	582,878,000.00	275,000.00	(582,603,000.00)	0.05
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	56,413,000.00	14,062,570.00	(42,350,430.00)	24.93
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	800,000.00	0.00	(800,000.00)	0.00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**210,893,200.00**	**172,527,025.00**	**(38,366,175.00)**	**81.81**
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	110,893,200.00	80,407,275.00	(30,485,925.00)	72.51
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,000,000.00	92,119,750.00	(7,880,250.00)	92.12
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**811,881,100.00**	**231,888,493.00**	**(579,992,607.00)**	**28.56**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	677,528,000.00	211,143,766.00	(466,384,234.00)	31.16
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	134,353,100.00	20,744,727.00	(113,608,373.00)	15.44

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**17,086,936,091.00**	**7,438,334,497.00**	**-9,648,601,594.00**	**43.53**
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	**10,880,000.00**	**1,142,200.00**	**(9,737,800.00)**	**10.50**
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10,880,000.00	1,142,200.00	(9,737,800.00)	10.50
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**16,846,062,091.00**	**7,238,502,497.00**	**(9,607,559,594.00)**	**42.97**
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	39,960,000.00	21,000,000.00	(18,960,000.00)	52.55
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	16,766,497,641.00	7,208,798,947.00	(9,557,698,694.00)	43.00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	39,604,450.00	8,703,550.00	(30,900,900.00)	21.98
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**229,994,000.00**	**198,689,800.00**	**(31,304,200.00)**	**86.39**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229,994,000.00	198,689,800.00	(31,304,200.00)	86.39
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**395,313,000.00**	**181,812,325.00**	**-213,500,675.00**	**45.99**
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**42,170,000.00**	**5,829,000.00**	**(36,341,000.00)**	**13.82**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	18,000,000.00	0.00	(18,000,000.00)	0.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18,400,000.00	4,554,000.00	(13,846,000.00)	24.75
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5,770,000.00	1,275,000.00	(4,495,000.00)	22.10
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**10,000,000.00**	**0.00**	**(10,000,000.00)**	**0.00**
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	0.00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**168,640,000.00**	**111,762,675.00**	**(56,877,325.00)**	**66.27**
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	168,640,000.00	111,762,675.00	(56,877,325.00)	66.27
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**50,000,000.00**	**31,866,200.00**	**(18,133,800.00)**	**63.73**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	50,000,000.00	31,866,200.00	(18,133,800.00)	63.73
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**124,503,000.00**	**32,354,450.00**	**(92,148,550.00)**	**25.99**
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	124,503,000.00	32,354,450.00	(92,148,550.00)	25.99
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**1,806,536,150.00**	**983,393,000.00**	**-823,143,150.00**	**54.44**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**597,465,500.00**	**288,436,800.00**	**(309,028,700.00)**	**48.28**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	597,465,500.00	288,436,800.00	(309,028,700.00)	48.28
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**222,400,000.00**	**119,317,200.00**	**(103,082,800.00)**	**53.65**
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	222,400,000.00	119,317,200.00	(103,082,800.00)	53.65
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**986,670,650.00**	**575,639,000.00**	**(411,031,650.00)**	**58.34**
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	986,670,650.00	575,639,000.00	(411,031,650.00)	58.34
RSUD NGANJUK	**229,849,904,703.2**	**203,315,998,792.0**	**-26,533,905,911.2**	**88.46**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**172,270,635,881.2**	**153,799,266,419.0**	**-18,471,369,462.2**	**89.28**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**28,515,106,000.00**	**26,581,887,674.00**	**(1,933,218,326.00)**	**93.22**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,515,106,000.00	26,581,887,674.00	(1,933,218,326.00)	93.22
Peningkatan Pelayanan BLUD	**143,755,529,881.20**	**127,217,378,745.00**	**(16,538,151,136.20)**	**88.50**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	143,755,529,881.20	127,217,378,745.00	(16,538,151,136.20)	88.50
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**57,579,268,822.00**	**49,516,732,373.00**	**-8,062,536,449.00**	**86.00**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**41,558,430,000.00**	**37,139,446,680.00**	**(4,418,983,320.00)**	**89.37**
Pengembangan Rumah Sakit	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	41,558,430,000.00	37,139,446,680.00	(4,418,983,320.00)	89.37
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**16,020,838,822.00**	**12,377,285,693.00**	**(3,643,553,129.00)**	**77.26**
RSUD KERTOSONO	**72,500,000,000.00**	**99,785,185,692.08**	**27,285,185,692.08**	**137.63**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**72,500,000,000.00**	**99,785,185,692.08**	**27,285,185,692.08**	**137.635**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,673,345,000.00	17,130,695,587.00	(1,542,649,413.00)	91.74
Non Program	**0.00**	**10,047,458,746.00**	**10,047,458,746.00**	**0.00**
Non Kegiatan	0.00	10,047,458,746.00	10,047,458,746.00	0.00
Peningkatan Pelayanan BLUD	**83,021,150,069.53**	**56,860,424,834.16**	**(26,160,725,235.37)**	**68.49**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	83,021,150,069.53	56,860,424,834.16	(26,160,725,235.37)	68.49
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**15,820,000,000.00**	**10,116,437,821.00**	**(5,703,562,179.00)**	**63.95**
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15,820,000,000.00	10,116,437,821.00	(5,703,562,179.00)	63.95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**11,590,757,137.00**	**7,838,481,567.00**	**(3,752,275,570.00)**	**67.63**
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	11,590,757,137.00	7,838,481,567.00	(3,752,275,570.00)	67.63

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki pegawai yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang yang tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Kertosono, Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pegawai sebagaimana dimaksud di atas berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Rincian tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	S-II	Pembina Utama Muda/ IV c	1
2	Sekretaris	S-I Kedokteran	Pembina Tk. I / IV.b	1
3	Kepala Bidang P2P	S-II Magist. Manajemen RS	Penata Tk. I / III.d	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	S-I Kedokteran	Pembina / IV.a	1
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	S-II Ilmu Administrasi	Penata Tk. I / III.d	1
6	Kasie Kesehatan Keluarga dan Gizi	S-I Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	1
7	Kasie Promosi dan Pemberdayaan Masy	S-I Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	1
8	Kasie Kesling, Kesker dan Olahraga	D-IV Kesehatan Lingkungan	Penata Tk. I / III.d	1
9	Kasie Surveilans & Imunisasi	S-I Kesehatan Masyarakat	Penata Muda Tk. I / III.b	1
10	Kasie P2M	S-I Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	1
11	Kasie PTM dan Keswa	D-III Kebidanan	Penata Muda Tk. I / III.b	1
12	Kasie Yankes Primer	S-I Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	1
13	Kasie Yankes Rujukan	D-IV Kebidanan	Penata Tk. I / III.d	1

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
14	Kasie Yankes Trad	D-III Kebidanan	Penata Tk. I / III.d	1
15	Kasie Kefarmasian	S-I Apoteker	Penata Tk. I / III.d	1
16	Kasie Alkes dan PKRT	S-I Ilmu Administrasi Neg.	Penata Tk. I / III.d	1
17	Kasie SDMK	S-II Magist. Manajemen	Penata Tk. I / III.d	1
18	Kepala Sub Bagian Umum	S-II Magister Sains	Pembina / IV.a	1
19	Kepala Sub Bagian Keuangan	-	-	-
20	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	S-I Kesehatan Masyarakat	Penata Tk. I / III.d	1
21	Pelaksana			62
22	THL			42
Jumlah				122

Tabel 4.14
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Nganjuk

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	93
2	Dokter Umum	126
3	Dokter Gigi	27
4	Apoteker	17
5	Tenaga Teknis Kefarmasian	94
6	Bidan	738
7	Perawat	970
8	Tenaga Gizi	62
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	34
10	Tenaga Sanitarian	41
11	Ahli Laboratorium Medik	73
12	Biomedika	1
13	Keterapian fisik	9
14	Keteknisian Medik	9

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1) Dinas Kesehatan masih memakai sasaran proyeksi dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dalam mengetahui cakupan program kesehatan yang telah dilaksanakan, tidak menggunakan sasaran riil di masyarakat dengan pertimbangan karena sasaran riil di masyarakat belum

tersedia secara update dan valid;

2) Sebagian ibu hamil datang berkunjung atau diperiksa pada trimester ke-2 dan ke-3 sehingga tidak memenuhi standar K4 (K1 akses tinggi, K1 murni rendah);
3) Kurangnya validasi pencatatan dan pelaporan di lingkup Kabupaten karena minimnya kuantitas SDM dan tingginya beban kerja;
4) Ada sebagian ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja Kabupaten Nganjuk, misalnya ibu bersalin yang melahirkan di daerah orang tua yang berada di luar wilayah Kabupaten Nganjuk;
5) Ada sebagian bayi yang hanya melakukan kunjungan neonatal 1 dan kunjungan neonatal 2;
6) Masih kurangnya kesadaran ibu untuk melaksanakan kunjungan neonatal lengkap ke pelayanan kesehatan dengan bebagai alasan diantaranya kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya kunjungan neonatal, keengganan membawa anak yang masih terlalu kecil ke fasilitas pelayanan kesehatan dan kunjungan neonatal yang harus diantar oleh suami;
7) Masih kurangnya kesadaran ibu balita akan pentingnya melakukan pelayanan kesehatan anak balita yang ditunjukkan dengan masih adanya ibu yang enggan datang ke Posyandu dengan berbagai alasan pribadi atau anggapan hanya berkunjung ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi sehingga setelah usia pemberian imunisasi berakhir anak tidak dibawa ke Posyandu lagi;
8) Adanya perubahan definisi operasional yang mengharuskan seluruh anak usia pendidikan dasar diskrining sehingga memberatkan untuk petugas kesehatan di Puskesmas;
9) Keterbatasan jumlah petugas kesehatan di Puskesmas yang melakukan kegiatan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar;
10) Jumlah sasaran kegiatan yang tidak sebanding dengan jumlah dan jadwal petugas kesehatan sehingga kegiatan penjaringan kesehatan baru dilaksanakan pada anak usia sekolah dasar;
11) Masih terdapat kekurangan dalam sistem pencatatan dan pelaporan hasil penjaringan kesehatan karena pengelola program UKS tingkat Kabupaten masih melakukan uji coba sistem pencatatan pelaporan yang memudahkan petugas kesehatan di Puskesmas dalam entry data hasil penjaringan;
12) Jumlah sarana yang dimiliki oleh Puskesmas untuk pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada;
13) Jumlah posyandu lansia hanya satu posyandu untuk satu desa sehingga belum

bisa menjangkau penduduk lansia secara keseluruhan di wilayah tersebut;

14) Kurangnya kesadaran masyarakat yang berusia lanjut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ke fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari kunjungan lansia ke fasilitas pelayanan kesehatan hanya jika lansia tersebut dalam keadaan sakit dan rendahnya kunjungan lansia ke Posyandu lansia;
15) Keterbatasan sarana prasarana pendukung skrining kesehatan lansia sesuai standar misalnya kurangnya jumlah reagen/stick pemeriksaan gula darah, kolesterol dan lainnya;
16) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan karena pandemi Covid-19, sehingga banyak pelayanan kesehatan yang dibatasi.
17) Dinas Kesehatan masih memakai sasaran proyeksi yang terlalu tinggi dan belum berjalannya jejaring TBC secara maksimal untuk penemuan suspek;
18) Tidak semua orang mendapatkan pelayanan deteksi dini/test HIV karena menolak untuk ditest. Test HIV bersifat sukarela, sehingga petugas hanya sebatas menawarkan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

1) Melakukan update data sasaran riil di masyarakat melalui pendataan keluarga sehat di seluruh wilayah kerja Puskesmas walaupun belum selesai secara keseluruhan;
2) Mendukung peran aktif dan komitmen petugas kesehatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan antenatal dengan cara mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi bidan, pembinaan secara berkala di wilayah, supervisi fasilitatif, drill emergensi dan pendampingan oleh tenaga spesialis;
3) Menambah atau memperbaiki sarana prasana pendukung pelayanan antenatal yang sesuai standar kualitas yang memenuhi 10T;
4) Meningkatkan kualitas penggunaan buku KIA untuk melengkapi informasi yang didapatkan oleh ibu hamil dan petugas kesehatan;
5) Review pelaksanaan pencatatan kohort dan pelaporan PWS KIA yang benar secara berkala dan diintegrasikan dalam supervisi KIA;
6) Validasi pencatatan dan pelaporan KIA;
7) Memaksimalkan kuantitas dan kapasitas SDM yang ada di lingkup kabupaten

untuk mendukung peningkatan cakupan K4;

8) Melakukan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk memberikan informasi kepada ibu hamil agar memeriksakan diri sedini mungkin dan teratur ke petugas kesehatan;
9) Menyediakan rumah tunggu kelahiran dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada kegiatan Jaminan Persalinan untuk mendekatkan akses ibu hamil dan bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan;
10) Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya persalinan dilakukan di fasilitas pelayan kesehatan dengan melibatkan peran dari lintas program dan lintas sektor;
11) Bidan wilayah melakukan kunjungan rumah bagi bayi yang tidak melakukan kunjungan neonatal;
12) Meningkatkan peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar ibu nifas agar mengingatkan tentang pentingnya kunjungan neonatal;
13) Menggunakan aplikasi e-PPGBM untuk mengetahui secara update sasaran dan perkembangan anak balita yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk;
14) Memberikan dukungan penuh kepada masing-masing Puskesmas untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kunjungan ke Posyandu misalnya dengan Posyandu Ceria Sehat di Puskesmas Pace, Arisan Telur dan Praktek Emodemo di Posyandu wilayah Puskesmas Sukomoro, Pemahaman Tabel Antropometri untuk Pengentasan Balita Stunting (Maman Beli Petasan Banting) di Puskesmas Wilangan;
15) Merubah sistem pelaksanaan skrining tidak pada waktu baru masuk tahun ajaran baru tetapi dimulai pada awal tahun dengan mengikuti kalender anggaran;
16) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan hasil penjaringan kesehatan agar memudahkan dan mempercepat pelaporan;
17) Pemberian makanan tambahan bagi lansia dalam bentuk susu dalam rangka meningkatkan cakupan kunjungan Posyandu lansia;
18) Pelatihan kader lansia di tingkat Puskesmas;
19) Pelaksanaan senam lansia secara rutin di beberapa wilayah Puskesmas; dan
20) Peningkatan kapasitas pengelola program kesehatan lansia melalui pelatihan dan pembinaan.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

   Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

   Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari sumbernya sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Air limbah domestik yang diolah adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{283.053}{283.477} \times 100\%$$

$$= 99{,}85\%$$

Pada tahun 2021, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan adalah sebanyak 71.719 KK dan non perpipaan terlindungi adalah sebanyak 211.334 KK, sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 283.477 KK. Dengan demikian, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 99,85%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Limbah Domestik adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{308.436}{325.293} \text{ x } 100\%$$

$$= 94{,}82\%$$

Hingga tahun 2021, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 308.436 unit. Sedangkan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Nganjuk sebanyak 325.293 rumah. Dengan demikian, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 94,82%.

Tabel 4.16
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok minum untuk kebutuhan sehari - hari	100	99,85	99,85
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	94,82	94,82

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6,724,856,960.00**	**6,284,071,181.00**	**-440,785,779.00**	**93.45**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20,840,000.00**	**15,392,000.00**	**(5,448,000.00)**	**73.86**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,400,000.00	15,392,000.00	(8,000.00)	99.95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,440,000.00	0.00	(5,440,000.00)	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6,010,476,000.00**	**5,684,781,357.00**	**(325,694,643.00)**	**94.58**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,004,556,000.00	5,678,993,357.00	(325,562,643.00)	94.58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,960,000.00	2,844,000.00	(116,000.00)	96.08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,960,000.00	2,944,000.00	(16,000.00)	99.46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9,600,000.00**	**8,800,000.00**	**(800,000.00)**	**91.67**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9,600,000.00	8,800,000.00	(800,000.00)	91.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**292,125,460.00**	**250,814,923.00**	**(41,310,537.00)**	**85.86**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,583,400.00	3,889,000.00	(694,400.00)	84.85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,806,900.00	84,557,210.00	(6,249,690.00)	93.12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58,971,160.00	37,872,400.00	(21,098,760.00)	64.22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,500,000.00	3,507,300.00	(2,992,700.00)	53.96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,145,000.00	817,163.00	(5,327,837.00)	13.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122,694,000.00	117,861,850.00	(4,832,150.00)	96.06
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,425,000.00	2,310,000.00	(115,000.00)	95.26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**113,000,000.00**	**68,056,891.00**	**(44,943,109.00)**	**60.23**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,000,000.00	68,056,891.00	(44,943,109.00)	60.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**278,815,500.00**	**256,226,010.00**	**(22,589,490.00)**	**91.90**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,594,500.00	47,192,035.00	(3,402,465.00)	93.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,461,600.00	108,481,575.00	(14,980,025.00)	87.87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,959,400.00	24,410,000.00	(549,400.00)	97.80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79,800,000.00	76,142,400.00	(3,657,600.00)	95.42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	**38,461,065,180.00**	**36,185,755,920.00**	**-2,275,309,260.00**	**94.08**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**4,426,497,230.00**	**3,555,171,048.02**	**(871,326,181.98)**	**80.32**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**4,426,497,230.00**	**3,555,171,048.02**	**(871,326,181.98)**	**80.32**
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	86,620,700.00	79,220,000.00	(7,400,700.00)	91.46
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	188,768,100.00	170,469,149.00	(18,298,951.00)	90.31
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,047,163,080.00	3,265,115,499.02	(782,047,580.98)	80.68
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	103,945,350.00	40,366,400.00	(63,578,950.00)	38.83
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3,663,997,550.00**	**3,551,252,100.00**	**(112,745,450.00)**	**96.92**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3,663,997,550.00**	**3,551,252,100.00**	**(112,745,450.00)**	**96.92**
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	20,406,750.00	0.00	(20,406,750.00)	0.00
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	18,963,000.00	8,000,000.00	(10,963,000.00)	42.19
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3,624,627,800.00	3,543,252,100.00	(81,375,700.00)	97.75
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**26,602,920,000.00**	**25,748,617,350.00**	**(854,302,650.00)**	**96.79**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26,602,920,000.00	25,748,617,350.00	(854,302,650.00)	96.79
Pembangunan Jalan	26,602,920,000.00	25,748,617,350.00	(854,302,650.00)	96.79
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**3,767,650,400.00**	**3,330,715,421.64**	**(436,934,978.36)**	**88.40**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	3,767,650,400.00	3,330,715,421.64	(436,934,978.36)	88.40

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	228,850,400.00	193,374,400.00	(35,476,000.00)	84.50
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3,538,800,000.00	3,137,341,021.64	(401,458,978.36)	88.66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**28,875,701,460.00**	**22,539,056,595.71**	**-6,336,644,864.29**	**78.06**
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**17,390,944,200.00**	**12,358,962,296.06**	**-5,031,981,903.94**	**71.07**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**14,130,000.00**	**4,025,500.00**	**(10,104,500.00)**	**28.49**
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	14,130,000.00	4,025,500.00	(10,104,500.00)	28.49
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**17,980,000.00**	**0.00**	**(17,980,000.00)**	**0.00**
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	17,980,000.00	0.00	(17,980,000.00)	0.00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**16,992,659,200.00**	**12,098,922,796.06**	**(4,893,736,403.94)**	**71.20**
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16,815,027,000.00	12,063,763,380.00	(4,751,263,620.00)	71.74
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	177,632,200.00	35,159,416.06	(142,472,783.94)	19.79
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**22,175,000.00**	**0.00**	**(22,175,000.00)**	**0.00**
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	22,175,000.00	0.00	(22,175,000.00)	0.00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**344,000,000.00**	**256,014,000.00**	**(87,986,000.00)**	**74.42**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	344,000,000.00	256,014,000.00	(87,986,000.00)	74.42
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**3,553,568,200.00**	**3,136,642,240.00**	**-416,925,960.00**	**88.27**
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**44,842,200.00**	**30,689,100.00**	**(14,153,100.00)**	**68.44**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	44,842,200.00	30,689,100.00	(14,153,100.00)	68.44
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**3,508,726,000.00**	**3,105,953,140.00**	**(402,772,860.00)**	**88.52**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3,305,726,000.00	2,980,000,000.00	(325,726,000.00)	90.15
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	203,000,000.00	125,953,140.00	(77,046,860.00)	62.05
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**530,050,000.00**	**314,687,240.00**	**(215,362,760.00)**	**59.37**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**530,050,000.00**	**314,687,240.00**	**(215,362,760.00)**	**59.37**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	530,050,000.00	314,687,240.00	(215,362,760.00)	59.37
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**676,282,100.00**	**444,693,638.65**	**(231,588,461.35)**	**65.76**
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**676,282,100.00**	**444,693,638.65**	**(231,588,461.35)**	**65.76**
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	60,000,000.00	59,450,600.00	(549,400.00)	99.08
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	524,670,000.00	360,717,688.65	(163,952,311.35)	68.75
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	91,612,100.00	24,525,350.00	(67,086,750.00)	26.77

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.3.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 72 orang, baik yang berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Data pegawai menurut golongan dan jabatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.18
Jumlah Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	IV/B	1
2	Sekretaris Dinas	S1	IV/A	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S2	III/D	1
4	Kasubag Program Evaluasi dan Keuangan	S1	III/C	1
5	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	S2	IV/A	1
6	Kasi Perumahan Formal	S1	III/D	1
7	Kasi Perumahan Swadaya	S2	III/D	1
8	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan	S2	IV/A	1
9	Kasi Kawasan Permukiman	S1	III/D	1
10	Kasi Pertanahan	S1	III/D	1
11	Kasi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Bersih	S1	III/C	1
12	Kepala UPTD Hunian Sederhana	S1	III/D	1
13	Kepala UPTD Air Limbah Domestik	-	-	0
14	Kepala UPTD IPLT	-	-	0
15	Staf	S1	IIID	1
16	Staf	S1	IIIC	3
17	Staf	S1	IIIA	6
18	Staf	D3	IIIC	1
19	Staf	D3	IIIA	1
20	Staf	SLTA	IID	15
21	Staf	SLTA	IIC	5
22	Staf	SLTA	IIB	2
23	Staf	SLTP	IIB	1
24	Staf	SD	ID	5
25	Staf	SD	IC	4
JUMLAH				**56**

Tabel 4.19
Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Staf Non ASN	S1	5
2	Staf Non ASN	D3	1
3	Staf Non ASN	D2	1
4	Staf Non ASN	SLTA	9
JUMLAH			**16**

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Permasalahan
   1) Jumlah sumber mata air yang difungsikan untuk penyediaan air minum SPAM masih terbatas. Hal ini dibuktikan bahwa di Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong pada musim kemarau kesulitan dalam memperoleh air sehingga pengelolaan dan penyediaan air minum SPAM belum dapat dikelola secara keseluruhan dan maksimal.
   2) Dengan adanya poin satu di atas, maka untuk daerah yang kesulitan dalam memperoleh air tersebut juga berimbas pada sulitnya pengelolaan air limbah.

b. Solusi
   1) Untuk di wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air, diadakan kerjasama untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam menampung air hujan yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

   Indikator yang digunakan adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan ketentuan :

   1) Pada saat masa pasca bencana;
   2) Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau
   3) Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

   Indikatornya adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dalam rangka mendukung:

   1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
   2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung dengan membandingkan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{284}{284} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2021, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 adalah sebanyak 284 rumah, sedangkan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021 sebanyak 284 rumah. Dengan demikian, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100%.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

Perhitungan capaian SPM dalam fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan antara rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten} = \frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{205}{205} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2021, rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa, dan rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni pada tahun 2021 adalah sebanyak 205 rumah, sedangkan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun 2021 sebanyak 205 rumah. Dengan demikian, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten telah mencapai 100%.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6,724,856,960.00**	**6,284,071,181.00**	**-440,785,779.00**	**93.45**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20,840,000.00**	**15,392,000.00**	**(5,448,000.00)**	**73.86**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,400,000.00	15,392,000.00	(8,000.00)	99.95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,440,000.00	0.00	(5,440,000.00)	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6,010,476,000.00**	**5,684,781,357.00**	**(325,694,643.00)**	**94.58**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,004,556,000.00	5,678,993,357.00	(325,562,643.00)	94.58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,960,000.00	2,844,000.00	(116,000.00)	96.08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,960,000.00	2,944,000.00	(16,000.00)	99.46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9,600,000.00**	**8,800,000.00**	**(800,000.00)**	**91.67**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9,600,000.00	8,800,000.00	(800,000.00)	91.67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**292,125,460.00**	**250,814,923.00**	**(41,310,537.00)**	**85.86**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,583,400.00	3,889,000.00	(694,400.00)	84.85
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,806,900.00	84,557,210.00	(6,249,690.00)	93.12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58,971,160.00	37,872,400.00	(21,098,760.00)	64.22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,500,000.00	3,507,300.00	(2,992,700.00)	53.96
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,145,000.00	817,163.00	(5,327,837.00)	13.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122,694,000.00	117,861,850.00	(4,832,150.00)	96.06
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,425,000.00	2,310,000.00	(115,000.00)	95.26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**113,000,000.00**	**68,056,891.00**	**(44,943,109.00)**	**60.23**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,000,000.00	68,056,891.00	(44,943,109.00)	60.23

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**278,815,500.00**	**256,226,010.00**	**(22,589,490.00)**	**91.90**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,594,500.00	47,192,035.00	(3,402,465.00)	93.28
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123,461,600.00	108,481,575.00	(14,980,025.00)	87.87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,959,400.00	24,410,000.00	(549,400.00)	97.80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79,800,000.00	76,142,400.00	(3,657,600.00)	95.42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	**38,461,065,180.00**	**36,185,755,920.00**	**-2,275,309,260.00**	**94.08**
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**4,426,497,230.00**	**3,555,171,048.02**	**(871,326,181.98)**	**80.32**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**4,426,497,230.00**	**3,555,171,048.02**	**(871,326,181.98)**	**80.32**
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	86,620,700.00	79,220,000.00	(7,400,700.00)	91.46
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	188,768,100.00	170,469,149.00	(18,298,951.00)	90.31
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,047,163,080.00	3,265,115,499.02	(782,047,580.98)	80.68
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	103,945,350.00	40,366,400.00	(63,578,950.00)	38.83
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3,663,997,550.00**	**3,551,252,100.00**	**(112,745,450.00)**	**96.92**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3,663,997,550.00**	**3,551,252,100.00**	**(112,745,450.00)**	**96.92**
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	20,406,750.00	0.00	(20,406,750.00)	0.00
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	18,963,000.00	8,000,000.00	(10,963,000.00)	42.19
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	3,624,627,800.00	3,543,252,100.00	(81,375,700.00)	97.75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**26,602,920,000.00**	**25,748,617,350.00**	**(854,302,650.00)**	**96.79**
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26,602,920,000.00	25,748,617,350.00	(854,302,650.00)	96.79
Pembangunan Jalan	26,602,920,000.00	25,748,617,350.00	(854,302,650.00)	96.79
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**3,767,650,400.00**	**3,330,715,421.64**	**(436,934,978.36)**	**88.40**
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,767,650,400.00	3,330,715,421.64	(436,934,978.36)	88.40
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	228,850,400.00	193,374,400.00	(35,476,000.00)	84.50
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3,538,800,000.00	3,137,341,021.64	(401,458,978.36)	88.66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**28,875,701,460.00**	**22,539,056,595.71**	**-6,336,644,864.29**	**78.06**
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**17,390,944,200.00**	**12,358,962,296.06**	**-5,031,981,903.94**	**71.07**
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**14,130,000.00**	**4,025,500.00**	**(10,104,500.00)**	**28.49**
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	14,130,000.00	4,025,500.00	(10,104,500.00)	28.49
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**17,980,000.00**	**0.00**	**(17,980,000.00)**	**0.00**
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	17,980,000.00	0.00	(17,980,000.00)	0.00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**16,992,659,200.00**	**12,098,922,796.06**	**(4,893,736,403.94)**	**71.20**
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16,815,027,000.00	12,063,763,380.00	(4,751,263,620.00)	71.74
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	177,632,200.00	35,159,416.06	(142,472,783.94)	19.79
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**22,175,000.00**	**0.00**	**(22,175,000.00)**	**0.00**
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	22,175,000.00	0.00	(22,175,000.00)	0.00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**344,000,000.00**	**256,014,000.00**	**(87,986,000.00)**	**74.42**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	344,000,000.00	256,014,000.00	(87,986,000.00)	74.42
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**3,553,568,200.00**	**3,136,642,240.00**	**-416,925,960.00**	**88.27**
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**44,842,200.00**	**30,689,100.00**	**(14,153,100.00)**	**68.44**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	44,842,200.00	30,689,100.00	(14,153,100.00)	68.44
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**3,508,726,000.00**	**3,105,953,140.00**	**(402,772,860.00)**	**88.52**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3,305,726,000.00	2,980,000,000.00	(325,726,000.00)	90.15
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	203,000,000.00	125,953,140.00	(77,046,860.00)	62.05
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**530,050,000.00**	**314,687,240.00**	**(215,362,760.00)**	**59.37**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**530,050,000.00**	**314,687,240.00**	**(215,362,760.00)**	**59.37**
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	530,050,000.00	314,687,240.00	(215,362,760.00)	59.37
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**676,282,100.00**	**444,693,638.65**	**(231,588,461.35)**	**65.76**
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**676,282,100.00**	**444,693,638.65**	**(231,588,461.35)**	**65.76**
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	60,000,000.00	59,450,600.00	(549,400.00)	99.08
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	524,670,000.00	360,717,688.65	(163,952,311.35)	68.75
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	91,612,100.00	24,525,350.00	(67,086,750.00)	26.77

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.4.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 72 orang, baik yang berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Data pegawai menurut golongan dan jabatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.22
Jumlah Pegawai ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S2	IV/B	1
2	Sekretaris Dinas	S1	IV/A	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S2	III/D	1
4	Kasubag Program Evaluasi dan Keuangan	S1	III/C	1
5	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	S2	IV/A	1
6	Kasi Perumahan Formal	S1	III/D	1
7	Kasi Perumahan Swadaya	S2	III/D	1
8	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan	S2	IV/A	1
9	Kasi Kawasan Permukiman	S1	III/D	1
10	Kasi Pertanahan	S1	III/D	1
11	Kasi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Bersih	S1	III/C	1
12	Kepala UPTD Hunian Sederhana	S1	III/D	1
13	Kepala UPTD Air Limbah Domestik	-	-	0
14	Kepala UPTD IPLT	-	-	0
15	Staf	S1	IIID	1
16	Staf	S1	IIIC	3
17	Staf	S1	IIIA	6
18	Staf	D3	IIIC	1
19	Staf	D3	IIIA	1
20	Staf	SLTA	IID	15
21	Staf	SLTA	IIC	5
22	Staf	SLTA	IIB	2

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Pangkat/ Golongan	Jumlah
23	Staf	SLTP	IIB	1
24	Staf	SD	ID	5
25	Staf	SD	IC	4
JUMLAH				**56**

Tabel 4.23
Jumlah Pegawai Non ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Staf Non ASN	S1	5
2	Staf Non ASN	D3	1
3	Staf Non ASN	D2	1
4	Staf Non ASN	SLTA	9
JUMLAH			**16**

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Permasalahan
   1) Untuk korban bencana tanah longsor Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos sebanyak 54 KK masih menunggu realisasi bantuan anggaran dari BNPB
   2) Terlambatnya proses tukar menukar kawasan hutan (TMKH) untuk lahan resettlement sehingga masyarakat belum bisa membangun di lahan yang sudah disiapkan oleh Pemda

b. Solusi
   1) Direncanakan apabila bantuan dari BNPB tidak cair di Tahun 2022, maka akan dianggarkan dari APBD Kabupaten Nganjuk
   2) Percepatan pengurusan tukar menukar kawasan hutan (TMKH)

4.5 SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan pada sub urusan trantibum adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Terdapat 4 (empat) mutu pelayanan dasar pada sub bidang trantibum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, yakni:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut memiliki pengukuran capaian yang didasarkan pada :

a. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
    1) Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil adalah kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

- Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan adalah tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada adalah yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2021. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Adapun penetapan target awal Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun

Ketika seluruh Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka optimalisasi terhadap capaian angka layanan dasar Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.5.3 Realisasi

Pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk bidang ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 :

Tabel 4.25
Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal						Keterangan
			Indikator	Komponen		Rumus		Tolak Ukur Capaian	Capaian	
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Pemenuhan Standar Operasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada	SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada		Ada atau Tidak SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada		Ada	Ada	
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pemenuhan Kendaraan Operasional	Kendaraan dalmas	A	Jumlah kendaraan dalmas yang ada	0	x 100%	Tersedianya kendaraan dalmas	0%	Satu regu terdiri atas 10 anggota dan 1 komandan regu
				B	Jumlah regu dalmas	5				
			Kendaraan patroli	A	Jumlah kendaraan patrol yang ada	3	x 100%	Tersedianya kendaraan patroli	40 %	- Kendaraan jenis offroad/jeep, double cabin, minibus - Roda dua
				B	Jumlah regu	5				
			Kendaraan angkut	Pengadaan kendaraan angkut dapat dilakukan dengan melihat banyaknya jumlah penertiban atau pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah		Ada atau Tidak		Tersedianya Kendaraan Angkut	Belum	- Kendaraan jenis truk - Dipergunakan untuk mengangkut pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), pekerja seks komersial (PSK), pedagang kaki lima (PKL) dan hasil-hasil penertiban lainnya
		Pemenuhan perlengkapan operasional	Perlengkapan perorangan	A	Jumlah perlengkapan perorangan yang ada	0		Tersedianya perlengkapan	0%	Perlengkapan perorangan per paket

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal					Keterangan
			Indikator	Komponen	Rumus	Tolak Ukur Capaian	Capaian	
				B Jumlah anggota Pol PP yang tergabung dalam regu	52 x 100%	perorangan		terdiri atas: a. tonfa dan holster tonfa; b. borgol; c. tameng; d. senter; e. ferplas; f. tas atau ransel; g. *sleeping bag*; h. jaket; i. rompi/*body protector*; j. masker.
			Perlengkapan beregu	Jumlah perlengkapan beregu yang dimiliki	Ada atau Tidak	Tersedianya perlengkapan beregu	Tidak ada	Perlengkapan beregu terdiri dari perlengkapan perorangan ditambah dengan matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi
			Perlengkapan patroli	Perlengkapan patroli yang dimiliki	Ada atau Tidak	Tersedianya perlengkapan patroli	Ada	Perlengkapan patroli terdiri dari kendaraan patroli, perlengkapan perorangan, ditambah peralatan komunikasi.

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal							Keterangan
			Indikator	Komponen			Rumus		Tolak Ukur Capaian	Capaian	
			Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada	Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada yang dimiliki			Ada atau Tidak		Tersedianya perlengkapan penegakan Perda dan Perkada	Belum	Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat	Pemenuhan standar kualitas anggota Satpol PP	Persentase Pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	A	Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	43	x 100%	100%	76,78%	
				B	Jumlah Pejabat Pol PP	56				
			Persentase Pejabat Fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A	Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	5	x 100%	100%	8,93%	
				B	Jumlah Pejabat Pol PP	56				
			Persentase Pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A	Jumlah Pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	2	x 100%	100%	50%	
				B	Jumlah Pejabat PPNS Pol PP	4				
4	Standar pelayanan masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat	Pelayanan kerugian material	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan kerugian materil akibat dari	A	Jumlah masyarakat memperoleh layanan kerugian materil	100	x 100%	100%	100%	- Biaya 2,5% dari operasional penegakan Perda

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal							Keterangan
			Indikator	Komponen		Rumus		Tolak Ukur Capaian	Capaian	
	penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		dari penegakan hukum Perda dan Perkada	B	Jumlah keseluruhan masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan kerugian materil	100				dan Perkada yang sedang dilakukan - Berada pada jarak antara 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada - Tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada yang ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan/masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat
		Pelayanan pengobatan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pengobatan yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada	A	Jumlah masyarakat memperoleh layanan pengobatan	100	x 100%	100%	100%	
				B	Jumlah keseluruhan masyarakat yang seharusnya memperoleh layanan pengobatan	100				

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 25 (dua puluh lima) kegiatan penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2021 yang dilaksanakan, tidak terdapat adanya laporan terkait dampak yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah tercapai 100%.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Alokasi Anggaran Penerapan SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Satuan Polisi Pamong Praja	**17,272,182,812.00**	**14,865,145,535.02**	**-2,407,037,276.98**	**86.06**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8,646,170,906.00**	**7,442,623,767.51**	**-1,203,547,138.49**	**86.08**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20,159,000.00**	**20,102,000.00**	**(57,000.00)**	**99.72**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,159,000.00	20,102,000.00	(57,000.00)	99.72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7,400,793,000.00**	**6,267,765,901.00**	**(1,133,027,099.00)**	**84.69**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,391,831,000.00	6,258,902,901.00	(1,132,928,099.00)	84.67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,672,000.00	5,658,000.00	(14,000.00)	99.75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,290,000.00	3,205,000.00	(85,000.00)	97.42
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**272,974,950.00**	**254,110,800.00**	**(18,864,150.00)**	**93.09**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92,951,700.00	92,578,000.00	(373,700.00)	99.60
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180,023,250.00	161,532,800.00	(18,490,450.00)	89.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**190,521,460.00**	**185,746,544.00**	**(4,774,916.00)**	**97.49**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,423,200.00	1,406,500.00	(16,700.00)	98.83
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,081,860.00	41,298,682.00	(783,178.00)	98.14

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,208,900.00	6,122,400.00	(1,086,500.00)	84.93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000.00	8,390,000.00	(10,000.00)	99.88
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,766,000.00	8,498,070.00	(267,930.00)	96.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,887,000.00	115,301,492.00	(2,585,508.00)	97.81
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,754,500.00	4,729,400.00	(25,100.00)	99.47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**56,758,596.00**	**52,371,000.00**	**(4,387,596.00)**	**92.27**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,758,596.00	52,371,000.00	(4,387,596.00)	92.27
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**99,095,000.00**	**93,084,714.00**	**(6,010,286.00)**	**93.93**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,595,000.00	1,550,000.00	(45,000.00)	97.18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,500,000.00	67,534,714.00	(5,965,286.00)	91.88
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**605,868,900.00**	**569,442,808.51**	**(36,426,091.49)**	**93.99**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113,456,800.00	101,112,493.00	(12,344,307.00)	89.12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311,406,700.00	288,116,119.00	(23,290,581.00)	92.52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,448,400.00	30,108,200.00	(340,200.00)	98.88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,557,000.00	150,105,996.51	(451,003.49)	99.70
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1,742,851,450.00**	**1,612,705,900.00**	**-130,145,550.00**	**92.53**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1,647,276,250.00**	**1,521,389,170.00**	**(125,887,080.00)**	**92.36**
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	331,920,000.00	320,904,758.00	(11,015,242.00)	96.68
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80,241,250.00	63,711,646.00	(16,529,604.00)	79.40
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,709,000.00	21,425,775.00	(6,283,225.00)	77.32

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,207,406,000.00	1,115,346,991.00	(92,059,009.00)	92.38
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**95,575,200.00**	**91,316,730.00**	**(4,258,470.00)**	**95.54**
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	83,404,900.00	81,198,670.00	(2,206,230.00)	97.35
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12,170,300.00	10,118,060.00	(2,052,240.00)	83.14
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**911,040,950.00**	**868,105,421.00**	**(42,935,529.00)**	**95.29**
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**911,040,950.00**	**868,105,421.00**	**(42,935,529.00)**	**95.29**
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	678,049,950.00	640,009,700.00	(38,040,250.00)	94.39
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90,921,000.00	88,703,721.00	(2,217,279.00)	97.56
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	137,070,000.00	134,442,000.00	(2,628,000.00)	98.08

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berikut ini tersaji data personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.27
Dukungan Personil Urusan Trantibum

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Satpol PP	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum	9
	- Sub. Bagian Program Evaluasi dan Keuangan	8
	Jumlah	**19**
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum	1
	- Seksi Ops Dal	57
	- Seksi Tibum dan Tranmasy	4
	Jumlah	**62**
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
	- Seksi Linmas	3
	- Seksi Binpotmas	3
	Jumlah	**7**
5.	Kepala Bidang Penegakan Per UU an	1
	- Seksi Binwasluh	3
	- Seksi Penyidikan dan Penindakan	3
	Jumlah	**6**
6.	Kepala UPT Pemadam Kebakaran	-
	- Petugas Pemadam Kebakaran	40
	Jumlah	**40**
7.	Clening Servis	2
	Jumlah	**2**
Jumlah Keseluruhan		**136**

Sumber : Sekretariat Satpol PP Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah pemenuhan standar sarana, prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Satpol PP secara rutin mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah lainnya. Untuk memenuhi capaian SPM, akan dipenuhi secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia di Tahun 2022.

4.6 SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran daerah ditujukan dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit harus memuat :

a. Layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2021. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah. Adapun penetapan target awal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.28
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk sub urusan kebakaran daerah. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah dengan teknis perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota :

a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran dihitung dengan membandingkan antara jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten pada Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten pada Tahun 2021. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (}\textit{response time}\text{) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten pada Tahun X}} \times 100\%$$

$$= \frac{47}{47} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2021, jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten pada Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah sebanyak 47 layanan, sedangkan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten pada Tahun 2021 sebanyak 47 kejadian. Dengan demikian, penyediaan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah mencapai 100%.

b. Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dihitung dengan membandingkan antara jumlah layanan pemadaman di Kabupaten pada Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten pada Tahun 2021. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Layanan Pemadaman Yang Dilakukan Oleh Relawan Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (}\textit{response time}\text{) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten pada Tahun X}} \times 100\%$$

$$= \frac{47}{47} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2021, jumlah layanan pemadaman di Kabupaten pada Tahun 2021 dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah sebanyak 47 layanan, sedangkan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten pada Tahun 2021 sebanyak 47 kejadian. Dengan demikian, penyediaan layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah telah mencapai 100%.

c. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah
    1) Evakuasi sarang tawon 143 kali
    2) Evakuasi ular 8 kali
    3) Evakuasi burung hantu 1 kali
    4) Evakuasi cincin 4 kali
    5) Penyemprotan akses jalan terdampak longsor 1 kali
    6) Pemotongan dan pembersihan pohon tumbang 1 kali

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Satuan Polisi Pamong Praja	**17,272,182,812.00**	**14,865,145,535.02**	**-2,407,037,276.98**	**86.06**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8,646,170,906.00**	**7,442,623,767.51**	**-1,203,547,138.49**	**86.08**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20,159,000.00**	**20,102,000.00**	**(57,000.00)**	**99.72**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,159,000.00	20,102,000.00	(57,000.00)	99.72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7,400,793,000.00**	**6,267,765,901.00**	**(1,133,027,099.00)**	**84.69**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,391,831,000.00	6,258,902,901.00	(1,132,928,099.00)	84.67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,672,000.00	5,658,000.00	(14,000.00)	99.75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,290,000.00	3,205,000.00	(85,000.00)	97.42
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**272,974,950.00**	**254,110,800.00**	**(18,864,150.00)**	**93.09**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92,951,700.00	92,578,000.00	(373,700.00)	99.60
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180,023,250.00	161,532,800.00	(18,490,450.00)	89.73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**190,521,460.00**	**185,746,544.00**	**(4,774,916.00)**	**97.49**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,423,200.00	1,406,500.00	(16,700.00)	98.83
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,081,860.00	41,298,682.00	(783,178.00)	98.14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,208,900.00	6,122,400.00	(1,086,500.00)	84.93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,400,000.00	8,390,000.00	(10,000.00)	99.88
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,766,000.00	8,498,070.00	(267,930.00)	96.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,887,000.00	115,301,492.00	(2,585,508.00)	97.81
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,754,500.00	4,729,400.00	(25,100.00)	99.47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**56,758,596.00**	**52,371,000.00**	**(4,387,596.00)**	**92.27**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56,758,596.00	52,371,000.00	(4,387,596.00)	92.27
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**99,095,000.00**	**93,084,714.00**	**(6,010,286.00)**	**93.93**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,595,000.00	1,550,000.00	(45,000.00)	97.18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,500,000.00	67,534,714.00	(5,965,286.00)	91.88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**605,868,900.00**	**569,442,808.51**	**(36,426,091.49)**	**93.99**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113,456,800.00	101,112,493.00	(12,344,307.00)	89.12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311,406,700.00	288,116,119.00	(23,290,581.00)	92.52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,448,400.00	30,108,200.00	(340,200.00)	98.88
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,557,000.00	150,105,996.51	(451,003.49)	99.70
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1,742,851,450.00**	**1,612,705,900.00**	**-130,145,550.00**	**92.53**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1,647,276,250.00**	**1,521,389,170.00**	**(125,887,080.00)**	**92.36**
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	331,920,000.00	320,904,758.00	(11,015,242.00)	96.68
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80,241,250.00	63,711,646.00	(16,529,604.00)	79.40
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,709,000.00	21,425,775.00	(6,283,225.00)	77.32
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,207,406,000.00	1,115,346,991.00	(92,059,009.00)	92.38
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**95,575,200.00**	**91,316,730.00**	**(4,258,470.00)**	**95.54**
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	83,404,900.00	81,198,670.00	(2,206,230.00)	97.35
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12,170,300.00	10,118,060.00	(2,052,240.00)	83.14
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	**911,040,950.00**	**868,105,421.00**	**(42,935,529.00)**	**95.29**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**911,040,950.00**	**868,105,421.00**	**(42,935,529.00)**	**95.29**
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	678,049,950.00	640,009,700.00	(38,040,250.00)	94.39
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90,921,000.00	88,703,721.00	(2,217,279.00)	97.56
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	137,070,000.00	134,442,000.00	(2,628,000.00)	98.08

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah. Berikut ini tersaji data personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.30
Dukungan Personil Urusan Trantibum

No.	Kepala / Sekretariat/ Bidang / Subbag / Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Satpol PP	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum	9
	- Sub. Bagian Program Evaluasi dan Keuangan	8
	Jumlah	**19**
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum	1
	- Seksi Ops Dal	57
	- Seksi Tibum dan Tranmasy	4
	Jumlah	**62**
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
	- Seksi Linmas	3
	- Seksi Binpotmas	3
	Jumlah	**7**
5.	Kepala Bidang Penegakan Per UU an	1
	- Seksi Binwasluh	3
	- Seksi Penyidikan dan Penindakan	3
	Jumlah	**6**
6.	Kepala UPT Pemadam Kebakaran	-
	- Petugas Pemadam Kebakaran	40

No.	Kepala / Sekretariat/ Bidang / Subbag / Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
	Jumlah	**40**
7.	Cleaning Servis	2
	Jumlah	**2**
Jumlah Keseluruhan		**136**

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Sarana dan prasarana berupa kendaraan mobil yang hanya terdapat 4 unit dan digunakan untuk operasional 3 pos pantau
2) Kesulitan dalam memperoleh sumber air di lokasi kebakaran dan belum adanya truk water supply
3) Jumlah petugas pemadam masih kurang dari standar
4) Kondisi jalan dan lalu lintas yang berpengaruh pada wilayah jangkuan tiap pos yang luas. Saat ini terdapat 3 pos pantau untuk menangani seluruh wilayah di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut:

1) Pada tahun 2022, akan dilakukan pengadaan alat pendukung pemadaman kebakaran dan penambahan petugas pemadam
2) Membuka pos pantau baru di Kecamatan Kertosono pada tahun 2022
3) Pada tahun 2023, direncanakan melakukan pengadaan armada baik mobil pemadam dan truk water supply serta membuka pos pantau baru di Kecamatan Berbek

4.7 SUB URUSAN KEBENCANAAN

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada sub urusan bencana daerah ditujukan dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, antara lain :

a. Pelayanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten yang rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah Kabupaten/Kota.

Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas (rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis, avian influenza/flu burung) dan Covid-19. Informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, antara lain adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta Covid-19.

Beberapa indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan informasi rawan bencana :

1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana
3) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana
4) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana
5) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Layanan ini diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana terhadap bencana yang ada. Seperti kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) pada desa rawan bencana, sosialisasi pengurangan risiko bencana dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :

1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana;
3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana;
4) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana; dan
6) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas

4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2021. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan

Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang sub urusan bencana. Berikut merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, yaitu :

Tabel 4.31
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

4.7.3 Realisasi

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, realisasi capaiannya 70.98% pada batas akhir tahun 2021. Capain kinerja SPM pada pelayanan informasi rawan bencana tersebut diperoleh dari rata-rata 5 (lima) capaian indikator yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.32
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Yang belum terlayani	Persentase (%)
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga Kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 dari data Badan Pusat Statistik 2021	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga Kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 dari data Badan Pusat Statistik 2021	0	100
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di	891.054 Keterangan :	742.521 Keterangan :	148.533	83,33

No	Indikator Kinerja	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Yang belum terlayani	Persentase (%)
	kawasan rawan bencana	Jumlah warga di daerah yang berpotensi rawan bencana pada Kabupaten Nganjuk	Jumlah warga di daearah rawan bencana yang sudah dibentuk DESTANA (Desa Tangguh Bencana)		
3	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	891.054 Keterangan : Jumlah warga di daerah yang berpotensi rawan bencana pada Kabupaten Nganjuk	891.054 Keterangan : Jumlah warga di daerah yang berpotensi rawan bencana pada Kabupaten Nganjuk	0	100
4	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	891.054 Keterangan : Jumlah warga di daerah yang berpotensi rawan bencana pada Kabupaten Nganjuk	3.870 Keterangan : Jumlah warga di daerah rawan bencana yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi, KIE rawan bencana	887.184	0,43
5	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	891.054 Keterangan : Jumlah warga di daerah yang berpotensi rawan bencana pada Kabupaten Nganjuk	678.397 Keterangan : Jumlah warga di daerah rawan bencana yang sudah dilakukan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	212.657	71,13
	Jumlah Total Persentase				354,89
	Rata-Rata Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana 354.89 : 5 =				70,98

b) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, realisasi capaiannya 100% pada batas akhir tahun 2021. Capaian kinerja SPM pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota berupa Penanganan mitigasi struktural pra bencana dengan penerima manfaat adalah seluruh warga Kabupaten Nganjuk. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.33
Realisasi Kinerja SPM Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Yang belum terlayani	Persentase (%)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2021	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2021	0	100

c) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, realisasi capaiannya yaitu 100% pada batas akhir tahun 2021. Capain kinerja SPM pada Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dari rata-rata 6 (enam) capaian indikator yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.34
Realisasi Kinerja SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Indikator Kinerja	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Yang belum terlayani	Persentase (%)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	948 Keterangan : Warga negara yang menjadi korban terdampak bencana	948 Keterangan : Warga negara yang menjadi korban terdampak bencana dan sudah terlayani	0	100
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	948 Keterangan : Warga negara yang menjadi korban terdampak bencana	948 Keterangan : Warga negara yang menjadi korban terdampak bencana	0	100
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	111 Keterangan : Jumlah kejadian bencana	111 Keterangan : Jumlah kejadian bencana yang sudah dilakukan respon cepat darurat bencana	0	100
4	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 dari data	0	100

No	Indikator Kinerja	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang sudah terlayani	Yang belum terlayani	Persentase (%)
		dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2021	Badan Pusat Statistik Tahun 2021		
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	111 Keterangan : Jumlah kejadian Bencana	111 Keterangan : Jumlah kejadian bencana yang sudah dilakukan Pelaksanaan, Pencarian, pertolongan Evakuasi (PPE) Korban Bencana	0	100
6	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 sebagai penerima manfaat Pernyataan Darurat Covid19	1.103.902 Keterangan : Seluruh warga kabupaten Nganjuk sejumlah 1.103.902 dari data Badan Pusat Statistik 2021	0	100
	Jumlah Total Persentase				600
	Rata-rata Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana 600 : 6 =				100

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**6,275,035,900.00**	**4,919,116,309.00**	**-1,355,919,591.00**	**78.39**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4,117,846,160.00**	**3,030,940,659.00**	**-1,086,905,501.00**	**73.60**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**18,240,530.00**	**15,176,550.00**	**(3,063,980.00)**	**83.20**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,409,000.00	5,049,850.00	(359,150.00)	93.36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,868,300.00	2,215,800.00	(652,500.00)	77.25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,963,230.00	7,910,900.00	(2,052,330.00)	79.40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,502,848,000.00**	**2,490,002,183.00**	**(1,012,845,817.00)**	**71.09**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,498,100,000.00	2,485,594,583.00	(1,012,505,417.00)	71.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,374,000.00	2,157,600.00	(216,400.00)	90.88

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,374,000.00	2,250,000.00	(124,000.00)	94.78
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**194,886,330.00**	**170,526,989.00**	**(24,359,341.00)**	**87.50**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	964,200.00	955,500.00	(8,700.00)	99.10
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,120,400.00	21,001,500.00	(11,118,900.00)	65.38
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,998,480.00	5,386,100.00	(612,380.00)	89.79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000.00	5,360,000.00	(40,000.00)	99.26
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,321,250.00	7,950,160.00	(4,371,090.00)	64.52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138,082,000.00	129,873,729.00	(8,208,271.00)	94.06
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**29,399,000.00**	**28,955,000.00**	**(444,000.00)**	**98.49**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**71,585,000.00**	**48,546,634.00**	**(23,038,366.00)**	**67.82**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,985,000.00	1,377,460.00	(607,540.00)	69.39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,600,000.00	47,169,174.00	(22,430,826.00)	67.77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**300,887,300.00**	**277,733,303.00**	**(23,153,997.00)**	**92.30**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231,088,100.00	212,097,806.00	(18,990,294.00)	91.78
Pemeliharaan Mebel	4,953,500.00	4,860,000.00	(93,500.00)	98.11
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,139,500.00	17,556,385.00	(2,583,115.00)	87.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44,706,200.00	43,219,112.00	(1,487,088.00)	96.67
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**2,157,189,740.00**	**1,888,175,650.00**	**-269,014,090.00**	**295.05**
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**236,418,900.00**	**182,458,500.00**	**(53,960,400.00)**	**77.18**
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	150,000,000.00	149,820,000.00	(180,000.00)	99.88
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	86,418,900.00	32,638,500.00	(53,780,400.00)	37.77
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**1,280,826,240.00**	**1,227,598,250.00**	**(53,227,990.00)**	**95.84**
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	150,000,000.00	149,952,000.00	(48,000.00)	99.97
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	195,912,400.00	188,360,400.00	(7,552,000.00)	96.15
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	34,393,300.00	32,667,800.00	(1,725,500.00)	94.98

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	40,237,540.00	19,919,350.00	(20,318,190.00)	49.50
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	687,400,000.00	687,400,000.00	0.00	100.00
Penyusunan Rencana Kontijensi	125,000,000.00	124,784,000.00	(216,000.00)	99.83
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	47,883,000.00	24,514,700.00	(23,368,300.00)	51.20
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**605,375,750.00**	**462,333,650.00**	**(143,042,100.00)**	**76.37**
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	549,555,000.00	414,169,000.00	(135,386,000.00)	75.36
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24,195,150.00	19,063,000.00	(5,132,150.00)	78.79
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	31,625,600.00	29,101,650.00	(2,523,950.00)	92.02
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**34,568,850.00**	**15,785,250.00**	**(18,783,600.00)**	**45.66**
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	34,568,850.00	15,785,250.00	(18,783,600.00)	45.66

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebanyak 52 orang dengan perincian :

a) PNS : 16 orang
b) THL Tim Reaksi Cepat (TRC) : 26 orang
c) THL Tenaga Administrasi : 8 orang
d) THL Tenaga Kebersihan : 2 orang

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 berdasarkan pendidikan, sebagai berikut :

a) PNS / CPNS :
   1) S2 : 4 orang
   2) S1 : 12 orang
b) THL Tim Reaksi Cepat (TRC) :
   1) S2 : `2 orang
   2) S1 : 7 orang
   3) D4 : 0 orang
   4) D3 : 0 orang
   5) D2 : 2 orang
   6) D1 : 0 orang
   7) SLTA : 16 orang
   8) SLTP : 1 orang

c) THL Tenaga Administrasi :
   1) S1 : 5 orang
   2) D3 : 1 orang
   3) SLTA : 2 orang

d) THL Tenaga Kebersihan :
   1) SLTA : 2 orang

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM oleh BPBD Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa masalah dan kendala diantaranya :

1) Dokumen Kajian Resiko Bencana sudah tersusun tetapi masih perlu legalitas dari BNPB dan pemetaan lokasi rawan bencana sudah mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan Dokumen Kajian Resiko Bencana yang terbaru.
2) Dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan SPM terbatas apalagi dengan adanya pandemi Covid19 sehingga dilakukan refocussing anggaran maka banyak kegiatan yang menunjang pencapaian SPM terpaksa ditiadakan.
3) Beberapa indikator pelayanan SPM sulit dicapai 100% dalam kurun waktu 1 (satu) tahun karena formula perbandingannya yang sangat tidak mungkin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mengingat anggaran yang terbatas. Seperti melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, jumlah warga yang harus dilayani untuk menerima manfaat kegiatan tersebut sebanyak 891.054 orang, dengan kondisi anggaran yang terbatas, sangat tidak mungkin melaksanakan sosialisasi kepada sebanyak 891.054 orang dalam waktu setahun.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka solusi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana harus segera dilegalitaskan sebagai dasar untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk.
2) Perlunya perhatian khusus dari Kepala Daerah dengan dibantu BAPPEDA untuk merencanakan alokasi anggaran SPM sesuai aturan yang berlaku karena BPBD berkewajiban melakukan penerapan SPM sub urusan bencana yang dijamin pelaksanaannya dan sanksinya sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 2 tahun 2018 pasal 20 yaitu Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.

3) Harus membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Urusan Bencana.
4) Indikator dan formula pelayanan SPM bisa ditetapkan sendiri pada awal tahun perencanaan sehingga penetapan target bisa menyesuaikan APBD yang ada, yang pada akhirnya capaian kinerja pada tahun tersebut dapat terukur maksimal.

4.8 URUSAN SOSIAL

4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelayanan dasar yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial
   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial
   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Kriteria penerima layanan rehabilitasi per satu kali kejadian bencana adalah sebagai berikut :

1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang sosial.

4.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Sosial diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2021. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang Sosial. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36
Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang sosial yang optimal, Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Mininal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh Dinas Sosial dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar teknis pembiayaan pemenuhan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

4.8.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di

Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang sosial. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang sosial hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sosial. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang sosial :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

Pada tahun 2021, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti telah mencapai 100%. Adapun rumus perhitungan pencapaian layanan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$$

$$= \frac{53}{53} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial adalah 100%. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk sudah memiliki kendaraan khusus untuk Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Realisasi rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial} = \frac{\text{Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi anak terlantar di kabupaten nganjuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{727}{727} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2021, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sudah bisa mencapai 100%. Meskipun pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti bisa tercapai 100%, namun karena terbatasnya anggaran untuk rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, maka masih ada fasilitas yang belum terpenuhi seperti akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Lanjut usia terlantar merupakan salah satu kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Untuk mengetahui realisasi standar pelayanan minimal Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial} = \frac{\text{Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi lansia terlantar di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{14} \times 100\%$$

$$= 85{,}71\%$$

Berdasarkan pada perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti di Kabupaten Nganjuk mencapai 85,71%. Layanan yang belum bisa terpenuhi adalah penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Gelandangan dan pengemis yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah perseorangan atau kepala keluarga yang berusia 19 tahun sampai dengan 60 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan terurus serta tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Capaian layanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial} = \frac{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Nganjuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{47}{47} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pencapaian terhadap pengukuran layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis di luar Panti sebesar 100%. Untuk layanan data dan pengaduan bagi gelandangan dan pengemis di luar panti belum ada pengaduan dari pihak manapun. Karena keterbatasan anggaran untuk gelandangan dan pengemis yang diluar panti maka Dinas Sosial PPPA belum bisa menyediakan sandang maupun alat bantu.

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten

Pada tahun 2021 Dinas Sosial PPPA menyediakan permakanan dan penanganan khusus bagi kelompok rentan serta menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk korban tanah longsor dan banjir di Kabupaten Nganjuk. Hal itu disebabkan karena pada tahun 2021 Kabupaten Nganjuk tertimpa bencana tanah longsor; angin puting beliung, kebakaran dan banjir. Perhitungan capaian untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana di Kabupaten Nganjuk bisa dihitung dengan rumus :

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten	=	Jumlah korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana / Jumlah korban bencana di Kabupaten Nganjuk	x 100%
	=	$\frac{1.373}{1.373}$ x 100%	
	=	100%	

Penanganan bencana Tahun 2021 di Kabupaten Nganjuk bisa mencapai 100%, hal itu disebabkan karena adanya kerjasama yang baik antara Dinas Sosial PPPA dengan semua unsur yang ada di masyarakat.

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Berikut kami tampilkan hasil capaian standar pelayanan Minimal pada masing-masing standar pelayanan sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.37
Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	53	53	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	727	727	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	14	12	85,71

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Persentase Capaian (%)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	47	47	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban Bencana daerah Kabupaten	1737	1737	100

4.8.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.38
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**5,182,264,500.00**	**5,020,309,679.00**	**-161,954,821.00**	**96.87**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4,050,267,150.00**	**3,974,039,629.00**	**-76,227,521.00**	**98.12**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**10,593,000.00**	**10,542,000.00**	**(51,000.00)**	**99.52**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,593,000.00	10,542,000.00	(51,000.00)	99.52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,331,137,000.00**	**3,317,965,791.00**	**(13,171,209.00)**	**99.60**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,320,594,000.00	3,307,497,791.00	(13,096,209.00)	99.61
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,655,000.00	4,640,000.00	(15,000.00)	99.68
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,944,000.00	2,914,000.00	(30,000.00)	98.98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,944,000.00	2,914,000.00	(30,000.00)	98.98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**8,000,000.00**	**7,200,000.00**	**(800,000.00)**	**90.00**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,000,000.00	7,200,000.00	(800,000.00)	90.00

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**254,881,600.00**	**224,020,341.00**	**(30,861,259.00)**	**87.89**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,753,400.00	9,753,200.00	(200.00)	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,943,150.00	90,438,500.00	(1,504,650.00)	98.36
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,801,550.00	11,783,600.00	(17,950.00)	99.85
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,440,500.00	9,911,650.00	(528,850.00)	94.93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,143,000.00	100,333,391.00	(28,809,609.00)	77.69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**196,100,000.00**	**165,071,472.00**	**(31,028,528.00)**	**84.18**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	1,898,000.00	(102,000.00)	94.90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,100,000.00	88,263,472.00	(30,836,528.00)	74.11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,000,000.00	74,910,000.00	(90,000.00)	99.88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**249,555,550.00**	**249,240,025.00**	**(315,525.00)**	**99.87**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112,039,200.00	111,808,525.00	(230,675.00)	99.79
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,450,200.00	32,394,000.00	(56,200.00)	99.83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105,066,150.00	105,037,500.00	(28,650.00)	99.97
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**273,780,950.00**	**270,215,450.00**	**(3,565,500.00)**	**98.70**
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**273,780,950.00**	**270,215,450.00**	**(3,565,500.00)**	**98.70**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2,500,000.00	1,800,000.00	(700,000.00)	72.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	256,095,450.00	256,095,450.00	0.00	100.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15,185,500.00	12,320,000.00	(2,865,500.00)	81.13
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**488,720,150.00**	**457,444,200.00**	**-31,275,950.00**	**93.60**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**101,660,300.00**	**92,794,200.00**	**(8,866,100.00)**	**91.28**
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	40,736,100.00	38,612,350.00	(2,123,750.00)	94.79

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	60,924,200.00	54,181,850.00	(6,742,350.00)	88.93
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**387,059,850.00**	**364,650,000.00**	**(22,409,850.00)**	**94.21**
Pemberian Layanan Kedaruratan	44,737,750.00	34,495,650.00	(10,242,100.00)	77.11
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	187,332,000.00	176,871,650.00	(10,460,350.00)	94.42
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	154,990,100.00	153,282,700.00	(1,707,400.00)	98.90
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**100,494,850.00**	**50,923,350.00**	**-49,571,500.00**	**50.67**
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**2,135,000.00**	**2,004,750.00**	**(130,250.00)**	**93.90**
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	2,135,000.00	2,004,750.00	(130,250.00)	93.90
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**98,359,850.00**	**48,918,600.00**	**(49,441,250.00)**	**49.73**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	98,359,850.00	48,918,600.00	(49,441,250.00)	49.73
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**240,999,800.00**	**239,685,450.00**	**(1,314,350.00)**	**99.45**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**240,999,800.00**	**239,685,450.00**	**(1,314,350.00)**	**99.45**
Penyediaan Makanan	240,999,800.00	239,685,450.00	(1,314,350.00)	99.45
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**28,001,600.00**	**28,001,600.00**	**0.00**	**100.00**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**28,001,600.00**	**28,001,600.00**	**0.00**	**100.00**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	28,001,600.00	28,001,600.00	0.00	100.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 (Unaudited)

4.8.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 4.39
Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No.	Kepala Dinas / Bidang / Subag / Seksi	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	Kepala Dinas Sosial PPPA	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum	3
	- Sub. Bagian Keuangan	2
	- Sub. Bagian Program dan Evaluasi	1
	Jumlah	**8**
3.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	1
	- Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	0
	- Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	1
	-Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia	0
	Jumlah	**2**
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	1
	- Seksi Pemberdayaan Sosial	1
	- Seksi Kesejahteraan masyarakat	2
	- Seksi Fakir Miskin	1
	Jumlah	**5**
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak	1
	- Seksi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	2
	- Seksi Fasilitasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1
	- Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak	1
	Jumlah	**5**
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat	1
	- Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1
	- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1
	- Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan	1
	Jumlah	**4**
Jumlah Keseluruhan		**24**

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

4.8.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Sosial di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Validitas data PMKS/PPKS belum akuntabel
2) Sarana dan prasarana untuk pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti masih kurang
3) Kuantitas ASN yang menangani bidang sosial masih kurang.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut:

1) Membangun data yang berkualitas
2) Integrasi Aplikasi Data Pokok Kependudukan
3) Membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
4) Peningkatan sarana & prasarana layanan rehabilitasi sosial

4.9 Program dan Kegiatan

4.9.1 SPM Bidang Pendidikan

Dalam mendukung capaian SPM Bidang Pendidikan, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan Laboratorium
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

4.9.2 SPM Bidang Kesehatan

Dalam mendukung capaian SPM Bidang Kesehatan, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, RSUD Nganjuk, dan RSUD Kertosono

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Belanja Pegawai
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Puskesmas
Pengembangan Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Pengadaan Obat, Vaksin
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Operasional Pelayanan Puskesmas
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
RSUD NGANJUK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
RSUD KERTOSONO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Non Program
Non Kegiatan
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Rumah Sakit

4.9.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Dalam mendukung capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.42
Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Jalan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

4.9.4 SPM Sub Bidang Trantibum dan Sub Bidang Kebakaran Daerah

Dalam mendukung capaian SPM Sub Bidang Trantibum dan Sub Bidang Kebakaran Daerah, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.43
Program dan Kegiatan SPM Sub Bidang Trantibum dan Sub Bidang Kebakaran Daerah
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

4.9.5 SPM Sub Bidang Bencana Daerah

Dalam mendukung capaian SPM Sub Bidang Bencana Daerah, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.44
Program dan Kegiatan Sub Bidang Bencana Daerah
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kontijensi
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.9.6 SPM Bidang Sosial

Dalam mendukung capaian SPM Bidang Sosial, maka perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.45
Program dan Kegiatan SPM Bidang Sosial
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nganjuk

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, kami telah menyusun sesuai dengan kondisi riil yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kami menyadari apabila terdapat keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Nganjuk tidak lain merupakan hasil kerja keras, dukungan, peran serta dan komitmen seluruh Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan dari DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan dukungan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian di samping keberhasilan yang dapat dicapai tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kami yakin dan optimis bahwa segala permasalahan yang belum dapat diselesaikan tersebut akan menjadi motivasi kami untuk terus berkarya dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi Kabupaten Nganjuk "***Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho***)".

Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 ini masih terdapat kekurangan atau kesalahan penulisan. Untuk itu demi kesempurnaan laporan ini kami mengharap masukan dan sumbang saran dari berbagai pihak baik dari Tim Evaluasi Provinsi maupun Pusat.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk terus meningkatkan semangat dan pengabdian dalam membangun Kabupaten Nganjuk yang kami cintai sehingga semakin maju dan sejahtera. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nganjuk, 30 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA

Scanned with CamScanner